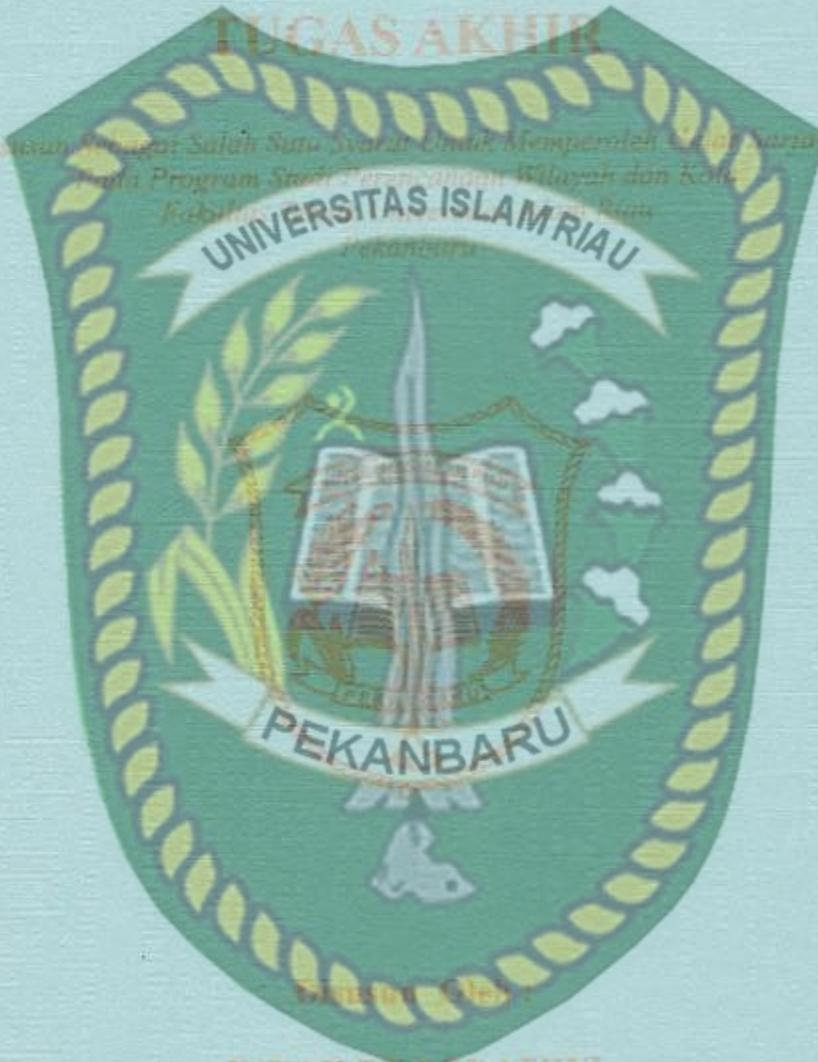


TINGKAT KECUMUHAN DI KECAMATAN BUKIT BATU,
KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(STUDI KASUS : PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN SUNGAI PAKNING)

TUGAS AKHIR

*Dibuat sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Pekanbaru
Universitas Islam Riau*



Dibuat oleh :

INDAH EKA PRATIWI

143410208

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

LEMBAR PENGESAHAN

TINGKAT KECUMUHAN DI KECAMATAN BUKIT BATU,
KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(STUDI KASUS : PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN
SUNGAI PAKNING)

TUGAS AKHIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

INDAH EKA PRATIWI
NPM : 143410208

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Apriyan Dinsala, M.Eng
Dr. APRIYAN DINBALA, M.Eng

PEKANBARU

Perilia Bintang, ST, MT
PERILIA BINTANG, ST, MT

Disahkan Oleh :

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Basulhaslain, M.Ts, M.Ts
Dr. BASULHASLAIN, M.Ts, M.Ts

Pujiastuti, ST, MT
PUJI ASTUTI, ST, MT



TINGKAT KEKUMUHAN DI KECAMATAN BUKIT BATU,
KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(STUDI KASUS : PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN
SUNGAI PAKNING)



NAMA : INDAH EKA PRATIWI
NPM : 1903110208

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Eka Pratiwi
Tempat/ Tanggal Lahir : Serang (Banten), 05 Januari 1997
Alamat : Jalan Bambu Kuning No.257 Kelurahan Sungai
Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada :

Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : S1

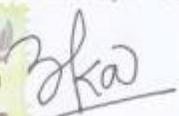
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis adalah benar dan asli dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul :
“Tingkat Kekumuhan di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning)”

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan atau menuntut karena Tugas Akhir ini menggunakan sebagian hasil tulisan atau karya orang lain tanpa mencantumkan nama penulis yang bersangkutan, atau terbukti karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2019

METERAI
TEMPEL
PESBAFF572113151
6000
ENAM RIBURUPAH


Indah Eka Pratiwi

NPM : 143410208

**Tingkat Kekumuhan di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau (studi kasus : Permukiman Kumuh di Kelurahan
Sungai Pakning)
Indah Eka Pratiwi
143410208**

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya, termasuk kota atau kabupaten di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki permasalahan permukiman kumuh yang luasnya sebesar 1.179,72 hektar (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) yang mencakup dua kota dan sepuluh kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis memiliki luas permukiman kumuh sebesar 180,33 hektar yang mencakup 12 lokasi di delapan kecamatan, salah satunya Kecamatan Bukit Batu di Kelurahan Sungai Pakning. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan, faktor-faktor penyebab dan arahan penanganan permasalahannya di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner serta data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis menggunakan skoring (pembobotan) sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan dianalisis menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permukiman di Kelurahan Sungai Pakning termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan total nilai 43, faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor lahan dan faktor psikologis dan arahan penanganan yaitu melakukan peremajaan dengan program-program penataan lingkungan.

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Tingkat Kekumuhan, Kelurahan Sungai Pakning.

Level of Slum in Bukit Batu District, Bengkalis Regency, Riau Province (case study: Slum Settlement in Sungai Pakning Subdistrict)

Indah Eka Pratiwi
143410208

ABSTRACT

Slum settlement is one of problems occurred in most of cities in Indonesia, even in big cities in other developing countries, including city or regency in Riau Province. Riau Province has slum settlement at 1,179.72 hectare (according to Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) that comprises two cities and ten regencies, including Bengkalis Regency. The slum settlement area in Bengkalis reaches 180.33 hectare that consists of 12 locations in 8 districts, one of which is Bukit Batu District in Sungai Pakning Subdistrict. This research will study level of slums, underlying causes, and handling approach to slum settlement in Sungai Pakning Subdistrict, Bukit Batu District.

This research used primary data such as in-field observation, interview, and questionnaires, and secondary data as well. The methods used here were qualitative and quantitative methods which were further analysed by scoring method based on slum settlement criteria according to Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 about Quality Improvement of Slum and Slum Settlements and analysed by triangulation.

This research suggests that slum settlement in Sungai Pakning Subdistrict is categorized into mild level with total score of 43. The underlying causes of slum settlement are considered coming from economy, social-culture, land area, and physiological factors, and handling approach to it is by applying environmental structuring programs.

Keywords: Slum Settlement, Level of Slumness, Sungai Pakning Subdistrict

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Tingkat Kekumuhan di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Studi Kasus : Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning)”**

Adapun Tugas Akhir ini dibuat untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa banyak halangan yang datang dalam proses penyelesaian, namun syukur Alhamdulillah dengan bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga hambatan – hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan yang terbaik dalam penyusunan tugas akhir.
2. Ibunda dan Ayahanda serta keluarga besar yang telah banyak memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta materi yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
3. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ir.H.Abdul Kudus Zaini, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Kurnia Hastuti, ST., MT selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
6. Bapak M. Aryon, ST.,MT selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Islam Riau
7. Bapak Syawaldi, ST., MT selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
8. Ibu Puji Astuti, ST, MT, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

9. Bapak Muhammad Sofwan, ST, MT, selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
10. Bapak Dr. Apriyan Dinata, M.Env, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Ibu Cihe Aprilia Bintang, ST, MT, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
13. Bapak Faizan Dalilla, ST, MT dan Ibu Febby Asteriani, ST, MT, selaku Dosen Penguji yang telah bersedia memberikan waktu dan sarannya kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini dan semoga dengan selesainya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 24 Juni 2019

Indah Eka Pratiwi

143410208

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah	7
1.5.2. Ruang Lingkup Materi	11
1.6. Kerangka Berpikir	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Permukiman	14
2.1.1. Pengertian Perumahan.....	14
2.1.2. Pengertian Permukiman	14
2.1.3. Faktor-Faktor Pokok Dalam Penentuan Kawasan Permukiman	17
2.1.4. Aspek-Aspek Dalam Penentuan Kawasan Permukiman.....	18
2.1.5. Faktor-Faktor Penentu Pengadaan Perumahan dan Permukiman	19
2.2. Permukiman Kumuh	19
2.2.1. Pengertian Permukiman Kumuh	19
2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh	21
2.2.3. Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh	27
2.2.4. Penanganan Permukiman Kumuh	39
2.3. Penelitian Terdahulu	81
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	88
3.1. Lokasi Penelitian	88
3.2. Pendekatan Penelitian	88
3.3. Teknik Penelitian.....	89
3.4. Variabel dan Indikator Penelitian.....	90
3.5. Tahapan Penelitian	93
3.6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data	96
3.7. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	98
3.8. Teknik Analisis Data.....	99

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	107
4.1. Kecamatan Bukit Batu	107
4.1.1. Kondisi Fisik Dasar	107
4.1.2. Penggunaan Lahan	110
4.1.3. Kependudukan.....	111
4.1.4. Sosial Budaya	114
4.1.5. Sarana Prasarana	115
4.2. Kelurahan Sungai Pakning	126
4.2.1. Kondisi Fisik Dasar	126
4.2.2. Penggunaan Lahan	127
4.2.3. Kependudukan.....	128
4.2.4. Sosial Budaya	131
4.2.5. Sarana Prasarana	132
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	139
5.1. Tingkat Kekumuhan Pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning	139
5.1.1. Kondisi Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning.....	139
5.1.2. Analisis Tingkat Kekumuhan Pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning	150
5.2. Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning	167
5.2.1. Faktor Ekonomi	167
5.2.2. Faktor Sosial Budaya	170
5.2.3. Faktor Lahan	172
5.2.4. Faktor Psikologis	174
5.3. Arahan Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning	177
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	189
6.1. Kesimpulan.....	189
6.2. Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	191
LAMPIRAN	195

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kriteria dan Indikator Kawasan Kumuh	36
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu	85
Tabel 3.1.	Metodologi Penelitian	91
Tabel 3.2.	Narasumber dalam Wawancara.....	95
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu	108
Tabel 4.2.	Jarak Lurus antara Ibukota Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	108
Tabel 4.3.	Jumlah Dusun, RW, dan RT Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu	109
Tabel 4.4.	Topografi Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	109
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu.....	112
Tabel 4.6.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Bukit Batu	113
Tabel 4.7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Bukit Batu	114
Tabel 4.8.	Jumlah Sekolah,Murid,Guru dan Rasio Murid-Guru TK Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	116
Tabel 4.9.	Jumlah Sekolah,Murid,Guru dan Rasio Murid-Guru SD Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	116
Tabel 4.10.	Jumlah Sekolah,Murid,Guru dan Rasio Murid-Guru SMP Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	118
Tabel 4.11.	Jumlah Sekolah,Murid,Guru dan Rasio Murid-Guru SMA Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	118
Tabel 4.12.	Jumlah Sekolah,Murid,Guru dan Rasio Murid-Guru SMK Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	119
Tabel 4.13.	Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.....	121
Tabel 4.14.	Jumlah Poliklinik, Praktek Dokter, Praktek Bidan dan Posyandu Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu	121
Tabel 4.15.	Jumlah Apotik dan Toko Obat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu	122
Tabel 4.16.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu	122
Tabel 4.17.	Jumlah Sarana Peribadatan/Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu	123
Tabel 4.18.	Nama Jalan di Kecamatan Bukit Batu	125
Tabel 4.19.	Jumlah Penduduk dan Jumlah KK Kelurahan Sungai Pakning.....	128
Tabel 4.20.	Jumlah KK Menurut RT di Kelurahan Sungai Pakning	129
Tabel 4.21.	Kepadatan Penduduk Kelurahan Sungai Pakning.....	130

Tabel 4.22. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Sungai Pakning	130
Tabel 4.23. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelurahan Sungai Pakning	131
Tabel 4.24. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Sungai Pakning	132
Tabel 4.25. Jumlah Penduduk Menurut Suku/Etnis Kelurahan Sungai Pakning	132
Tabel 5.1. Kriteria Rumah Penduduk di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	139
Tabel 5.2. Nama, Panjang dan Kondisi Jalan Lingkungan di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	141
Tabel 5.3. Nama dan Panjang Jalan Lingkungan Tanah di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	141
Tabel 5.4. Jumlah Rumah Menggunakan Sumber Air Bersih di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	143
Tabel 5.5. Jumlah KK Menggunakan Sumber Air Minum di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	143
Tabel 5.6. Drainase di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	145
Tabel 5.7. Jumlah MCK Menurut Unit Pengolahan di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	146
Tabel 5.8. Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Kelurahan Sungai Pakning	157
Tabel 5.9. Mata Pencaharian Penduduk di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning.....	168
Tabel 5.10. Penghasilan Penduduk di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	168
Tabel 5.11. Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh yang Telah dilakukan Oleh Pemerintah di Kelurahan Sungai Pakning	180
Tabel 5.12. Arahan Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis.....	8
Gambar 1.2.	Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Bukit Batu.....	9
Gambar 1.3.	Peta Lokasi Penelitian Kelurahan Sungai Pakning	10
Gambar 2.1.	Permukiman dengan Kondisi Bangunan Tidak Teratur	28
Gambar 2.2.	Permukiman dengan Kondisi Bangunan Teratur	29
Gambar 2.3.	Kondisi Jalan yang Rusak	29
Gambar 2.4.	Banjir akibat Ketidakterediaan Drainase.....	31
Gambar 2.5.	Pengelolaan PDAM.....	32
Gambar 2.6.	Pembangunan Sanitasi yang Sehat.....	33
Gambar 2.7.	Sampah Di Jalan yang Belum Diangkut	34
Gambar 2.8.	Simulasi Kebakaran	35
Gambar 2.9.	Ilustrasi Keteraturan Bangunan.....	42
Gambar 2.10.	Ilustrasi Kepadatan Bangunan.....	42
Gambar 2.11.	Ilustrasi Aspek Keselamatan Bangunan.....	46
Gambar 2.12.	Ilustrasi Sanitasi dalam Kaveling Rumah	46
Gambar 2.13.	Ilustrasi Kenyamanan dalam Bangunan.....	46
Gambar 2.14.	Ilustrasi Aspek Kemudahan Bangunan	46
Gambar 2.15.	Ilustrasi Jaringan Jalan Lingkungan	48
Gambar 2.16.	Ilustrasi Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan	50
Gambar 2.17.	Ilustrasi Sumur Dangkal dan/atau Sumur Dalam.....	51
Gambar 2.18.	Ilustrasi Sistem Drainase.....	52
Gambar 2.19.	Ilustrasi Sumur Resapan.....	53
Gambar 2.20.	Ilustrasi Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat.....	54
Gambar 2.21.	Ilustrasi Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat.....	54
Gambar 2.22.	Ilustrasi Sistem Pengolahan Persampahan Setempat	57
Gambar 2.23.	Ilustrasi Sistem <i>Sanitary Landfill</i>	58
Gambar 2.24.	Ilustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran	59
Gambar 2.25.	Ilustrasi Jalan Lingkungan dilalui Kendaraan Pemadam Kebakaran	59
Gambar 2.26.	Ilustrasi Sarana Komunikasi pada Pusat Pertokoan	60
Gambar 4.1.	Foto Sarana Pendidikan Dasar di Kecamatan Bukit Batu.....	117
Gambar 4.2.	Foto Sarana Pendidikan Menengah di Kecamatan Bukit Batu	119
Gambar 4.3.	Foto Sarana Kesehatan di Kecamatan Bukit Batu	122
Gambar 4.4.	Foto Sarana Peribadatan di Kecamatan Bukit Batu	124
Gambar 4.5.	Foto Prasarana Jalan di Kecamatan Bukit Batu	125
Gambar 4.6.	Foto Prasarana Air Bersih di Kecamatan Bukit Batu.....	126

Gambar 4.7.	Foto Sarana Pendidikan Dasar di Kelurahan Sungai Pakning.....	133
Gambar 4.8.	Foto Sarana Pendidikan Menengah di Kelurahan Sungai Pakning.....	134
Gambar 4.9.	Foto Sarana Kesehatan di Kelurahan Sungai Pakning.....	135
Gambar 4.10.	Foto Sarana Peribadatan di Kelurahan Sungai Pakning.....	136
Gambar 4.11.	Foto Prasarana Jalan di Kelurahan Sungai Pakning.....	137
Gambar 4.12.	Foto Prasarana Air Bersih di Kelurahan Sungai Pakning.....	138
Gambar 5.1.	Kondisi Rumah Penduduk yang Tidak Layak Huni	140
Gambar 5.2.	Kondisi Rumah Penduduk Rapat	140
Gambar 5.3.	Kondisi Jalan di Permukiman Penduduk	142
Gambar 5.4.	Sumber Air Bersih dan Air Minum Penduduk.....	144
Gambar 5.5.	Kondisi Drainase Lingkungan.....	145
Gambar 5.6.	Kondisi MCK di Permukiman Penduduk	147
Gambar 5.7.	Sistem Pengelolaan Persampahan Penduduk	148
Gambar 5.8.	Rumah Penduduk Material Kayu dan Rapat.....	149
Gambar 5.9.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	151
Gambar 5.10.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Bangunan.....	160
Gambar 5.11.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Jalan Lingkungan.....	161
Gambar 5.12.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Penyediaan Air Minum.....	162
Gambar 5.13.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Drainase Lingkungan.....	163
Gambar 5.14.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	164
Gambar 5.15.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Pengelolaan Persampahan	165
Gambar 5.16.	Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Proteksi Kebakaran.....	166
Gambar 5.17.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “ Dekat dengan Tempat Pekerjaan ”	169
Gambar 5.18.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Penghasilan Rendah ”	169
Gambar 5.19.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “ Sulit Mendapatkan Tempat Tinggal Lain”	170

Gambar 5.20.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Memiliki Keahlian / Skill”	171
Gambar 5.21.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Memiliki Kebiasaan Adat Istiadat yang Sama”	172
Gambar 5.22.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Harga Lahan Mahal”	173
Gambar 5.23.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Ketersediaan Lahan Terbatas”	173
Gambar 5.24.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Tetangga Ramah dan Baik”	175
Gambar 5.25.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Sesama Tetangga Tolong Menolong”	175
Gambar 5.26.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Lingkungan Permukiman Aman”	176
Gambar 5.27.	Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning “Suasana Kekeluargaan dan Persaudaraan yang Kental	176
Gambar 5.28.	Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	177
Gambar 5.29.	Kondisi Jalan Lingkungan Baru di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	178
Gambar 5.30.	Bantuan Sumur Bor di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	178
Gambar 5.31.	Sosialisasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABs)	179
Gambar 5.32.	Penyediaan Tong Sampah di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning	179
Gambar 5.33.	Penataan Koridor Jalan Kawasan Permukiman (Menata Infrastruktur, Menyediakan Ruang Bagi Pejalan Kaki (pedestrian) dan Jalur Hijau	185
Gambar 5.34.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman (Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase)	186
Gambar 5.35.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman (Penempatan Tong Sampah, Penerangan dan Jalur Hijau)	186
Gambar 5.36.	Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman	187

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di Indonesia dan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai (World Bank, 1999). Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Permukiman kumuh dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik bangunan dan lingkungan permukiman maupun ciri-ciri sosial ekonomi dan budaya. Ciri-ciri fisik bangunan dan lingkungan permukiman kumuh antara lain adalah tingginya tingkat kepadatan penduduk, kepadatan bangunan cukup tinggi, tata letak yang tidak teratur, sanitasi jelek serta kualitas bangunan yang jelek. Ciri lain permukiman kumuh juga sering berasosiasi dengan kawasan industri, sekitar bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, serta sekitar daerah pusat kegiatan (Socik,1993 dalam

Rindarjono,2012). Ciri-ciri nonfisik permukiman kumuh ditandai dengan jenis pekerjaan penghuninya yang sebagian besar bekerja di sector informal dengan tingkat penghasilan yang rendah, dan jumlah anggota keluarga yang relative banyak. Permukiman kumuh juga terkait dengan lamanya tinggal dipermukiman serta pendidikan penghuninya yang rendah (Turner,1982 dalam Rindarjono,2012). Faktor – faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan adalah faktor urbanisasi, faktor lahan perkotaan, faktor prasarana dan sarana, faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor tata ruang (Rindrojono,2013). Permukiman kumuh terbagi atas tiga kategori adalah kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan.

Kawasan bebas kumuh serta layak huni masih menjadi impian bagi banyak penduduk di Indonesia. Begitupun bagi pemerintah Indonesia, sehingga melalui RPJMN III 2015-2019 Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang dinamai dengan “Gerakan 100-0-100” yaitu pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia di tahun 2019.

Oleh sebab itu, pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia;(2) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Berdasarkan data Warehouse Direktorat Cipta Karya tahun 2017, luas kawasan kumuh di Indonesia 43.976,88 hektar dimana 32,32% kawasan kumuh tidak terdefinisi, 27,26% terkategori ringan, 25,56% kategori sedang, dan 14,86% dalam kategori berat.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak dibagian tengah Pulau Sumatra. Provinsi Riau memiliki luas 88.672.67 km². Provinsi Riau terdiri dari sepuluh kabupaten (Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi) dan dua kota (Kota Pekanbaru dan Kota Dumai), 166 kecamatan dan 246 kelurahan / desa. Jumlah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2017 sebanyak 6.657.911 Jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten / kota yang ada di Provinsi Riau (Provinsi Riau dalam angka 2017). Provinsi Riau ini memiliki permasalahan lingkungan, salah satu adalah permasalahan permukiman kumuh dimana luasan kawasan kumuh di Provinsi Riau seluas 1.179,72 hektar dari dua Kota dan sepuluh Kabupaten, salah satu kabupaten yang terdapat permukiman kumuh adalah Kabupaten Bengkalis (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 7.773,93 km² terdiri dari delapan Kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 551.683 jiwa pada tahun 2016 (Kabupaten Bengkalis, dalam angka 2017). Kabupaten Bengkalis ini memiliki luas permukiman kumuh sebesar 180,33 hektar dari delapan Kecamatan yang meliputi

12 lokasi permukiman kumuh, salah satunya adalah Kecamatan Bukit Batu (SK Bupati Bengkalis No. 341/KPTS/2014).

Kecamatan Bukit Batu merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis yang memiliki luas wilayah sebesar 1.022 km² terdiri dari satu kelurahan dan enam belas desa dengan jumlah penduduk sebesar 29.370 jiwa pada tahun 2016 (Kecamatan Bukit Batu, dalam angka 2017). Permukiman kumuh yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu yaitu di Kelurahan Sungai Pakning dengan luas sebesar 27,09 hektar. Kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini sebenarnya sudah terbentuk lama namun karena kurangnya perhatian dari pemerintah membuat kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Bukit Batu ini belum teratasi. Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan seperti hunian yang kondisi rumah tidak sehat, jarak antar rumah terlalu berdekatan, hal ini sangat rentan terhadap kebakaran dan permasalahan kurangnya ketersediaan prasarana lingkungan seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, tempat sampah yang kondisinya masih minim yang menyebabkan lingkungan permukiman tampak kotor.

Maka dari permasalahan tersebut penulis mengangkat sebuah judul tentang **“Tingkat Kekumuhan di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Studi kasus : Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning”**.

1.2. Rumusan Masalah

Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai permasalahan-permasalahan yang salah satu permasalahannya adalah permasalahan lingkungan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/2014, Kabupaten Bengkalis ini memiliki luas permukiman kumuh sebesar 180,33 hektar dari delapan Kecamatan yang meliputi 12 lokasi permukiman kumuh, salah satunya adalah Kecamatan Bukit Batu.

Permukiman kumuh yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu yaitu di Kelurahan Sungai Pakning. Kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini sebenarnya sudah terbentuk lama namun karena kurangnya perhatian dari pemerintah membuat kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini belum teratasi dan juga masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi seperti itu. Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan seperti hunian yang kondisi rumah tidak sehat, jarak antar rumah terlalu berdekatan, hal ini sangat rentan terhadap kebakaran dan permasalahan kurangnya ketersediaan prasarana lingkungan seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, tempat sampah yang kondisinya masih minim yang menyebabkan lingkungan permukiman tampak kotor. Selain itu permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini kondisi ekonomi sosial masyarakat yang rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat pendidikan yang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak pada lingkungan permukiman kumuh.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- i. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu Bengkalis.
- ii. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu.
- iii. Untuk mengetahui arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu yang berupa rekomendasi perencanaan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas permukiman yang baik dan sehat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- i. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji hal-hal yang tentunya berkaitan dengan permukiman kumuh.
- ii. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu dalam menentukan kebijakan pengembangan atau penataan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning .
- iii. Bagi masyarakat, agar masyarakat tersebut mendapatkan kehidupan yang sehat dan layak huni.

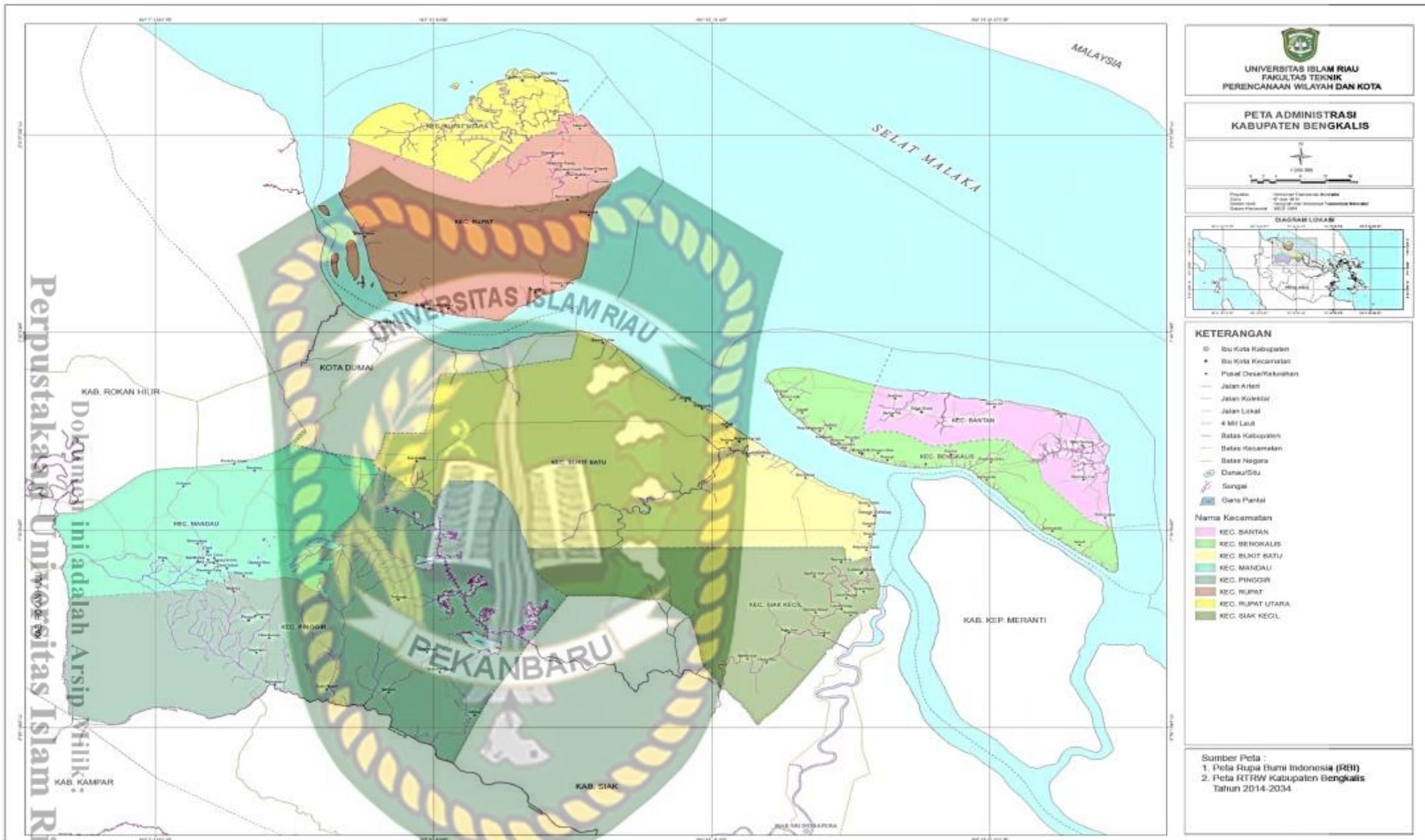
1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

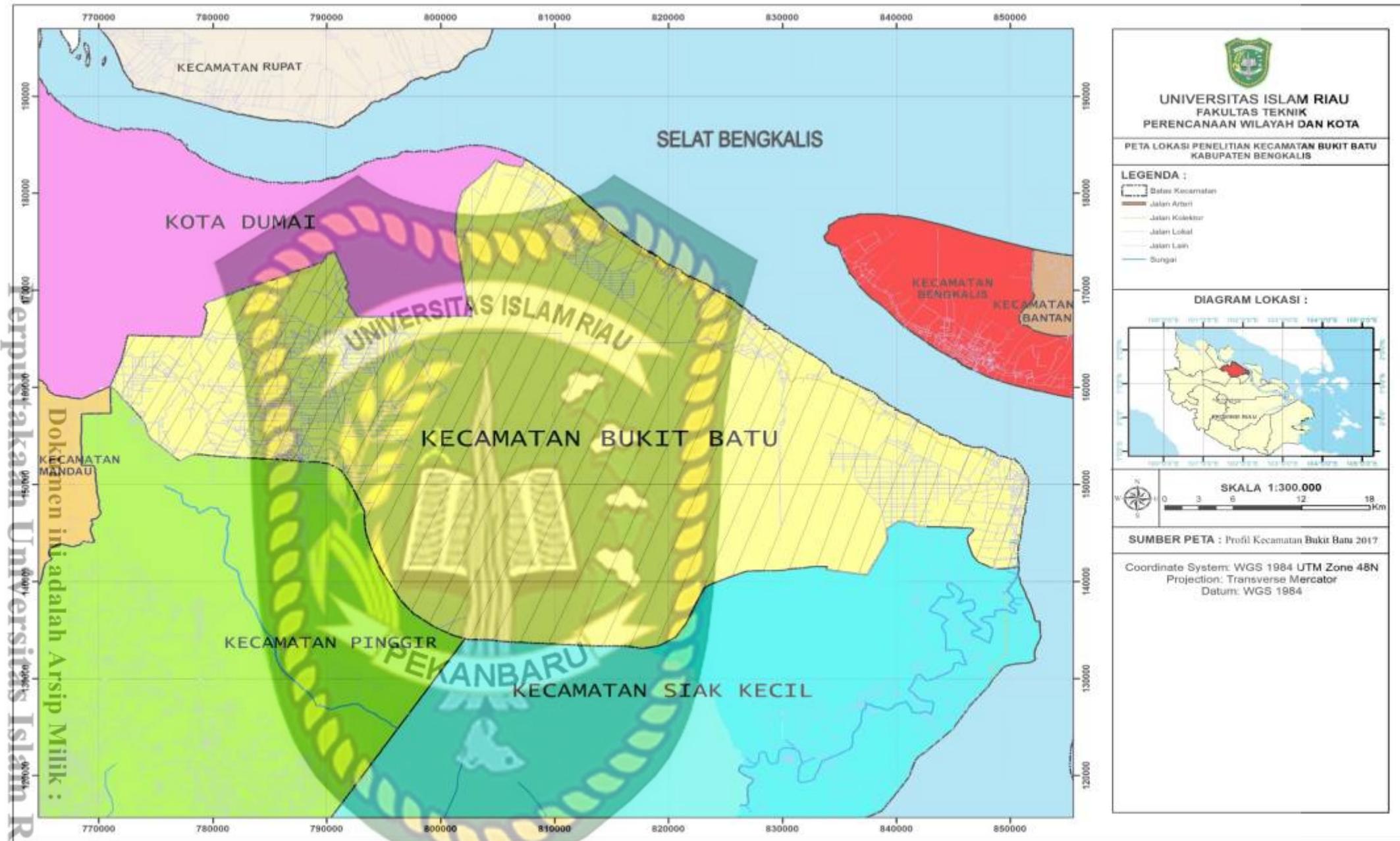
Ruang lingkup wilayah penelitian ini di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 7.773,93 kilometer persegi. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 kecamatan yang salah satunya Kecamatan Bukit Batu yang merupakan wilayah penelitian penulis yang memiliki luas wilayah 1.022 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebesar 29.370 jiwa yang terdiri dari satu Kelurahan dan enam belas Desa. Kecamatan Bukit Batu ini terdapatnya permukiman kumuh yaitu di Kelurahan Sungai Pakning. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/2014, Kelurahan Sungai Pakning ini memiliki luas permukiman kumuh sebesar 27,09 hektar. Berikut ini peta-peta lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

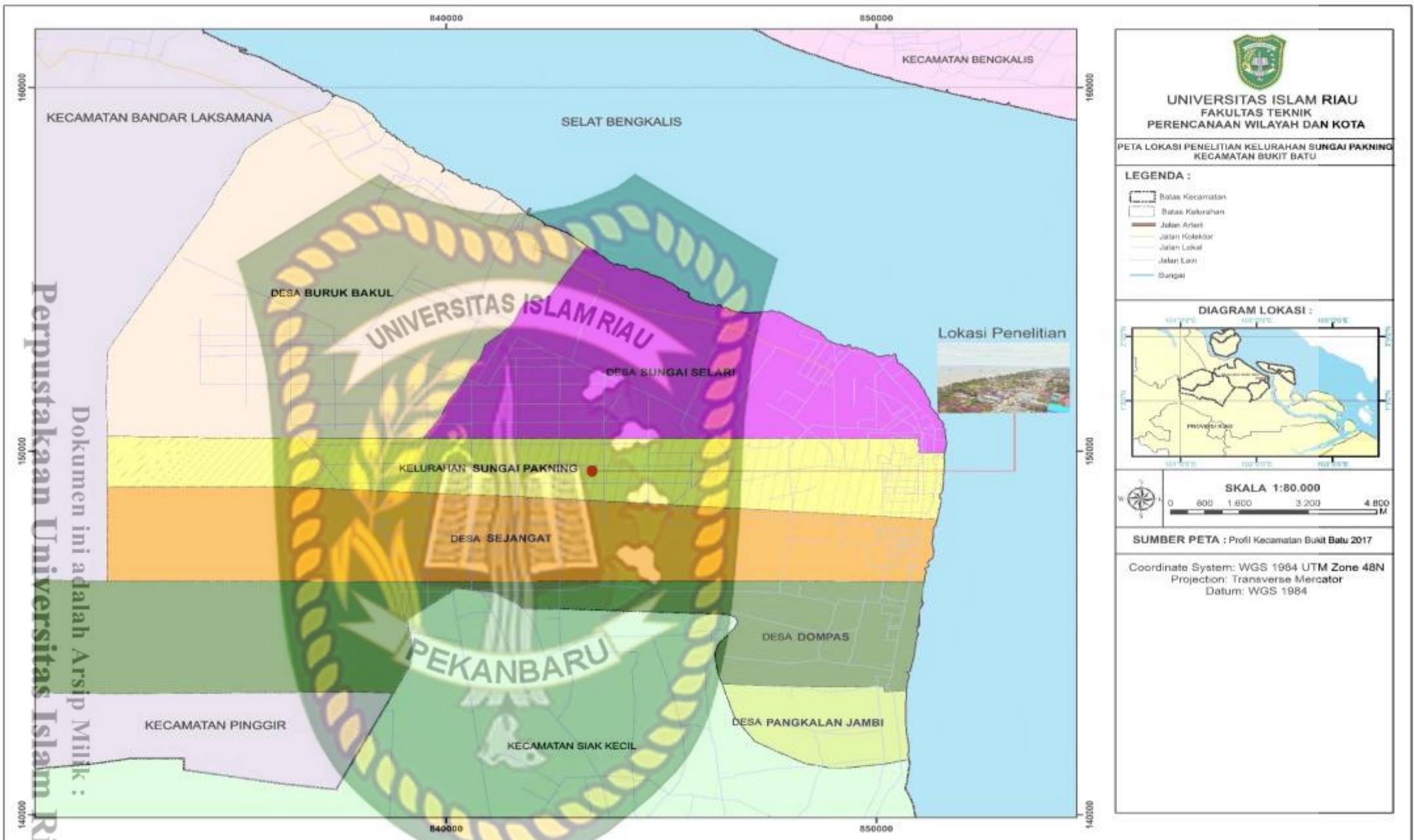




Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis



Gambar 1.2. Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Bukit Batu



Gambar 1.3. Peta Lokasi Penelitian Kelurahan Sungai Pakning

1.5.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini adalah mengenai tingkat permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu yang berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/2014 dengan fokus kajian pada aspek kriteria kawasan kumuh dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Fisik

Kondisi fisik dapat mempengaruhi kekumuhan suatu kawasan permukiman yang berdasarkan indikator adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan Gedung dengan beberapa indikator yakni ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- b. Jalan Lingkungan dengan beberapa indikator yakni cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan.
- c. Penyediaan Air Minum dengan beberapa indikator yakni ketidakterediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.
- d. Drainase Lingkungan dengan beberapa indikator yakni ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidakterediaan drainase, ketidakterhubungan dengan system drainase perkotaan, tidak terpeliharanya drainase dan kualitas konstruksi drainase.

- e. Pengelolaan Air Limbah dengan beberapa indikator yakni system pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- f. Pengelolaan Persampahan dengan beberapa indikator yakni prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, system pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- g. Proteksi Kebakaran dengan beberapa indikator yakni ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran dan ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran.

2. Legalitas Tanah

Legalitas tanah dapat mempengaruhi tingkat kekumuhan suatu kawasan permukiman yang berdasarkan status penguasaan tanah yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan pihak lain yang merupakan indikator pada aspek legalitas tanah.

3. Aspek Kependudukan

Kependudukan dapat mempengaruhi kekumuhan disuatu kawasan permukiman berdasarkan tingkat kepadatan penduduk merupakan bagian dari indikator kekumuhan.

Untuk mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini meliputi faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor lahan dan faktor psikologis serta merekomendasi perencanaan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas permukiman yang baik dan sehat.

1.6. Kerangka Berpikir

Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di Negara berkembang lainnya. Lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai (World Bank, 1999).

Rumusan Masalah

Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu ini adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan seperti hunian yang kondisi rumah tidak sehat, jarak antar rumah terlalu berdekatan, hal ini sangat rentan terhadap kebakaran dan permasalahan kurangnya ketersediaan prasarana lingkungan seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, tempat sampah yang kondisinya masih minim yang menyebabkan lingkungan permukiman tampak kotor. Selain itu permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini pada kondisi ekonomi sosial masyarakat yang rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat pendidikan yang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak pada lingkungan permukiman kumuh.

Tujuan

Untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh Kecamatan Bukit Batu Bengkalis yaitu Kelurahan Sungai Pakning.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu.

Untuk mengetahui arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu

Sumber Data

Identifikasi tingkat kekumuhan dengan beberapa aspek:

1. Kondisi Fisik
2. Legalitas Tanah
3. Kependudukan

Identifikasi faktor – faktor penyebab terjadinya di permukiman kumuh.

Merekomendasi bentuk-bentuk perencanaan untuk mengatasi permukiman kumuh

Analisis Kuantitatif dan Analisis Skoring

Analisis deskriptif kualitatif

Analisis Triangulasi

Hasil Penelitian

Tingkat Kekumuhan dan Penanganan di Permukiman Kumuh Kecamatan Bukit Batu
(Kelurahan Sungai Pakning)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Permukiman

2.1.1. Pengertian Perumahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perumahan juga dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam SNI 03-6981-2004, Perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sebagai sekelompok rumah, perumahan menjadi bagian dari permukiman (Muta'ali, 2016).

2.1.2. Pengertian Permukiman

Terdapat perbedaan pengertian antara pemukim, pemukiman dan permukiman. Permukiman berasal dari kata pemukim. Dari asal katanya terdapat tiga istilah penting dalam permukiman yang berbeda maknanya yaitu pemukim, pemukiman dan permukiman (Muta'ali, 2006).

a. Pemukim

Pemukim adalah penghuni suatu tempat atau rumah. Pemukim memiliki arti seseorang yang menghuni suatu tempat tinggal.

b. Pemukiman

Pemukiman berasal dari kata pemukim dengan akhiran -an. Secara ilmu Bahasa, kata pemukiman tergolong dalam kata kerja yang sama dengan *to settle*. Dari pembentukan katanya, pemukiman memiliki arti tindakan memukimkan. Pemukiman adalah suatu tindakan untuk memukimkan seseorang pada suatu lokasi atau tempat tinggal tertentu.

c. Permukiman

Secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong dalam kata benda. Dalam Bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai *human settlement* yang merupakan suatu kumpulan manusia baik di kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual dan nilai-nilai budaya yang menyertainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman didalam Kamus Tata Ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu :

- a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- b. Kawasan yang didominasi kawasan hunian dengan fungsi utama sebagai fungsi tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap.

Menurut Finch (1957) dalam Muta'ali (2016), settlement atau permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia yang mencakup fasilitas seperti bangunan rumah, jalur jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut. Dari Batasan tersebut jelas bahwa permukiman bukan hanya kelompok bangunan tempat tinggal tetapi juga dalamnya termasuk semua sarana dan prasarana penunjang kehidupan penghuninya.

The American Public Health Association (APHA,1960) dalam Rindarjono (2012) dan Muta'ali (2016) memberikan pengertian permukiman sebagai suatu bangunan rumah yang mengacu pada fungsi pokok rumah bagi manusia yaitu tempat untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, tempat untuk berlindung dari penularan penyakit menular serta berlindung dari gangguan keamanan dan/atau kecelakaan.

Menurut Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman (1979) dalam Muta'ali (2016), permukiman adalah suatu tempat rumah-rumah, tempat tinggal penduduk atau salah satu sarana hunian yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Batasan tersebut mengacu pada kelompok rumah serta sarana hunian atau fasilitas perumahan.

Suatu status tanah yang digunakan dalam permukiman suatu yang wajib. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak dan tanah. Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas kepemilikannya. Berdasarkan Undang-undang Pertanahan No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Macam-macam status lahan tanah yaitu : Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Tanah Bebas, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Sewa dan Tanah Negara.

2.1.3. Faktor-Faktor Pokok Dalam Penentuan Kawasan Permukiman

Agar terciptanya tertib pembangunan permukiman, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan dan harus dijadikan pokok perhatian, yaitu (Doxiadis dalam Syam, 2017) :

- a. Alam, menyangkut tentang pola tata guna tanah, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, daya dukung lingkungan serta taman, area rekreasi atau olahraga.
- b. Manusia, antara lain menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan fisik atau fisiologis, penciptaan rasa aman dan terlindung, rasa memiliki lingkungan (hadarbeni) serta tata nilai dan estetika.
- c. Masyarakat, menyangkut tentang partisipasi penduduk, aspek hukum, pola kebudayaan, aspek social ekonomi dan kependudukan.
- d. Wadah atau sarana kegiatan, menyangkut tentang perumahan, pelayanan umum dan fasilitas umum.
- e. Jaringan prasarana, menyangkut utilitas, transportasi dan komunikasi.

2.1.4. Aspek-Aspek Dalam Penentuan Kawasan Permukiman

Suatu permukiman hendaknya mengikuti kriteria bagi permukiman yang baik, dengan memenuhi hal-hal berikut ini (Silas,1990 dalam Syam 2017) :

1. Aspek fisik, meliputi :
 - a. Letak geografis, yaitu aspek yang menentukan keberhasilan dan perkembangan dari suatu kawasan.
 - b. Lingkungan alam dan binaan, yaitu aspek lingkungan alam dan binaan yang akan sangat mempengaruhi kondisi permukiman serta kehidupan penghuninya.
 - c. Sarana dan prasarana lingkungan, yaitu penyediaan sarana dan prasarana akan mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat dalam permukiman tersebut.
2. Aspek non fisik, meliputi :
 - a. Aspek politik, yang termasuk kebijaksanaan yang mengatur kawasan permukiman, keberadaan lembaga-lembaga desa dan sebagainya.
 - b. Aspek ekonomi, yaitu aspek yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.
 - c. Aspek sosial, yaitu aspek yang meliputi kehidupan social masyarakat, bertetangga dan sebagainya.
 - d. Aspek budaya, yaitu aspek yang berkaitan dengan kehidupan adat istiadat, kehidupan beragama dan kebiasaan bekerja.

2.1.5. Faktor-Faktor Penentu Pengadaan Perumahan dan Permukiman

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pengadaan perumahan dan permukiman antara lain (Syam, 2017) :

1. Faktor Kebutuhan

Faktor kebutuhan ini menyangkut mengenai besarnya kebutuhan berkaitan dengan jumlah penduduk yang membutuhkan perumahan baru untuk menampung kehidupannya termasuk :

a. Kebutuhan sebagai tempat tinggal

Hal ini tentu saja berkaitan dengan bentuk fisik dari lingkungan permukiman yang layak disebut sebagai tempat tinggal dan lebih baik dari kondisi rumah sebelumnya dan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kenyamanan dan keamanan.

b. Kebutuhan sebagai tempat usaha

Jenis kebutuhan ini disamping untuk tempat tinggalnya sekaligus dapat digunakan untuk membuka tempat usaha baik yang berupa toko atau warung kecil. Mengingat kondisi masyarakat adalah golongan ekonomi lemah, untuk kebutuhan akan rumah bukan sekedar tempat tinggal, selain itu juga dapat digunakan usaha menambah penghasilannya.

2. Faktor Minat

2.2. Permukiman Kumuh

2.2.1. Pengertian Permukiman Kumuh

Pada umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, tingkat

kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut.

Kumuh atau *slum* adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. (Raharjo, 2005:147 dalam Syam, 2017)

Charter Adam (1984) dalam Syam (2017) menamakan permukiman di lingkungan kumuh sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) dalam Syam (2017) permukiman kumuh disebutnya sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial. Soemadi (1990) dalam Syam (2017) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.

Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Sulestianson dalam Anindy (2015), Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni, karena kurang teraturnya bangunan, kepadatan bangunan tinggi dan kualitas bangunan/ rumah serta sarana dan prasarana yang tidak memadai atau memenuhi syarat.

2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh

Faktor – faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan (Rindrojono,2013).

Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau sebuah keluarga yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang memberikan kesempatan kerja.

Tanpa kesempatan kerja, menopang kebutuhan sehari-hari sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidupnya. Status kepemilikan rumah dan lahan menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk maupun kualitas rumah merupakan prioritas terakhir. Yang terpenting tersedianya rumah untuk berlindung dan beristirahat dalam upaya untuk mempertahankan hidupnya (Babychen Mathew,2005 dalam Muta'ali,2006).

b. Faktor Sosial Budaya

Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan rendahnya tingkat pendapatan penduduk sehingga membatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu struktur sosial penghuni lingkungan permukiman sangat majemuk dengan beragam norma-norma sosialnya masing-masing (Rindrojono,2013).

Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan/skill dan potensi akan tersingkir dari dunia usaha yang sifatnya formal. Akibatnya untuk mencari pekerjaan mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan bergerak dalam sektor usaha informal. Kasus kejahatan yang dapat terjadi dari konflik sosial adalah akibat semakin tingginya jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin yang tidak mampu untuk bersaing. Maka muncullah kejahatan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Pencurian dan perampokkan dipermudah lagi oleh tidak adanya sosialisasi dengan sikap acuh tak acuh sesama masyarakat yang bersifat individualistis. Dan sesama masyarakat saling tidak kenal dan puas dengan kehidupan subsistem. Tetapi orang-orang miskin dikota mungkin

tidak memiliki alternatif pekerjaan lain kecuali harus mencuri dan merampok untuk mempertahankan kehidupan mereka. Kadang ada juga yang secara terorganisir melakukan perampokan dan pencurian dengan modus yang berbeda-beda. Konflik sosial lain akibat tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat menampung kaum migran adalah dengan melakukan pekerjaan sebagai pemulung atau pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan. Kota pun menjadi fokus dari perubahan sosial yang mengisinkan hadirnya kegiatan-kegiatan personal yang menyimpang. Tingkat kejahatan, kenakalan remaja, dan kegiatan menyimpang lainnya menjadi cukup tinggi di daerah perkotaan. Jika sektor informal bisa menampung tenaga kerja maka pemerintah kota tidak perlu membatasi mereka untuk mencari penghidupan pada sektor informal ini. Karena pada kenyataannya mereka tidak mampu untuk ditampung pada sektor formal karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada masyarakat (Daldjoeni, 1997 dalam Syam, 2017).

Masyarakat merupakan hasil dari suatu perubahan budaya dan akumulasi budaya. Masyarakat bukan sekedar jumlah penduduk saja melainkan sebagai suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka. Sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dimana dari hubungan antar mereka ini terbentuk suatu kumpulan manusia kemudian menghasilkan suatu budaya. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan dari perilaku manusia. Antara masyarakat dan kebudayaan dalam kehidupan yang nyata, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial bagaikan dua sisi mata uang. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan atau sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah

dan pendukungnya (Wisadirana, 2005). Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat atau pola-pola perilaku dari masyarakat disuatu daerah. Dalam adat istiadat terkandung serangkaian nilai, pandangan hidup, keyakinan dan aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini sangat kuat menguasai kehidupan masyarakat.

c. Faktor Lahan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit – unit hunian di permukiman yang tidak layak (Rindrojono,2013).

Lahan di perkotaan untuk perumahan semakin sulit didapat dan semakin mahal, hal ini tentu saja diluar keterjangkauan sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah. Meskipun kebutuhan akan lahan sangat mendesak, terutama untuk pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, usaha-usaha positif dari pihak pemerintah di Negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah tersebut belum terlihat nyata. Para perencana kota, para pengambil kebijakan di pemerintah daerah dan pemerintahan pusat biasanya tidak melihat perlunya usaha pengadaan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan

rendah. Mereka cenderung menolak kenyataan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan lahan untuk kepentingan mereka (Babychen Mathew,2005 dalam Muta'ali,2006).

d. Faktor Psikologis

Dasar dari manusia adalah sebagai makhluk sosial sehingga manusia selalu bersama-sama dengan orang lain dan muncullah suatu kelompok rumah yang kemudian disebut sebagai permukiman. Didalam permukiman tidak hanya sebagai perlindungan tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi. Proses ini adalah suatu pembelajaran seorang individu diperkenalkan kepada nilai serta adat yang ada didalam masyarakat. Dalam permukiman dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan kehidupan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan fisik saja tetapi juga kebutuhan psikis seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan unruk aktualisasi diri dan juga kebutuhan kasih sayang sesama.

Kebutuhan psikologi yang paling mendasar adalah kebutuhan perlindungan atau rasa aman yang apabila kebutuhan dasar ini dirasakan tidak dapat terpenuhii maka timbul rasa tidak betah. Kebutuhan rasa aman inilah sangat menonjol pada para pemukim dipermukiman kumuh, walaupun keadaan rumah yang tidak permanen serta keadaan lingkungan yang jauh dari syarat kesehatan, mereka tetap betah tinggal di permukiman kumuh karena adanya rasa aman dan saling melindungi (Babychen Mathew,2005 dalam Muta'ali,2006). Allah SWT mengingatkan bahwa besarnya nikmat rumah bagi manusia sebagaimana dalam Surah An-Nahl ayat 80 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya :

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawanya) pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu) (*Q.S An Nahl Ayat 80*).

Menurut Tafsir al-Muyassar, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai istirahat dan tempat tinggal bersama keluarga kalian, sedang kalian bermukim di pemukiman yang menetap. Dia menjadikan bagi kalian, saat safar, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang ringan kalian bawa pada waktu bepergian, dan ringan untuk kalian dirikan pada waktu kalian bermukim setelah menempuh perjalanan. Dia menjadikan untuk kalian dari bulu domba, onta dan kambing, sebagai perkakas bagi kalian berupa selimut, pakaian, penutup, permadani dan perhiasan, yang kalian nikmati hingga waktu tertentu.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan bahwa nikmat-nikmat yang dianugerahkan Nya kepada manusia untuk dijadikan tanda keesaan Nya. Allah SWT menganugerahkan rumah bagi manusia. Rumah-rumah itu tidak hanya tempat tinggal atau berlindung dari hujan dan panas tetapi juga

rumah itu menciptakan suasana aman damai dan tenteram serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa kesetiaan di antara penghuninya. Dari rumah tangga yang baik, lahir manusia yang baik.

2.2.3. Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penentuan tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh dengan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi bangunan gedung, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran, legalitas lahan, dan kependudukan. Aspek dan kriteria kawasan permukiman kumuh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kondisi Bangunan dengan faktor-faktor kriteria adalah sebagai berikut:

a) Ketidakaturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Kondisi suatu permukiman yang memiliki bangunan teratur dan tidak teratur dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2

b) Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR. KDB yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
- (2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR. KLB yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

c) Kualitas Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis meliputi: pengendalian dampak lingkungan; pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; keselamatan bangunan gedung; kesehatan bangunan gedung; kenyamanan bangunan gedung; dan kemudahan bangunan gedung.



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.1. Permukiman dengan Kondisi Bangunan Tidak Teratur



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.2. Permukiman dengan Kondisi Bangunan Teratur

b. Kondisi Jalan Lingkungan dengan faktor-faktor kriteria adalah sebagai berikut:

- a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- b) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk.

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan, sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.3. Kondisi Jalan yang Rusak

c. Kondisi Drainase Lingkungan dengan faktor-faktor kriteria adalah sebagai berikut :

- a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
- b) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan yang dapat dilihat pada Gambar 2.4, merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
- c) Ketidaktersediaan Drainase
Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- d) Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan
Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- e) Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat Dan Cair Didalamnya
Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.

f) Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.4. Banjir akibat Ketidakterediaan Drainase

d. Kondisi Penyediaan Air Minum dengan faktor-faktor kriteria adalah sebagai berikut :

- a) Ketidakterediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk akses aman air minum dapat dibangun jaringan perpipaan seperti Gambar 2.5
- b) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar Yang Berlaku

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.5. Pengelolaan PDAM

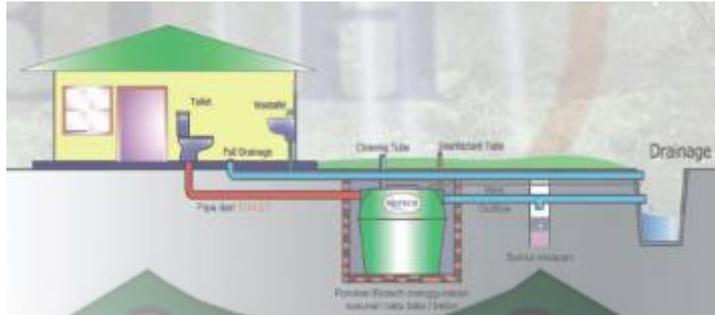
e. **Kondisi Pengelolaan Air Limbah dengan faktor-faktor kriteria adalah sebagai berikut :**

a) **Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Standar Teknis Yang Berlaku**

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat yang dalam contoh pembangunannya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

b) **Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis**

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.6. Pembangunan Sanitasi yang Sehat

f. Kondisi Pengelolaan Persampahan dengan faktor-faktor kriteria adalah sebagai berikut :

a) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan yang Berlaku

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- 1) Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga.
- 2) Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan.
- 3) Gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan.
- 4) Tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) pada skala lingkungan.

b) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis.

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang dapat dilihat pada Gambar 2.7 merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: pewardahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan.

c) Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.7. Sampah Di Jalan yang Belum Diangkut

g. **Kondisi Pengamanan Kebakaran dengan faktor-faktor kriteria adalah sebagai berikut :**

a) Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: pasokan air dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).

b) Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) seperti pada Gambar 2.8; mobil pompa; mobil tangga sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung lainnya.



Sumber : Crysta, 2017

Gambar 2.8. Simulasi Kebakaran

h. Kondisi Legalitas Tanah dengan faktor-faktor kriteria

Legalitas tanah berdasarkan status penguasaan tanah yaitu :

- a) Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
- b) Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah.

i. Kondisi Kependudukan

Kependudukan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :

- a) Rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 jiwa/ha;
- b) Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 150-200 jiwa/ha;
- c) Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha;
- d) Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 Kriteria dan indikator permukiman kumuh di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kriteria dan Indikator Kawasan Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Indikator
1.	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
		Tingkat Kepadatan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/ha 2) Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/ha
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dampak lingkungan 2. Pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 3. keselamatan bangunan gedung 4. Kesehatan bangunan gedung 5. Kenyamanan bangunan gedung
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Cangkupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis.
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman.
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan akses aman air minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

No	Aspek	Kriteria	Indikator
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
		Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal.
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala.
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; 2. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan; 3. Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 4. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

No	Aspek	Kriteria	Indikator
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Pewadahan dan pemilahan domestik; 2. Pengumpulan lingkungan; 3. Pengangkutan lingkungan; 4. Pengolahan lingkungan.
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. Pemeliharaan rutin; dan/atau 2. Pemeliharaan berkala.
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Kondisi Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi Kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Pasokan air; 2. Jalan lingkungan; 3. Sarana komunikasi; 4. Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 5. Bangunan pos kebakaran
		Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (Apar); 2. Mobil pompa; 3. Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. Peralatan pendukung lainnya.
LEGALITAS TANAH			
1.	Legalitas Tanah	Kejelasan status penguasaan tanah	Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa : 1. Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah.
KEPENDUDUKAN			
1.	Kependudukan		Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : (a) Rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 jiwa/ha. (b) Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha. (c) Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha (d) Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa berdasarkan kondisi kekumuhan suatu lokasi atau suatu kawasan dapat disimpulkan adalah :

- a. Tingkat kumuh berat, jika memiliki nilai 71 – 95;
- b. Tingkat kumuh sedang, jika memiliki nilai 45 – 70; dan
- c. Tingkat kumuh ringan, jika memiliki nilai 19 – 44.

2.2.4. Penanganan Permukiman Kumuh

2.2.4.1. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis bangunan gedung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016) :

1. Aspek Kondisi Bangunan Gedung (rumah dan sarana perumahan dan/atau permukiman)

1) Keteraturan Bangunan

Komponen keteraturan bangunan yang meliputi sebagai berikut :

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).

b. Tinggi Bangunan

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

c. Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

d. Tampilan Bangunan

Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan arsitektur yang berlaku, keindahan dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

e. Penataan Bangunan

- a) Pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu.
- b) Pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu.
- c) Pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling.

f. Identitas Lingkungan

- a) Karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik bangunan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenalan suatu lingkungan/bangunan,

sehingga pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang dikunjunginya.

b) Penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas atau penamaan suatu bangunan sehingga pengguna dapat mengenali bangunan yang menjadi tujuannya.

c) Tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh aktivitas informal sebagai pendukung dari aktivitas formal yang diwadahi dalam ruang/bangunan, untuk menghidupkan interaksi sosial dan para pemakainya.

g. Orientasi Lingkungan

a) Tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk menjelaskan berbagai informasi/petunjuk mengenai tempat tersebut, sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap lingkungannya.

b) Tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi baik menuju maupun dari bangunan atau pun area tujuannya.

h. Wajah Jalan

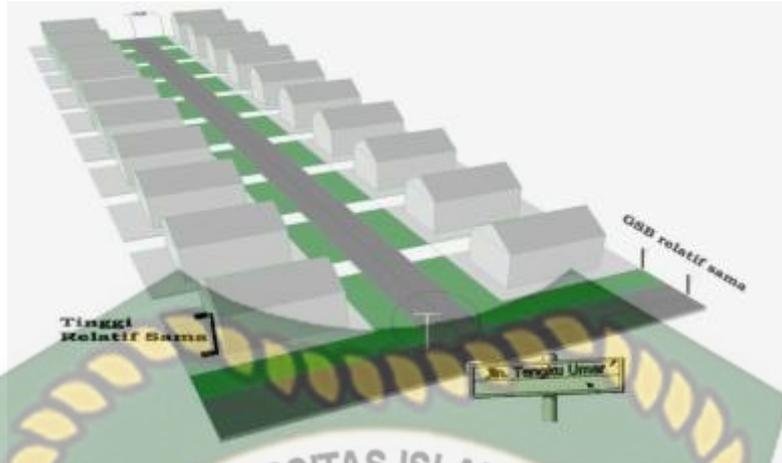
a) Penampang jalan dan bangunan

b) Perabot jalan

c) Jalur dan ruang bagi pejalan kaki

d) Elemen papan reklame

Berikut ini adalah Gambar 2.9. Ilustrasi Keteraturan Bangunan :



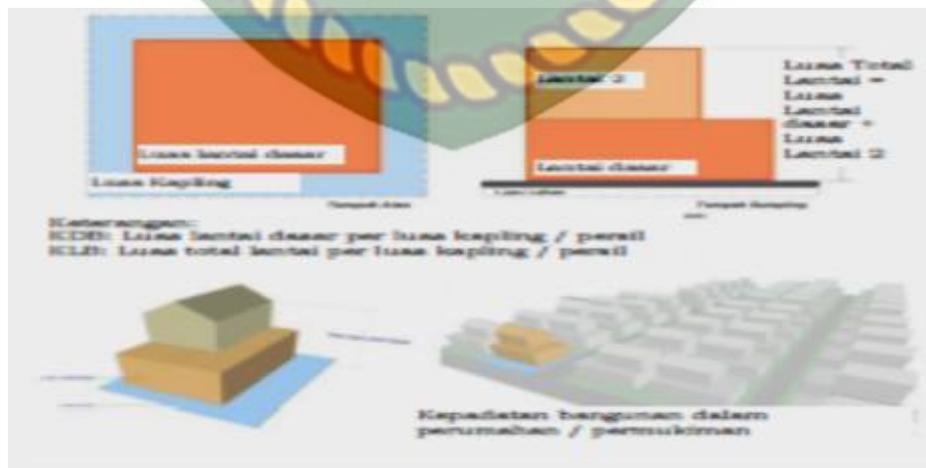
Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016
Gambar 2.9. Ilustrasi Keteraturan Bangunan

2) Tingkat Kepadatan Bangunan

Komponen kepadatan bangunan yang meliputi adalah sebagai berikut :

- a. KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
- b. KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

Berikut ini adalah Gambar 2.10 Ilustrasi KDB dan KLB :



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016
Gambar 2.10. Ilustrasi Kepadatan Bangunan

3) Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Komponen persyaratan teknis bangunan yang meliputi sebagai berikut :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya di luar bangunan rumah tinggal tunggal dan deret. Elemen pengendalian dampak lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
 - a) AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - b) UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki perizinan.
- c. Persyaratan Keselamatan
 - a) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada

Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.

- b) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), sistem proteksi pasif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- c) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- d. Persyaratan Kesehatan
 - a) Sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
 - b) Pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
 - c) Sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa sistem air minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik (untuk sarana medik), persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).

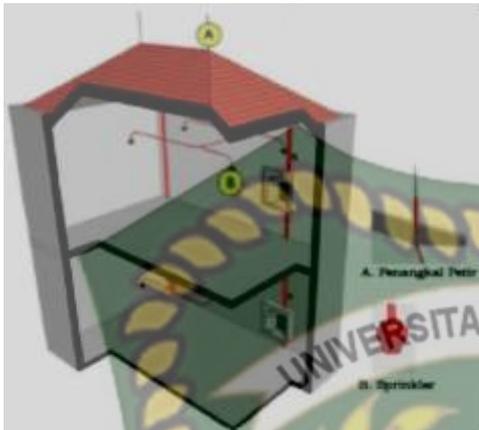
e. Persyaratan Kenyamanan

- a) Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- b) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- c) Kenyamanan pandangan merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di sekitarnya.
- d) Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.

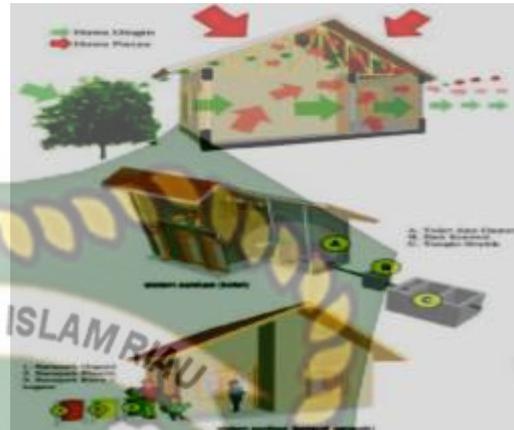
f. Persyaratan Kemudahan

- a) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang disabilitas anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- b) Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung yaitu sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (*eskalator*) atau lantai berjalan (*travelator*).

Gambar 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 mengenai ilustrasi persyaratan teknis bangunan sebagai berikut :



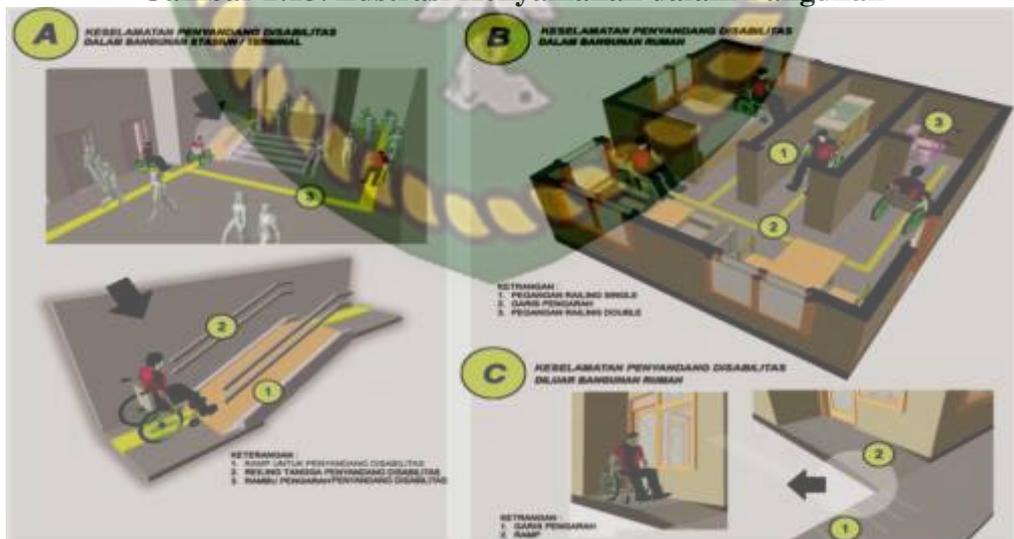
Gambar 2.11. Ilustrasi Aspek Keselamatan Bangunan



Gambar 2.12. Ilustrasi Sanitasi dalam Kaveling Rumah



Gambar 2.13. Ilustrasi Kenyamanan dalam Bangunan



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.14. Ilustrasi Aspek Kemudahan Bangunan

2. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Komponen jalan lingkungan yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Cakupan Pelayanan
 - a. Perlunya Keterhubungan Antar Perumahan Dalam Lingkup Permukiman Skala Wilayah
 - a) Jalan lingkungan sekunder bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
 - b) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
 - b. Perlunya Keterhubungan Antar Persil Dalam Perumahan Dalam Skala Kawasan
 - a) Jalan Lingkungan I, merupakan penghubung antara pusat perumahan dengan pusat lingkungan I, atau pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan I dan akses menuju jalan Lokal Sekunder III.
 - b) Jalan Lingkungan II, merupakan penghubung antara pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan II, atau pusat lingkungan II dengan pusat lingkungan II dan akses menuju jalan lingkungan I yang lebih tinggi tingkat hirarkinya.
- 2) Kualitas Permukaan Jalan, Mengacu dan Menyesuaikan Dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan
 - a. Kualitas Jalan Aspal
 - a) Baik : $IRI \leq 4$
 - b) Sedang: $IRI > 4$ dan $IRI \leq 8$

b. Kualitas Jalan Penmac (Penetrasi Macadam)

a) Baik : $IRI \leq 8$

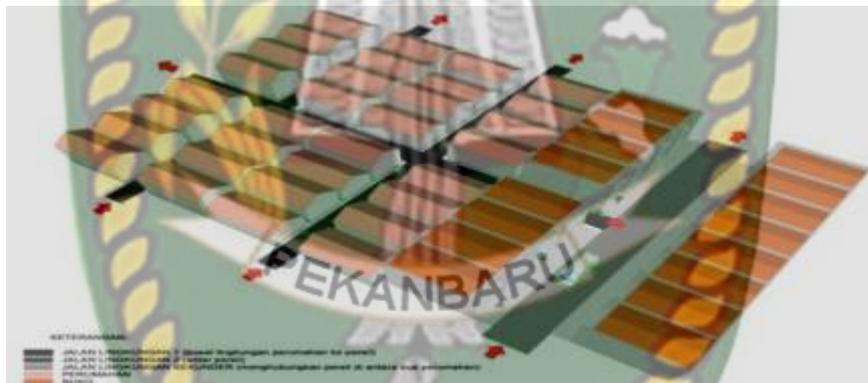
b) Sedang: $IRI > 8$ dan $IRI \leq 10$

c. Jalan Tanah / Diluar Perkerasan

a) Baik : $IRI \leq 10$

b) Sedang: $IRI > 10$ dan $IRI \leq 12$

IRI (*International Roughness Index*) jalan adalah parameter kekerasan permukaan jalan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/panjang permukaan. Berikut ini adalah gambar ilustrasi aspek jalan lingkungan :



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.15. Ilustrasi Jaringan Jalan Lingkungan

3. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Komponen penyediaan air minum yang meliputi sebagai berikut :

1. Akses Aman Air Minum

Syarat kesehatan air minum sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan antara lain :

- a. Persyaratan fisika: sifat fisik air seperti bau, warna, kandungan zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu.

- b. Persyaratan mikrobiologis: kandungan bakteri dalam air yaitu bakteri E-Coli dan bakteri koliform.
- c. Persyaratan kimiawi: kandungan mineral dalam air seperti arsen, fluorida, sianida, khlorin, alumunium, mangan dan mineral lainnya.

2. Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) maupun Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

a. SPAM

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Komponen SPAM yang meliputi sebagai berikut :

- a) Unit air baku dengan kapasitas Rencana 130% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen mata air, air tanah, air permukaan (sungai, danau, laut), air hujan dan pipa transmisi air baku dari sumber air baku ke Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA).
- b) Unit produksi dengan kapasitas rencana 120% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen Bangunan Penangkap Mata Air, Bangunan Pengambilan Air Baku dari Air Tanah (Sumur), Bangunan Saringan Pasir Lambat, Instalasi Pengolahan Air Minum dan Pipa transmisi air minum dari IPA ke reservoir.

- c) Unit distribusi dengan kapasitas rencana 115% - 300% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen Reservoir (penampungan air sementara sebelum didistribusikan) dan Pipa distribusi dari reservoir ke unit pelayanan.
- d) Unit pelayanan dengan komponen sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Gambar 2.16 mengenai ilustrasi sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan adalah sebagai berikut :



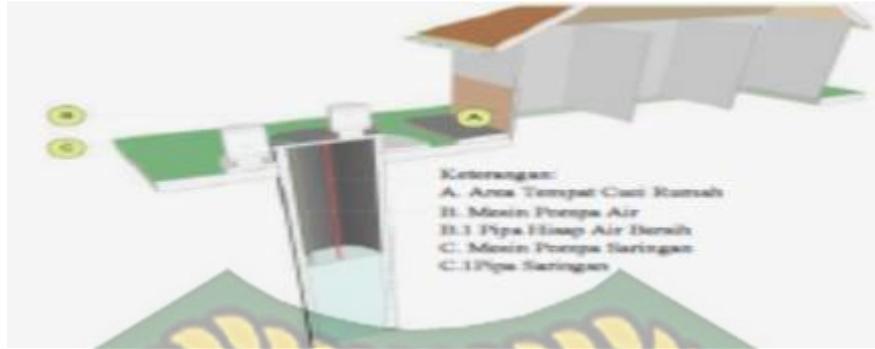
Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.16. Ilustrasi Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

b. SPAM BJP

SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. SPAM BJP meliputi :

- a) Sumur dangkal dan/atau Sumur Dalam



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.17. Ilustrasi Sumur Dangkal dan/atau Sumur Dalam

- b) Penampungan Air Hujan (PAH)
- c) Perlindungan Mata Air (PMA)
- d) Saringan Rumah Tangga (Sarut)
- e) Destilator Surya Atap Kaca
- f) IPA sederhana
- g) Terminal Air (mobil tangki / tangki air)

3. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

Penyediaan jaringan drainase adalah untuk mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang disebut genangan adalah terendamnya suatu kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun). Komponen drainase lingkungan yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Sistem Drainase yang terbentuk
 - a. Sistem drainase utama adalah jaringan saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkap yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat. pengelolaan/pengendalian banjir merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota.

- b. Sistem sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

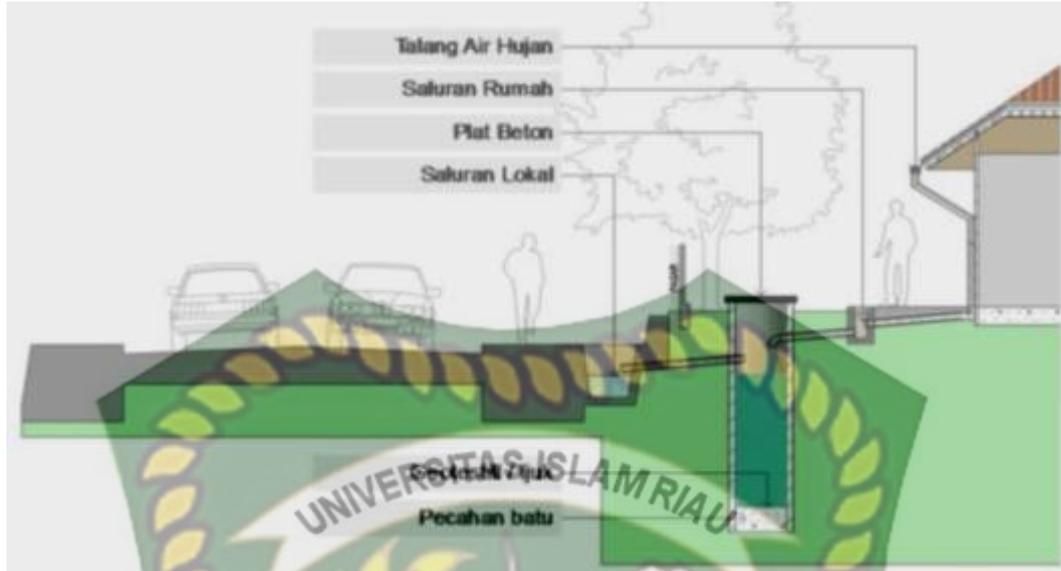
Gambar 2.18. Ilustrasi Sistem Drainase

2) Sarana Drainase

Sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut. Sarana drainase yang meliputi gorong-gorong, bangunan pertemuan air, bangunan terjunan air, siphon, *street inlet*, pompa dan pintu air

3) Prasarana Drainase

Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Prasarana drainase yang meliputi sumur resapan dan kolam tendon atau kolam retensi.



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.19. Ilustrasi Sumur Resapan

4) Konstruksi Drainase

- a. Saluran pemasangan batu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas, dan mempunyai kemiringan yang curam.
- b. Saluran beton: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai topografi, yang terlalu miring atauterlalu datar, serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.
- c. Saluran dengan perkuatan kayu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyaai tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) dan selalu terjadi pergeseran (tanah bergerak).

4. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Komponen pengelolaan air limbah yang meliputi sebagai berikut :

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) adalah sistem pengelolaan air limbah sistem secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.20. Ilustrasi Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat

- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) adalah sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air Air limbah limbah setempat.



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.21. Ilustrasi Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat

2) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

- a. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terpusat

- a) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah Unit Pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah yang meliputi Kloset leher angsa dan kamar mandi dan MCK umum.
 - b) Unit pengolahan menjadi tanggung jawab pemilik rumah yang meliputi sambungan rumah dan lubang inspeksi.
 - c) Unit Pengumpulan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah yang meliputi pipa retikulasi, pipa induk, dan bangunan pelengkap.
 - d) Unit Pengolahan menjadi tanggung jawab pengembang/ pemerintah, baik IPAL Komunal ataupun IPAL Kota yang meliputi fasilitas utama IPAL, fasilitas pendukung IPAL dan zona penyangga.
 - e) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah yang meliputi sarana pembuangan efluen, sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Setempat
- a) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah Unit Pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah yang meliputi kloset leher angsa dan kamar mandi dan MCK umum.
 - b) Unit pengolahan menjadi tanggung jawab pemilik rumah yang meliputi cubluk, tangki septic dengan sistem resapanm biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi
 - c) Unit Pengumpulan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah yang meliputi truk tinja dan motor roda tiga pengangkut tinja.

d) Unit Pengolahan menjadi tanggung jawab pengembang/ pemerintah, baik IPAL Komunal ataupun IPAL Kota yang meliputi fasilitas utama IPAL, fasilitas pendukung IPAL dan zona penyangga.

f) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah yang meliputi sarana pembuangan efluen, sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.

5. Aspek **Kondisi Pengelolaan Persampahan**

Komponen dari pengelolaan persampahan yang meliputi adalah sebagai berikut :

1) Sistem Pengolahan Sampah yang saling terintegrasi

a. Pemilahan

Sistem pemilahan adalah kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima (5) jenis sampah yang terdiri atas : sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

b. Pengumpulan

Sistem pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

c. Pengangkutan

Sistem pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

d. Pengolahan

Sistem pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

e. Pemrosesan Akhir

Sistem pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Gambar 2.22 mengenai ilustrasi sistem persampahan adalah sebagai berikut :



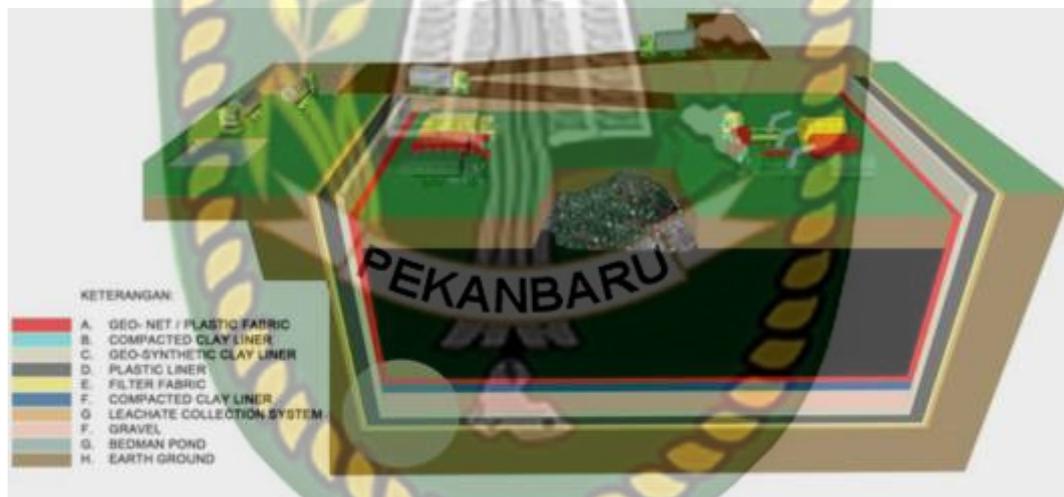
Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.22. Ilustrasi Sistem Pengolahan Persampahan Setempat

2) Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah

- a. Sarana Pemilahan yang meliputi : kantong sampah, bak sampah, dan kontainer sampah.
- b. Sarana dan Prasarana Pengumpulan yang meliputi : gerobak sampah, motor sampah, mobil bak sampah, perahu/sampan sampah, dan tempat penampungan sementara (TPS).

- c. Sarana Pengangkutan yang meliputi : *dump truck, armroll truck, compactor truck, dan trailer truck.*
- d. Prasarana Pengolahan yang meliputi : tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan stasiun peralihan antara (SPA) jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 25 km dari pusat permukiman.
- e. Prasarana Pemrosesan Akhir, adalah TPA dengan sistem *Sanitary Landfill, Controlled Landfill* dan TPA dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Gambar 2.23. mengenai ilustrasi sistem *Sanitary Landfill* adalah sebagai berikut :



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.23. Ilustrasi Sistem *Sanitary Landfill*

6. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Komponen proteksi kebakaran yang meliputi sebagai berikut :

1) Prasarana Proteksi Kebakaran

- a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.24. Ilustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran

- b. Jalan lingkungan yang harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.25. Ilustrasi Jalan Lingkungan yang Dilalui Kendaraan Pemadam Kebakaran

- c. Sarana Komunikasi yang terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran.



Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016

Gambar 2.26. Ilustrasi Sarana Komunikasi pada Pusat Pertokoan

- d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak didalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses.
- 2) Sarana Proteksi Kebakaran yang meliputi : alat pemadam api ringan (APAR), mobil pompa, dan mobil tangga sesuai kebutuhan.

2.2.4.2. Konsep Penanganan Permukiman Kumuh

1. Program Pengadaan Perumahan Baru

Pembangunan perumahan baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Penyediaan infrastruktur, seperti jaringan jalan, saluran sanitasi dan drainase, jaringan air bersih, jaringan listrik.
- b. Penyediaan fasilitas pendukung, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, social masyarakat, serta fasilitas umum lainnya.

- c. Ketersediaan ruang terbuka sebagai fasilitas pendukung bagi kegiatan informal penghuninya, serta sebagai strategi mempertahankan ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.

Program pembangunan perumahan baru dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah (PERUMNAS) maupun pihak swasta. Agar penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai maka pemerintah meneluarkan kebijakan pengedaan perumahan perbandingan 1 kelas mewah : 3 kelas menengah : 6 kelas bawah bagi developer swasta. Kebijakan ini sesuai dengan azas keadilan, pemerataan, dan keterjangkauan.

Selain itu, untuk mendukung kemampuan kepemilikan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah, program ini didukung oleh lembaga perbankan (misalnya BTN) dengan program Kredit Pemilikan Rumah dengan suku bunga lunak. Lembaga perbankan swasta pun saat ini sudah banyak yang ikut aktif mendukung program pembangunan perumahan ini.

2. Program Perbaikan Permukiman

Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai perumahan marginal, tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun penghuninya, sesungguhnya, tidak bersifat pasif terhadap lingkungan perumahannya. Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap tempat tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma. Ada usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu:

- a. Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa pindah rumah juga dapat berupa perubahan atau penambahan terhadaprumahnya. Jadi penghuni secara aktif menimbulkan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau diistilahkan sebagai *housingadjustment* (Moris, 1977).
- b. Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat berbagai kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan perubahan pada dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat pasif atau diistilahkan sebagai *housing adaptation*.

3. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman merupakan suatu pola pembangunan kampung yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Program ini mempunyai prinsip universal yang berlaku dimana-mana yakni memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemamfaat sumberdaya kota guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju. Prinsip dari program perbaikan kampung adalah perbaikan lingkungan kampung-kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan tinggi.

Metode ini berbasis pada investasi yang telah dibuat. Oleh karena itu biaya implementasinya relative lebih murah. Melalui pelaksanaan metode ini, berbagai komponen pokok prasarana / sarana dasar disediakan untuk penduduk kawasan yang bersangkutan. Di Indonesia penerapan teknik ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.

Tujuan dari Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman adalah menyediakan jalan akses, jalan setapak, saluran drainase, saluran pembuangan limbah, air bersih, dan fasilitas – fasilitas sosial seperti sekolah dan puskesmas, untuk melayani penduduk berpendapatan rendah dan menengah.

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman merupakan contoh yang cukup baik dalam memperhatikan pentingnya dukungan lokal dalam implementasinya. Pada mulanya program ini bersifat top-down dalam perancangannya, dimana aparat pemerintah melakukan analisa dan menetapkan suatu solusi. Pada proses selanjutnya, disadari bahwa program ini sebaiknya diorganisir dengan melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan, pembangunan, maupun dalam pemeliharaan fasilitas kawasan. Malahan pembiayaan program disalurkan melalui organisasi yang berbasis masyarakat (*community based organization*). Penduduk menjadi lebih antusias dan mereka juga mau menyumbangkan sejumlah dana bagi pembiayaan program (Choguill, 1994: 111).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 11 negara yang telah melaksanakan proyek/program perbaikan perumahan dan permukiman, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Program perbaikan perumahan dan permukiman relative lebih efektif dalam segi pembiayaan, untuk situasi dimana terdapat pemerintah akan perumahan dan sarana/prasarana pelayanan yang tinggi.
- b. Proses pelaksanaan program relative mudah dan sederhana, sehingga pelaksanaan program relative lebih cepat.

- c. Implementasi komponen – komponen untuk memperbaiki status lahan harus dilakukan secara seksama sehingga dapat meningkatkan rasa aman bagi pemiliknya.
- d. Mobilitas penduduk/tumah tangga relative meningkat.
- e. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting bagi berhasilnya pelaksanaan program perbaikan perumahan dan permukiman ini, meskipun demikian pengawasan terhadap pencapaian sasaran / harapan program penting untuk diperhatikan.

Menurut Direktorat Cipta Karya, Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman,(1998). Ciri-ciri kondisi kawasan yang dapat diterapkan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman:

- a. Berada pada kawasan legal dan sesuai dengan RTR.
- b. Tingkat kepadatan tinggi, tetapi masih dalam batas kewajaran
- c. Kualitas PSDPU langka dan terbatas.
- d. Belum perlu tindakan penataan menyeluruh dan resettlement.
- e. Dampak permasalahan bersifat lokal.

Bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman berdasarkan Pekerjaan Umum dan Cipta Karya, terdapat beberapa bentuk usaha pelaksanaan perbaikan permukiman, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemugaran rumah, diartikan pengembalian keadaan fisik seperti semula.
- b. Program Perbaikan Kampung (KIP); KIP merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghijauan masyarakat melalui perbaikan lingkungan secara fisik.Tujuan utamanya adalah perbaikan kesehatan lingkungan kampung. Komponen dasarnya adalah perbaikan

- infrastruktur kawasan seperti jalan kendaraan, jalan setapak, saluran drainase, MCK dan sebagainya. Perbaikan lingkungan kawasan pasar (MIP);
- c. Perbaikan lingkungan kawasan pasar adalah perbaikan permukiman disekitar pasar, yang dilakukan sebagai akibat dari tambahan beban yang diterima masyarakat sekitar pasar karena tidak memiliki sarana pendukung seperti saluran drainase, tempat parkir, tempat sampah, los-los yang tidak teratur serta tidak memenuhi syarat/kurang berfungsi. Pasar dan masyarakat pasar adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan baik yang positif maupun negatif.
- d. Pembangunan perumahan merupakan salah satu bentuk peremajaan kota dengan cara membangun perumahan melalui penataan kampung kumuh secara fisik agar dapat menampung lebih banyak penghuni atau pihak lain yang membutuhkan. Keuntungan dari program ini adalah relatif cepat dan segera terlihat hasilnya.
- e. Konsolidasi lahan merupakan kegiatan terpadu untuk menata kembali pola kepemilikan tanah di suatu wilayah yang kurang/tidak teratur.
- f. Pembangunan rumah susun; membangun lingkungan hunian secara keseluruhan dengan tujuan untuk menata kembali suatu kawasan kota, baik secara fisik maupun fungsional dan keuntungan ekonomisnya.

4. Program Peremajaan Kota

Pada kondisi tertentu KIP tidak dapat diterapkan secara efektif dan efisien karena tingginya kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas lingkungan. Pada kondisi ini harus diterapkan program peremajaan kota sebagai usaha perbaikan

kualitas lingkungan. Pada program ini dilakukan pengaturan kembali struktur kota yang tidak sesuai.

Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki meningkatkan potensi yang sudah ada dan menimbulkan potensi yang baru, khususnya yang terkait dengan aspek ekonomi. Karena besarnya perubahan fisik yang mungkin dilakukan pada program ini, tidak jarang sebagian penghuni harus dipindahkan sementara dari lokasi asalnya. Selanjutnya pengembalian penghuni merupakan aktifitas dengan prioritas pertama yang harus segera dilakukan setelah program ini selesai. Program ini biasanya dilakukan pada zona-zona dengan potensi tinggi atau dengan kemungkinan pengembangan potensi yang besar, yang dinilai belum dieksplorasi secara maksimal. Pada dasarnya program ini dilakukan dengan pendanaan sendiri. Sasaran kegiatan ini adalah peremajaan sarana prasarana yang bersifat strategis, yang biasanya berupa :

- a. Prasarana dan sarana dengan kualitas yang rendah, yang tidak layak difungsikan sesuai peruntukannya
- b. Prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kawasan yang mempunyai potensi ekonomi regional atau nasional dan atau prasarana dan sarana ekonomi yang bersekala regional dan nasional, seperti bandar udara, pelabuhan laut, terminal sekala propinsi, pasar regional dan sebagainya.
- c. Prasarana dan sarana dikawasan-kawasan yang seringkali mengalami bencana seperti banjir, gempa, kebakaran dan lain sebagainya Prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kawasan yang mempunyai kekhususan, seperti kawasan kota lama, bersejarah, agropolitan, DPP dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwa “Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman meliputi upaya melalui perbaikan atau pemugaran, peremajaan serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan”.

Peremajaan itu sendiri diartikan sebagai “upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perombakan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh” terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni tersebut. Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan:

- a. Secara bertahap dan sering kali mengakibatkan perubahan yang mendasar,
- b. Bersifat menyeluruh dalam suatu kawasan permukiman yang sangat tidak layak huni, yang secara fisik sering tidak sesuai lagi dengan fungsi kawasan semula.
- c. Difokuskan pada upaya penataan menyeluruh terhadap seluruh kawasan hunian kumuh, rehabilitasi dan atau penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang menunjang fungsi kawasan ini sebagai daerah hunian yang layak.
- d. Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya.

Dengan demikian, peremajaan merupakan salah satu bentuk bantuan program yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas permukiman. Dalam perjalanan pelaksanaannya, program peremajaan telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, baik dalam mekanisme pelaksanaan, cakupan program bahkan dalam pendekatan dasarnya.

Peremajaan Kota di lihat dari 3 (tiga) aspek adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu **“Proses”** dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pengembangan kembali suatu atau beberapa bagian wilayah kota sebagai konsekuensinya dari pengembangan Kota.
- b. Sebagai suatu **“Fungsi”** merupakan suatu kegiatan yang memfungsikan suatu bagian atau beberapa bagian wilayah kota sehingga vitalitasnya secara social, ekonomi, maupun fisik meningkat.
- c. Sebagai suatu **“Perencanaan”** dapat diartikan sebagai suatu bagian dari suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan kota yang terkoordinir.

Pengembangan kota sendiri meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu :

- a. Intensifikasi Kota, Usaha intensifikasi perkotaan dalam hal ini meliputi usaha-usaha untuk meningkatkan kapasitas dan intensitas pelayanan kota.
- b. Ekstensifikasi Kota, Dalam usaha ekstensifikasi dilakukan dengan cara memperluas ruang serta membuka wilayah baru pada wilayah kantong (*enclave*) atau pinggiran kota yang belum berkembang dan masih kosong.
- c. Pengembangan Kota Baru, Pembangunan kota baru adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan cara membangun kota-kota baru baik di dalam wilayah kota itu sendiri sebagai kotabaru atau di luar wilayah kota itu yang tidak terlalu jauh sebagai fungsi kota satelit. Berbagai cara tersebut dapat ditempuh sesuai dengan kebutuhan serta ketersediaan sumberdaya yang memungkinkan.

Pengertian peremajaan kota yang lain, seperti dikutip oleh (Dritasto, 1998:68-69) dari Mochtarram, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Grebler; peremajaan kota adalah usaha perubahan lingkungan perkotaan yang disesuaikan dengan rencana dan perubahan tersebut

dilakukan secara besar-besaran untuk dapat memenuhi tuntutan baru kehidupan di kota.

- b. Menurut Parry Lewis; permukiman kota adalah pembongkaran secara besar-besaran dari bangunan yang pada umumnya sudah tua agar terdapat lahan kosong yang cukup besar sehingga dapat direncanakan dan dibangun kelompok bangunan baru, jalan dan ruang terbuka.
- c. Menurut Weimer dan Hoyt; permukiman kota adalah meliputi usaha-usaha rehabilitasi untuk memperbaiki struktur di bawah standar sehingga memenuhi standar yang seharusnya; konservasi adalah menyangkut rehabilitasi dan pemeliharaan dengan maksud meningkatkan mutu suatu daerah; redevelopment yaitu pembongkaran, pembersihan dan pembangunan kembali suatu daerah.

Dari batasan serta pemahaman tentang dasar penanganan permukiman permukiman tersebut di atas, diperoleh prinsip-prinsip permukiman yang harus mendasari seluruh konsepsi permukiman kumuh, adalah:

- a. Penanganan terpadu Multi-sektor, Penanganan permukiman kumuh dilandasi unsur keterpaduan antar sektor terkait secara komprehensif. Proses pembangunannya bersifat multi year dan menyeluruh, sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing yang terlibat (Pemerintah, swasta, masyarakat).
- b. Bertumpu pada masyarakat, Menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sehingga terdapat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, meliputi: aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek pemanfaatan dan pemeliharaan. Perumahan harus dilaksanakan dengan pola

Tridaya yang dalam prosesnya saling mendukung satu dengan yang lain yaitu Bina Peningkatan Usaha Ekonomi, Bina Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Bina Pengembangan Fisik Lingkungan

- c. Pembangunan berkelanjutan, Peremajaan permukiman kumuh harus dapat berkelanjutan. Beberapa prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan antara lain harus di dasarkan atas kebutuhan (*needs assesment*), penetapan keadaan awal yang harus dimiliki, keadaan akhir yang akan dicapai serta dampak sosial budaya, dampak lingkungan (alamiah), kesepakatan institusional untuk melaksanakan program pembangunan, penggunaan teknologi tepat guna, dan kemudahan replikasi.
- d. Membangun tanpa mengusir dengan preservasi sosial-ekonomi, Proses peremajaan diharapkan tidak mengusir masyarakat baik secara langsung (*displacement*) maupun secara tidak langsung atau bertahap (*gentrification process*). preservasi sosial ekonomi dimaksudkan untuk membantu masyarakat menggali dan mengenali bakat, potensi, kemampuan, kelebihan yang sudah atau mungkin belum terlihat secara jelas, lalu mengkomodasikan ke dalam bentuk-bentuk bina usaha dan bina manusia yang didukung oleh bina fisik.
- e. Efisiensi dalam Redistribusi lahan, Peremajaan dapat menjadi mekanisme redistribusi lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memungkinkan pencadangan lahan bagi kepentingan penggalan sumber pembiayaan pembangunan. Peremajaan berarti suatu upaya mengintervensi kegagalan mekanisme pasar lahan perkotaan. Apabila hak atas lahan berhasil diakses masyarakat, maka konsep-konsep besar seperti self help (swadaya),

enabling (memampukan) dalam pembangunan masyarakat miskin akan terakselerasi dengan sendirinya.

- f. Public-Private Partnership (Kemitraan), Interaksi antar pelaku pembangunan yang terjadi adalah interaksi antara pihak yang setara, meskipun berbeda fungsi, sehingga terbentuk kerabat kerja pembangunan. Tujuannya adalah penggalangan semaksimal mungkin peran dan fungsi para pelaku yang terlibat.

Peremajaan kota ini dibagi menjadi 3 (tiga) adalah :

1) Urban Renewal

Urban Renewal adalah Upaya perawatan kembali suatu wilayah dengan mengganti sebagian atau seluruh unsur-unsur lama dengan unsur-unsur baru dengan tujuan untuk meningkatkan vitalitas dan kualitas lingkungan sehingga kawasan tersebut memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kota secara keseluruhan. (Undang-Undang No 24 Tahun 1992).

Urban Renewal adalah Upaya penataan kembali suatu kawasan tertentu di dalam kota dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih memadai bagi kawasan tersebut sesuai dengan potensi nilai ekonomi yang dimiliki oleh lahan kawasan tersebut. Penyebab penurunan kualitas lingkungan antara lain:

- a. Tata letak lingkungan fisik secara keseluruhan tidak memungkinkan lagi dikembangkan/tidak sesuai lagi untuk menampung jenis kegiatan baru.
- b. Tingkat pencapaian yang buruk serta tidak menguntungkan, ruang parkir minim yang menyebabkan kemacetan, organisasi ruang serta hubungan fungsional yang buruk dsb.

- c. Kondisi bangunan/gedung sudah sangat buruk sehingga tidak layak pakai, tidak dapat melayani fungsinya dengan baik, tidak sehat serta tidak aman.
- d. Peruntukan lahan tidak sesuai lagi dengan status kawasan tersebut dalam konteks tata kota.

Suatu Pembaharuan kota yang menyangkut keseluruhan kehidupan kota, manusianya (sosial, budaya), tata kehidupannya (perekonomian) dan lingkungan hidupnya (lingkungan Fisik Kota) dan fungsi Kegiatannya (kehidupan dan kegiatan usaha) biasa juga disebut atau diartikan sebagai Overall Urban Development atau pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Adapun tujuan urban renewal adalah:

- a. Ekonomi : pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi dan nilai yang tinggi.
- b. Sosial : Memberi wadah bagi berlangsungnya interaksi sosial yang lebih baik.
- c. Budaya : Memberi wadah bagi berlangsungnya transformasi budaya secara luas.
- d. Fisik : Menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan menarik.

Pendekatan urban renewal adalah Perkembangan Sosial Kultural Masyarakat, Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada, Perkembangan Mutu Ekosistem, Pengembangan Mutu Fasilitas dan Sustainable Development. konsep urban renewal adalah sebagai berikut :

- a. Urban Catalysts, Suatu Konsep pembentukan fisik kota dari bangunan atau elemen yang lebih kecil hingga suatu peremajaan lingkungan yang merupakan katalisator bagi terbentuknya proses peningkatan atau pengembangan kualitas ruang kota
- b. Zona Pengembangan Terpadu, Suatu Konsep yang berusaha mengintegrasikan proses pembangunan kota yang mendukung secara konkret

skenario dan arah pembangunan kota berupa Penanganan Pengelolaan Pembangunan dan Operasional Pasca Huni untuk mencapai tujuan Pembangunan Kota yang Komprehensif dan terintegrasi

- c. Peremajaan Lingkungan Kota, Suatu Konsep dan strategi pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mengantisipasi proses ekologi perubahan keruangan.

Ada 3 (tiga) Unsur yang menentukan urban renewal adalah Pelaku Pembangunan / Stake Holder, Sumber daya : Lahan dan Modal dan Teknologi.

2) Urban Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002)

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut: Intervensi fisik Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban realm). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang. Revitalisasi terdiri dari :

a. Rehabilitasi ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

b. Revitalisasi sosial/institusional

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (public realms).

Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

c. Revitalisasi Kawasan Kota Lama, Bukan Sekedar ‘*Beautifcation*’

Revitalisasi termasuk di dalamnya adalah konservasi-preservasi merupakan bagian dari upaya perancangan kota untuk mempertahankan warisan fisik budaya masa lampau yang memiliki nilai sejarah dan estetika-arsitektural. Atau tepatnya merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap pada kondisi aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakan tergantung dari kondisi lingkungan binaan yang akan dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi.

Upaya ini sebetulnya lebih ditujukan untuk kawasan-kawasan pusat kota tua (down town), di mana pada kawasan tersebut dimasa kejayaannya merupakan kawasan yang di rancang dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat memberikan identitas/karakter/citra yang unik yang dapat memberikan khasana struktur visual kota. Menurut Kevin Lynch (1960), obyek-obyek tersebut dapat berupa landmark, node (titik pertemuan) utama atau focal point dalam kawasan. Wacana tentang preservasi sudah ada ketika munculnya paham ‘new urbanism’ bermisi revitalisasi bagian kota untuk mengembalikan identitas kota ke wajah kota semula. Upaya ini diyakini akan memberikan kontribusi berupa PAD yang besar bagi kota, jika dikelola dengan baik serta memperhatikan aspek ekonomi, serta keuntungan budaya yang meliputi sumber-sumber sejarah yang memberikan nilai tambah bagi kebudayaan/estetika kota.

Di beberapa kota di Amerika telah membuktikan bahwa 'historic preservation' dapat menjadi katalisator (pendorong) untuk meremajakan kembali seluruh lingkungan. Pada kawasan sejarah Beacon Hill, Boston yang merupakan kawasan perumahan, nilai propertynya meningkat menjadi 3 kali lipat antara tahun 1955 dan tahun 1962. Di kota Vieux Corre, New Orleans, turis berdatangan ke kawasan tersebut khusus untuk melihat kenangan sejarah, sehingga meningkatkan pendapatan kota \$ 150 juta per tahun dan menjadikan kota konvensi utama. (Roaddewing, 1983).

d. Revitalisasi Ruang Terbuka

Ruang terbuka menyangkut semua landscape, elemen keras (hardscape) yang meliputi jalan, pedestrian, taman-taman dan ruang rekreasi di lingkungan perkotaan (Shirvani, 1985). Sedangkan Prinz (1980) menyatakan ruang terbuka merupakan pembentuk struktur dasar sketsa sebuah kota. Ruang terbuka dapat berupa tempat-tempat di tengah kota, jalan-jalan, tempat-tempat belanja (mall) dan taman-taman kecil. Simpulan yang bisa ditarik dari beberapa pengertian ruang terbuka (openspace) adalah ruang yang terbentuk, berupa softscape dan hardscape, dengan kepemilikan privat maupun publik untuk melakukan aktivitas bersama (komunal) dalam konteks perkotaan.

Secara garis besar, tipologi ruang terbuka adalah park (taman), square (lapangan), waterfront (area yang berbatasan air), street (jalan) dan lost space. Ruang publik merupakan suatu lokasi yang didesain (walau hanya minimal) dimana siapa saja mempunyai hak untuk dapat mengaksesnya, interaksi diantara individu didalamnya tidak terencana dan tanpa kecuali dan tingkah laku para pelaku didalamnya merupakan subyek tidak lain dari norma sosial kemasyarakatan.

Sebuah ruang publik/ruang terbuka dapat dikatakan dapat berfungsi secara optimal ketika bisa memenuhi aspek/kaidah seperti etika (kesusilaan), fungsional (kebenaran) dan estetika/keindahan (Jokomono, 2004).

Aspek etika mengandung pengertian tentang bagaimana sebuah ruang publik dapat 'diterima' keberadaannya dan citra positif seperti apa yang ingin dimunculkan yang senantiasa melekat dengan keberadaan ruang publik tersebut. Aspek fungsional setidaknya terdapat tiga faktor yang terkandung, yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Faktor sosial merupakan syarat utama menghidupkan ruang publik, terdapat orang berkumpul dan terjadi interaksi. Selain sosial juga terdapat faktor lingkungan dimana lingkungan yang nyaman mampu menjadi daya tarik bagi orang untuk masuk didalamnya. Sedangkan aspek estetika ruang publik terdapat tiga tingkatan, estetika formal, fenomenologi/ pengalaman dan estetika ekologi. Estetika formal merupakan estetika dimana obyek keindahan memiliki jarak dengan subyek. Estetika pengalaman dimana obyek dinikmati dengan partisipasi atau interaksi dan estetika ekologi, obyek keindahan dinikmati melalui proses partisipasi dan adaptasi yang memungkinkan kita berkreasi terhadap ruang tersebut.

3) Urban Design

Pengertian urban design menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Robert M. Beckley, (1979) Urban Design adalah suatu jembatan antara profesi perencanaan kota dan arsitektur. Perhatian utama Urban Design adalah pada bentuk fisik kota.
- b. Minaret Branch (1995) Di dalam perencanaan kota komprehensif, perancangan kota memiliki suatu makna yang khusus, yang membedakannya

dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Perancangan kota berkaitan dengan tanggapan inderawi manusia terhadap lingkungan fisik kota: penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial”

- c. Harry Anthony (dalam buku Antoniades, 1986) memberi pengertian bahwa perancangan kota merupakan pengaturan unsur-unsur fisik lingkungan kota sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi baik, ekonomis untuk dibangun, dan memberi kenyamanan untuk dilihat dan untuk hidup di dalamnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik beberapa “kata kunci” tentang Urban Design, yaitu:

- a. Jembatan antara profesi perencanaan kota dan arsitektur.
- b. Pengaturan unsur fisik lingkungan kota.
- c. Berkaitan dengan tanggapan inderawi, yaitu aspek estetika/keindahan, penampilan visual.

Menurut Robert M. Beckley, (1979), ideologi Urban Design yaitu: Perhatian pada pengaturan estetis dari kota, Perhatian pada suatu lingkungan sosial yang ideal dan Lingkungan sosial yang ideal yang di ekspresikan melalui suatu lingkungan fisik yang ideal.

Spreiregen, Paul D., (1965) tujuan perancangan kota antara lain: 1) membuat kota lebih manusiawi; 2) menghubungkan bentuk fisik kota dengan keadaan alam, misal orientasi; 3) menselaraskan urban dengan alam; 4) menciptakan ruang-ruang kota yang berkualitas; 5) menjadikan kota sebagai suatu pelabuhan keanekaragaman.

Usulan Ebnezer Howard tentang Konsep Garden City adalah sebagai jawaban atas menurunnya dengan cepat kondisi lingkungan kota-kota akhir abad ke-19 yang

menurutnya tumbuh menjadi besar sekali, akibat dari Industrialisasi yang telah menarik banyak penduduk masuk ke dalam kota, dengan daya tarik upah lebih baik, kesempatan kerja dan aktivitas sosial. Akibatnya kota penuh sesak, permukiman kumuh, polusi industri, persediaan air dan drainase tidak memadai, sewa dan harga-harga barang melambung tinggi. Howard mengusulkan pembangunan yang lebih besar, kota-kota taman sekitar pusat kota. Semua terhubung dan berbagi pelayanan/fasilitas hiburan. Gagasan ini menuntut pembentukan kota-kota suburban baru, yang direncanakan dalam ukuran terbatas, dikelilingi sabuk hijau berupa tanah pertanian. Kota-kota ini akan tumbuh secara mandiri, dikelola dan dibiayai warga kota yang punya kepentingan ekonomi di sana. Dengan memerlukan tanah seluas 6.000 acre (1 acre = 4540 m²) dengan 1.000 acre dibangun untuk 32.000 penduduk (kepadatan 30 orang/acre) dan tambahan 2.000 orang di sekitar 5.000 acre tanah pertanian. Kota ini juga memiliki boulevard melingkar selebar 120 feet (36,6 meter), ditanami pepohonan, yang membagi kota dalam enam sektor. Konsep tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembangunan banyak kota-kota baru di Inggris dan di bagian-bagian dunia lainnya dari awal sampai pertengahan abad ke-20.

5. Program PLP2K-BK

Tujuan PLP2K-BK adalah meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan tridaya. serta mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni.

Sasarannya adalah terlaksananya penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota. Tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Serta terwujudnya masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta memeliharanya. Adapun kriteria-kriteria program PLP2K-BK adalah sebagai berikut :

- 1) Kriteria Umum
 - a) Berada pada peruntukan perumahan dalam RTRW kota/kabupaten;
 - b) Kepadatan penduduk > 400 jiwa/hektar untuk kota kecil, > 500 jiwa/hektar untuk kota besar dan sedang, dan > 750 jiwa/hektar untuk kota metropolitan;
 - c) Rumah tidak layak huni sebanyak > 60%;
 - d) Angka penyakit akibat buruknya lingkungan permukiman cukup tinggi (demam berdarah, diare, ISPA, dan lain-lain) yang cukup tinggi;
 - e) Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi, misalnya (urban crime, keresahan serta kesenjangan yang tajam, dan lain-lain)
 - f) Ketersediaan PSU di bawah standar pelayanan minimal;
 - g) Rawan bencana, misalnya banjir, tanah longsor dan kebakaran.
- 2) Kriteria Wajib
 - a) lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh mengelompok, dengan luasan yang mampu menciptakan interaksi dengan sistem perkotaan;
 - b) ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan dan program penanganan lingkungan permukiman kumuh;

c) teralokasinya APBD baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk sinergi kegiatan dan keberlanjutan penanganan ke depan sesuai dengan hasil Rencana PLP2K-BK dan Rencana Tindak Komunitas.

3) Kriteria Kompetitif

- a) Partisipasi masyarakat;
- b) Intensitas kekumuhan;
- c) Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan;
- d) Proporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai identifikasi kawasan kumuh telah dilakukan oleh (Heryati, 2008) yang menjelaskan bahwa metode penetapan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan metode analisis komprehensif dimana penilaian dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria. Dari hasil pembobotan selanjutnya dilakukan kategorisasi berdasarkan tingkat kekumuhan. Kemudian dari tingkat kekumuhan dilakukan penanganan berdasarkan karakteristik kawasan kumuh yang ditemukan. Hasil penelitian ini menampilkan 3 klasifikasi kekumuhan yaitu kekumuhan tingkat berat, sedang dan ringan. Klasifikasi tingkat kekumuhan didapatkan dari faktor pendidikan, ekonomi dan sarana prasarana.

Penelitian untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan telah dilakukan oleh Ilmy, (2016) yang menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dalam analisisnya, yaitu menentukan bobot prioritas kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap kekumuhan. Parameter yang digunakan dalam menentukan kawasan kumuh berdasarkan indikator kementerian

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah Kriteria-kriteria yang sangat berpengaruh dalam penentuan identifikasi kawasan permukiman kumuh di wilayah penelitian adalah kriteria sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, cakupan pelayanan jalan lingkungan dan ketidaktersediaan drainase. Serta menampilkan 3 klasifikasi kekumuhan yaitu kumuh tinggi, sedang dan ringan.

Penelitian mengenai Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai telah dilakukan oleh Donata Edsadova, Haryani dan Ezra Aditia yang menggunakan metode *scoring* (pembobotan). Hasil penilaian menunjukkan bahwa di Kawasan Studi memiliki kategori tipologi kekumuhan sedang. Berdasarkan kategori tingkat kekumuhan tersebut, penanganan yang akan dilakukan akan di buat menjadi dua proses penanganan yang akan dilakukan pada kawasan studi yaitu bentuk penanganan permukiman kembali di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah ilegal dengan skema pembangunan Rumah Susun Sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan yang terdampak bersedia menjual bangunanya dengan harga murah dan sipemilik bangunan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa dengan harga murah dan bentuk penanganan peremajaan di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah legal melalui Program Perbaikan Kampung.

Penelitian mengenai Identifikasi Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Jambi telah dilakukan oleh May Istikasari dan Parfi khadiyanto yang menggunakan

metode analisis kuantitatif, analisis deskriptif dan analisis visual. Hasil penelitian bahwa Kawasan pemukiman kumuh di Kecamatan Pasar Jambi yang berlokasi di Kelurahan Sungai Asam dan Kelurahan Beringin dengan tingkat kekumuhan sedang, dan Kelurahan Orang Kayo Hitam dengan tingkat kekumuhan yang tinggi. Kawasan permukiman kumuh tersebut di karenakan Kawasan tersebut sering tergenang banjir bila musim penghujan dan kualitas lingkungan yang rendah akibat buruknya kondisi bangunan dan jarak bangunan yang sangat rapat, serta kondisi prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah dan kondisi persampahan yang buruk. Sehingga kualitas lingkungan permukiman di Kawasan tersebut menjadi menurun dan menyebabkan munculnya permukiman kumuh yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di Kawasan tersebut.

Penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus : Desa Bajo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo) telah dilakukan oleh Dhea M. Damisi, Veronica A. Kumurur dan Rieneke L.E. Sela yang menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitiannya adalah faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo, Kecamatan Talamuta yakni lokasi, kependudukan, kondisi bangunan hunian, kondisi prasarana dan sarana dasar, kondisi sosial ekonomi dan untuk faktor dominan kekumuhan yakni kondisi prasarana sarana dasar dan kondisi bangunan hunian.

Penelitian mengenai Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kotamobagu Timur telah dilakukan oleh Suci Wiarni , Windy Mononimbar dan Suryadi Supardjo yang menggunakan metode analisis *scoring* dan

analisis deskriptif untuk menghasilkan penilaian tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur. Hasil penelitiannya adalah dari 7 kriteria kondisi fisik didalamnya yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran pada lokasi penelitian dikategorikan menjadi kumuh ringan.

Penelitian mengenai Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung telah dilakukan oleh Gerald Mingki, Veronica Kumurur dan Esli Takumansang yang menggunakan metode analisis deskriptif dan *scoring* atau pembobotan. Hasil penelitiannya adalah daerah Kelurahan Tanjung Merah memiliki tingkat kekumuhan sedang, dengan aspek drainase dan sampah memperoleh bobot yang tinggi.



No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Heryati	Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen Fisik (Kepadatan Penduduk, kondisi rumah, kepadatan bangunan, jumlah penghuni, sirkulasi udara) - Komponen sarana dan prasarana (air bersih, MCK, persampahan, drainase, jalan lingkungan) - Komponen rawan terhadap bencana (banjir dan tanah longsor) 	Metode Analisis Komprehensif yaitu metode kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian ini menampilkan 3 klasifikasi kekumuhan yaitu kekumuhan tingkat berat, sedang dan ringan. Klasifikasi tingkat kekumuhan didapatkan dari faktor pendidikan, ekonomi dan sarana prasarana.
2.	Hafsah Fatihul Ilmy dan Yanto Budisusanto	Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)		<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Bangunan Gedung - Kondisi Jalan Lingkungan - Kondisi Penyedia Air Minum - Kondisi Drainase Lingkungan - Kondisi Pengelolaan Limbah - Kondisi Pengelola Persampahan - Kondisi Proteksi Kebakaran 	Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)	Kriteria-kriteria yang sangat berpengaruh dalam penentuan identifikasi kawasan permukiman kumuh di wilayah penelitian adalah kriteria sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, cakupan pelayanan jalan lingkungan dan ketidaktersediaan drainase. Serta menampilkan 3 klasifikasi kekumuhan yaitu kumuh tinggi, sedang dan ringan

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
3.	Donata Edsadova, Ir. Haryani, dan Ezra Aditia.	Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai.	Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Bangunan Gedung - Kondisi Jalan Lingkungan - Kondisi Penyedia Air Minum - Kondisi Drainase Lingkungan - Kondisi Pengelolaan Limbah - Kondisi Pengelola Persampahan - Kondisi Proteksi Kebakaran 	Metode Scoring (Pembobotan)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa di Kawasan Studi memiliki kategori tipologi kekumuhan sedang. Berdasarkan kategori tingkat kekumuhan tersebut, penanganan yang akan dilakukan akan di buat menjadi dua proses penanganan yang akan dilakukan pada kawasan studi yaitu bentuk penanganan permukiman kembali di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah illegal dengan skema pembangunan Rumah Susun Sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan yang terdampak bersedia menjual bangunanya dengan harga murah dan sipemilik bangunan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa dengan harga murah dan bentuk penanganan peremajaan di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah legal melalui Program Perbaikan Kampung.
4.	May Istikasari dan Parfi khadiyanto	Identifikasi Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam dan Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> - Vasilitas Non Ekonomi - Vasilitas Ekonomi - Status Tanah - Sarana Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kuantitatif - Analisis Deskriptif - Analisis Visual 	Hasil penelitian bahwa Kawasan pemukiman kumuh di Kecamatan Pasar Jambi yang berklasi di kelurahan Sungai Asam dan Kelurahan Beringin dengan tingkat kekumuhan sedang, dan kelurahan Orang Kayo Hitam dengan tingkat kekumuhan yang tinggi Kawasan permukiman permukiman kumuh tersebut di karenakan Kawasan tersebut sering tergenang banjir bila musim penghujan dan kualitas lingkungan yang rendah akibat buruknya kondisi bangunan dan jarak bangunan yang sangat rapat, serta kondisi prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah dan kondisi persampahan yang buruk. Sehingga kualitas lingkungan permukiman di Kawasan tersebut menjadi menurun dan menyebabkan munculnya permukiman kumuh yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di Kawasan tersebut.
5.	Dhea M. Damisi, VeronicaA. Kumurur dan Rieneke L.E. Sela	Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus: Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta,	Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Kependudukan - Kondisi Bangunan - Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar - Kondisi Sosial Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Deskriptif - Analisis Skoring 	Hasil penelitiannya adalah faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta yakni lokasi, kependudukan, kondisi bangunan hunian, kondisi prasarana dan sarana dasar, kondisi sosial ekonomi dan untuk faktor dominan kekumuhan yakni kondisi prasarana sarana dasar dan kondisi bangunan hunian.

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
		Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)				
6.	Suci Wiarni , Windy Mononimbar dan Suryadi Supardjo	Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kotamobagu Timur	Kecamatan Kotamobagu Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Bangunan Gedung - Kondisi Jalan Lingkungan - Kondisi Penyedia Air Minum - Kondisi Drainase Lingkungan - Kondisi Pengelolaan Limbah - Kondisi Pengelola Persampahan - Kondisi Proteksi Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis <i>scoring</i> - Analisis deskriptif 	Hasil penelitiannya adalah dari 7 kriteria kondisi fisik didalamnya yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran pada lokasi penelitian dikategorikan menjadi kumuh ringan.
7.	Gerald Mingki, Veronica Kumurur dan Esli Takumansang	Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung	Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Bangunan Gedung - Kondisi Jalan - Kondisi Air Bersih - Kondisi Drainase - Kondisi Sanitasi - Kondisi Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Deskriptif - Analisis <i>Scoring</i> 	Hasil penelitiannya adalah Daerah Kelurahan Tanjung Merah memiliki tingkat kekumuhan sedang, dengan aspek drainase dan sampah memperoleh bobot yang tinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan berlokasi di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu Kelurahan Sungai Pakning yang lokasi permukiman kumuh yang berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/2014. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih tiga (3) bulan dari bulan Desember hingga bulan Februari.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi (Arifin,2012 dalam Hafizah,2017). Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong “ Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,2006 dalam Hafizah,2017). Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mencakup tentang gambaran kondisi fisik wilayah penelitian,

penggunaan lahan wilayah penelitian, kondisi sarana prasarana wilayah penelitian, legalitas tanah dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat wilayah penelitian.

Pada pendekatan kuantitatif penulis lebih banyak menggunakan angka yang diolah melalui rumus yang telah di tentukan untuk memperoleh nilai atau hasil dari penelitian. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampihan hasilnya (Arikunto,2006 dalam Hafizah,2017).

3.3. Teknik Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa metode yang dilakukan untuk mempresentasikan keadaan nyata yang ada dilapangan untuk menunjukkan kecenderungan masa yang akan datang dan melakukan kajian terhadap keadaan permukiman kumuh yang akan dilakukan. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dan survei dapat diwujudkan dalam bentuk foto, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang bermukim dalam wilayah objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis. Selain itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:

- a. RTRW dan RPJMD Kabupaten Bengkalis diperoleh dari Dinas BAPPEDA Kabupaten Bengkalis.
- b. Profil Kecamatan diperoleh dari Kantor Camat Bukit Batu.
- c. Profil Kelurahan diperoleh dari Kantor Kelurahan Sungai Pakning.
- d. Data kondisi bangunan, jalan lingkungan dan drainase diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkalis.
- e. Data proteksi kebakaran diperoleh dari Pos Kebakaran Kecamatan Bukit Batu.

3.4. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, variabel penelitian adalah hal-hal yang akan kita teliti.

Indikator adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebuah indikator tidak selalu menggambarkan keadaan secara keseluruhan tetapi sering kali hanya memberi petunjuk tentang keadaan keseluruhan tersebut.

Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai identifikasi kawasan kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1. Metodologi Penelitian

No	Tujuan	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Sumber Data	
1.	Untuk mengetahui tingkat kekumuhan Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu	Kondisi Fisik	Kondisi Bangunan Gedung	Analisis Kuantitatif dan Analisis Skoring	1. Observasi 2. Wawancara 3. Koesioner 4. Profil Kelurahan	
			Kondisi Jalan Lingkungan			
			Kondisi Penyediaan Air Minum			
			Kondisi Drainase Lingkungan			
			Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
			Kondisi Pengelolaan Persampahan			
			Kondisi Proteksi Kebakaran			
Legalitas Tanah	Status Penguasaan Tanah	Analisis Deskriptif Kualitatif	Koesioner			
Kependudukan	Kepadatan Penduduk					
2.	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu.	Faktor Ekonomi		Pekerjaan Pendapatan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Koesioner
		Faktor Sosial Budaya		Pendidikan Kebiasaan		
		Faktor Lahan	Harga Lahan Keterbatasan Lahan			
		Faktor Psikologis	Kenyamanan			

No	Tujuan	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Sumber Data
3.	Untuk mengetahui arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kecamatan Bukit Batu yang berupa rekomendasi perencanaan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas permukiman yang baik dan sehat.	Penataan permukiman Kumuh	Kondisi Fisik	Analisis Triangulasi	Data Primer Data Sekunder

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 dan Pemikiran, 2019



3.5. Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diperlukan dalam kegiatan penelitian sehingga nantinya dapat diperoleh hasil serta data-data yang lengkap dan akurat. Tahap persiapan ini meliputi :

a. Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran Studi

Penentuan masalah untuk penelitian ini didasarkan pada kondisi yang ada pada saat ini, dan permasalahan perkembangan tersebut perlu dikaji guna memperoleh keadaan perkembangan pada saat ini, sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan perencanaan serta perumusan tujuan diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui perkembangan permasalahan yang ditentukan sebelumnya.

b. Penentuan Lokasi Studi

Lokasi studi yang diangkat dalam studi ini adalah Kelurahan Sungai Pakning, karena kelurahan ini merupakan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu dan juga merupakan lokasi permukiman kumuh yang berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 341/KTPS/2014.

c. Penentuan Kebutuhan Data

Untuk mempermudah pelaksanaan survei serta analisis yang akan dilakukan, diperlukan inventarisasi kebutuhan data maupun informasi yang mendukung penelitian.

d. Pengumpulan Studi Pustaka

Penelitian ini untuk mempermudah dalam pembuatan metodologi serta pemahaman terhadap permasalahan yang diambil.

e. Perumusan Rencana Pelaksanaan Survei

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah diperoleh hasil survei awal yang sifatnya sementara, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang masih kurang, baik melalui observasi lapangan, wawancara kepada beberapa responden yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang diambil.

2. Tahap Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat sebagai berikut :

a. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Utama,2012 dalam Hafizah,2017). Dalam Sugiyono,2012 dalam Hafizah,2017, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan akan menjadi cara pengumpulan data yang baik apabila mengabdikan kepada tujuan penelitian, direncanakan secara sistematis, dicatat dan dihubungkan dengan proporsi-proporsi yang umum, dan dapat dicek dan dikontrol validitas, realibilitas, dan ketelitiannya (Utama,2012 dalam

Hafizah,2017). Hal tersebut dapat membantu peneliti dalam mengamati dan memahami kawasan studi kasus.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan secara in-depth atau wawancara mendalam kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang rinci dan mendalam. Wawancara terstruktur ditujukan kepada stakeholder yang terlibat serta mengetahui tentang kawasan permukiman kumuh. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam hal ini narasumber yang dipilih dapat di lihat pada Tabel 3.2 di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Narasumber dalam Wawancara

No	Skateholder	Narasumber
1.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bengkalis.
2.	Pemerintah Kecamatan Bukit Batu	1. Kantor Kecamatan Bukit Batu (Camat atau Sekretaris). 2. Kantor Kelurahan Sungai Pakning (Lurah atau Sekretaris). 3. Kepala UPTD Kesehatan 4. Kepala UPTD Kebersihan 5. Kepala Cabang PDAM 6. Kepala Pos Pemadam Kebakaran
2.	Tokoh Masyarakat	1. Ketua RW 2. Ketua RT

Sumber : Hasil Analisis, 2019

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang

dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sekaran,2006 dalam Hafizah,2017).

3.6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pada tahapan ini dilakukan untuk mengelola data yang telah diperoleh agar data yang didapat bisa lebih valid. Setelah data terkumpul maka perlu dilakukan pengolahan data sebagai penunjang studi dalam tahap analisis sesuai kebutuhan data. Adapun hal yang dilakukan dalam pengolahan data, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Editing, merupakan tahap awal yang dilakukan dalam rangka pemilahan data yang dibutuhkan.
- b. Koding, merupakan tahap mengklasifikasikan data dalam masing-masing kelompok atau kategori sesuai dengan kebutuhan dalam analisis yaitu dengan pengkodean data agar data lebih mudah dicari.
- c. Tabulasi, merupakan tahap mengelompokkan data untuk mempermudah proses analisis.
- d. Diagramatik, merupakan menampilkan data-data yang diperoleh dalam bentuk grafik atau diagram.
- e. Peta, merupakan sebagai untuk menampilkan batas administrasi, kondisi penggunaan lahan serta sarana prasarana di lokasi penelitian.
- f. Dokumentasi, merupakan salah satu hasil observasi langsung ke lokasi penelitian berupa foto selama kegiatan penelitian.

- g. Klasifikasi, merupakan data yang dipilih berdasarkan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan atau tahapan pemisahan data berdasarkan analisis yang akan dilaksanakan.
- h. Analisis, merupakan tahapan menganalisis teori yang sudah ada serta dikembangkan berdasarkan tujuan studi penelitian.

2. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dilakukan setelah tahap pengelolaan data selesai, pada teknik ini data disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu seperti berupa tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah dalam pembacaan dan pemahaman. Dari data yang sudah diperoleh dan dipilih untuk menjadi data yang bisa dianalisis maka data tersebut dapat disajikan dalam beberapa bentuk, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Secara deskriptif, terutama untuk data yang berkaitan dengan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu.
- b. Menampilkan peta-peta yang berkaitan dengan wilayah studi serta skema-skema yang bisa menggambarkan hasil wawancara dengan narasumber serta masyarakat yang dipilih untuk diwawancarai.
- c. Menampilkan foto-foto dokumentasi yang diperoleh pada objek penelitian dan relevan dengan substansi penelitian.

3.7. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah permukiman yang termasuk ke dalam kawasan kumuh di Kelurahan Sungai Pakning. Jumlah populasi di Kelurahan Sungai Pakning adalah 600 KK dengan jumlah penduduk 1.932 Jiwa.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik untuk pengambilan sampel digunakan teknik *probability sampling* (pengambilan sampling berdasarkan peluang) dengan cara *random sampling* (acak sederhana). Semua anggota masyarakat akan mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Hal ini dapat dilakukan karena populasi masyarakat pada Kelurahan Sungai Pakning relatif homogen.

Besarnya jumlah populasi masyarakat, maka tidak semua responden dijadikan sampel. Maka dari itu penulis menggunakan rumus Slovin dengan tingkat keakuratan 95 % yaitu dengan tingkat kesalahan 5 %. Dalam menentukan jumlah sampel dari populasi dikembangkan oleh Isac dan Michael dengan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10% (Sugiyono,2010). Adapun perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin (1990) dalam Kusmayadi (2000) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (Batas Ketelitian) yaitu 5 %

Jumlah sampel untuk di Kelurahan Sungai Pakning dapat dilihat melalui perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$
$$n = \frac{600}{1+600(0,05)^2}$$
$$n = 240 \text{ KK}$$

Jadi, sampel yang ditetapkan sebanyak 240 KK di Kelurahan Sungai Pakning dan responden setiap RT nya adalah sebagai berikut :

1. RT 01 RW 01 = $\frac{95}{600} \times 240 = 38$ responden.
2. RT 02 RW 01 = $\frac{70}{600} \times 240 = 28$ responden.
3. RT 03 RW 01 = $\frac{50}{600} \times 240 = 20$ responden.
4. RT 01 RW 02 = $\frac{60}{600} \times 240 = 24$ responden.
5. RT 02 RW 02 = $\frac{55}{600} \times 240 = 22$ responden.
6. RT 03 RW 02 = $\frac{62}{600} \times 240 = 24,8 \rightarrow 25$ responden.
7. RT 01 RW 03 = $\frac{40}{600} \times 240 = 16$ responden.
8. RT 02 RW 03 = $\frac{78}{600} \times 240 = 31,2 \rightarrow 31$ responden.
9. RT 03 RW 03 = $\frac{90}{600} \times 240 = 36$ responden.

3.8. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian ini dapat dijelaskan penulis sebagai berikut:

A. Tingkat kekumuhan di permukiman Kelurahan Sungai Pakning.

Untuk mengenai tingkat kekumuhan di permukiman Kelurahan Sungai Pakning menggunakan metode analisis kuantitatif dari hasil survei yang berupa nilai dengan menggunakan analisis skoring (pembobotan) sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sistem pembobotan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penilaian tingkat kekumuhan ini terbagi empat tingkatan adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai 0 – 24 % dengan nilai bobot 0 yang berarti rendah.
 - b. Nilai 25 - 50 % dengan nilai bobot 1 yang berarti rendah.
 - c. Nilai 51 - 75 % dengan nilai bobot 3 yang berarti sedang.
 - d. Nilai 76 - 100 % dengan nilai bobot 5 yang berarti tinggi.
2. Berdasarkan kondisi kekumuhan suatu lokasi adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai 19 - 44 tergolong tingkat kumuh ringan.
 - b. Nilai 45 - 70 tergolong tingkat kumuh sedang.
 - c. Nilai 71 - 95 tergolong tingkat kumuh berat.

Perhitungan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Bangunan

- a. Ketidakteraturan bangunan, untuk perhitungan kriteria ketidakteraturan bangunan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan yang tidak memiliki keteraturan (unit)}}{\text{Jumlah keseluruhan bangunan (unit)}} \times 100 \%$$

- b. Kepadatan bangunan, untuk perhitungan kriteria kepadatan bangunan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}}{\text{luas kawasan kumuh (hektar)}} \times 100 \%$$

- c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, untuk perhitungan kriteria kepadatan bangunan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis bangunan (unit)}}{\text{Jumlah keseluruhan bangunan (unit)}} \times 100 \%$$

2. Kondisi Jalan Lingkungan

- a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan, untuk perhitungan kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas kawasan yang belum terlayani jalan lingkungan (meter)}}{\text{Jumlah keseluruhan jalan lingkungan (meter)}} \times 100 \%$$

- b. Kualitas permukaan jalan lingkungan, untuk perhitungan kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan yang rusak (meter)}}{\text{Jumlah keseluruhan jalan lingkungan (meter)}} \times 100 \%$$

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

- a. Ketersediaan akses aman air minum, untuk perhitungan kriteria ketersediaan akses aman air minum menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK tidak terakses air minum (KK)}}{\text{Jumlah keseluruhan KK (KK)}} \times 100 \%$$

- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, untuk perhitungan kriteria tidak terpenuhinya kebutuhan air minum menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK tidak terpenuhi air minum (KK)}}{\text{Jumlah keseluruhan KK (KK)}} \times 100 \%$$

4. Kondisi Drainase Lingkungan

- a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, untuk perhitungan kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{luas area yang terkena genangan (hektar)}}{\text{luas kawasan kumuh (hektar)}} \times 100 \%$$

- b. Ketidakterediaan drainase, untuk perhitungan kriteria ketidakterediaan drainase menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang drainase yang tidak tersedia (meter)}}{\text{Jumlah keseluruhan drainase (meter)}} \times 100 \%$$

- c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota, untuk perhitungan kriteria ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang drainase yang tidak terhubung dengan lainnya (meter)}}{\text{Jumlah keseluruhan drainase (meter)}} \times 100 \%$$

- d. Tidak terpeliharanya drainase, untuk perhitungan kriteria tidak terpelihara drainase menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang drainase yang tidak terpelihara (meter)}}{\text{Jumlah keseluruhan drainase (meter)}} \times 100 \%$$

- e. Kualitas kontruksi drainase, untuk perhitungan kriteria kualitas kontruksi drainase menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang drainase yang kualitas kontruksi buruk (meter)}}{\text{Jumlah keseluruhan drainase (meter)}} \times 100 \%$$

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, untuk perhitungan kriteria sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis (KK)}}{\text{Jumlah keseluruhan KK (KK)}} \times 100 \%$$

b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis, untuk perhitungan kriteria prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK dengan prasarana sarana pengelolaan air limbah (KK)}}{\text{Jumlah keseluruhan KK (KK)}} \times 100 \%$$

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, untuk perhitungan kriteria prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK dengan prasarana sarana pengelolaan persampahan (KK)}}{\text{Jumlah keseluruhan KK (KK)}} \times 100 \%$$

b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis, untuk perhitungan kriteria sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK dengan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis (KK)}}{\text{Jumlah keseluruhan KK (KK)}} \times 100 \%$$

c. Ketidakterpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, untuk perhitungan kriteria ketidakterpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah KK dengan sapras pengelolaan persampahan tidak terpelihara (KK)}}{\text{Jumlah keseluruhan KK (KK)}} \times 100 \%$$

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

- a. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran, untuk perhitungan kriteria ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan yang tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)}}{\text{Jumlah keseluruhan bangunan (unit)}} \times 100 \%$$

- b. Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran, untuk perhitungan kriteria ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan yang tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)}}{\text{Jumlah keseluruhan bangunan (unit)}} \times 100 \%$$

8. Kependudukan

- a. Kepadatan penduduk, untuk perhitungan kriteria kepadatan penduduk menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{luas kawasan kumuh (hektar)}} \times 100 \%$$

- B. Faktor-faktor penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning
Untuk mengenai faktor-faktor penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning menggunakan analisis deskriptif kualitatif mengenai :

- 1) Ekonomi, yaitu pekerjaan dan pendapatan penduduk.
- 2) Sosial Budaya, yaitu pendidikan, kebiasaan penduduk di permukiman penduduk tersebut.
- 3) Lahan, yaitu harga lahan.
- 4) Psikologis, yaitu rasa kenyamanan penduduk.

C. Arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning

Untuk mengenai arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning menggunakan analisis triangulasi.

Menurut Norman K. Denkin dalam Rahardjo (2010), Analisis triangulasi adalah sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. triangulasi ini meliputi empat hal adalah sebagai berikut :

- a. Triangulasi Metode, ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan terstruktur. Atau, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informan yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- b. Triangulasi Antar-Peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun

orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

- c. Triangulasi Sumber Data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- d. Triangulasi Teori, Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. Kecamatan Bukit Batu

4.1.1. Kondisi Fisik Dasar

1. Letak Geografis

Kecamatan Bukit Batu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bukit Batu terletak $0^{\circ}00'-1^{\circ}37'22''$ Lintang Utara, $101^{\circ}26'41''-102^{\circ}10'54''$ Bujur Timur, yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perairan perdagangan industri kabupaten maupun kota. Secara administrasi Kecamatan Bukit Batu berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Kota Dumai
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Siak Kecil
Sebelah Barat	:	Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir
Sebelah Timur	:	Selat Bengkalis

Kecamatan Bukit Batu memiliki luas wilayah sebesar 488 km². Kecamatan Bukit Batu terdiri dari satu kelurahan dan Sembilan desa yang meliputi Kelurahan Sungai Pakning, Desa Pangkalan Jambi, Desa Dompas, Desa Sejangat, Desa Sungai Selari, Desa Buruk Bakul, Desa Bukit Batu, Desa Sukajadi, Desa Pakning Asal dan Desa Batang Duku. Kecamatan Bukit Batu memiliki 26 dusun, 47 RW dan 113 RT. Ibu kota Kecamatan Bukit Batu adalah Kelurahan Sungai Pakning dimana jarak antara ibukota kecamatan dengan desa terjauh adalah 26 km sedangkan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah 17 km dan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota provinsi adalah 275 km. Tabel 4.1, 4.2, 4.3

mengenai luas wilayah menurut desa/kelurahan, jarak lurus antara ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan dan jumlah dusun, RW, dan RT di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Pangkalan Jambi	10	2,05
2.	Dompas	42	8,61
3.	Sejangat	32	6,56
4.	Sungai Pakning	34	6,97
5.	Sungai Selari	36	7,00
6.	Buruk Bakul	78	15,98
7.	Bukit Batu	106	21,72
8.	Sukajadi	138	28,28
9.	Pakning Asal*	N/A	N/A
10.	Batang Duku	12	2,00
Jumlah		488	100,00

Catatan : *) Luas wilayah masih bergabung dengan daerah asal

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.2. Jarak Lurus Antara Ibukota Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jarak Lurus (Km)
1.	Pangkalan Jambi	9
2.	Dompas	6
3.	Sejangat	4
4.	Sungai Pakning	2
5.	Sungai Selari	0
6.	Buruk Bakul	14
7.	Bukit Batu	23
8.	Sukajadi	26
9.	Pakning Asal	3
10.	Batang Duku	1

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.3. Jumlah Dusun, RW dan RT Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Pangkalan Jambi	3	6	12
2.	Dompas	2	4	8
3.	Sejangat	3	3	7
4.	Sungai Pakning	0	6	21
5.	Sungai Selari	3	3	12
6.	Buruk Bakul	2	3	6
7.	Bukit Batu	3	3	6
8.	Sukajadi	3	3	6
9.	Pakning Asal	3	8	19
10.	Batang Duku	3	8	16
	Jumlah	26	47	113

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu, 2018

2. Topografi

Kecamatan Bukit Batu memiliki topografi relatif datar, dengan ketinggian rata-rata 2 – 6,1 meter di atas permukaan laut dan memiliki kemiringan lereng 0-3 %. Kecamatan Bukit Batu ini terletak di pesisir atau tepi laut. Kecamatan Bukit Batu ini sebagian besar memiliki jenis tanah *organosol* adalah jenis tanah yang lembab dan sangat banyak mengandung bahan organik. Tabel 4.4 mengenai topografi menurut desa / kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Topografi Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Datar	Berbukit
1.	Pangkalan Jambi	Ya	
2.	Dompas	Ya	
3.	Sejangat	Ya	
4.	Sungai Pakning	Ya	
5.	Sungai Selari	Ya	
6.	Buruk Bakul	Ya	
7.	Bukit Batu	Ya	
8.	Sukajadi	Ya	
9.	Pakning Asal	Ya	
10.	Batang Duku	Ya	

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu, 2018

3. Hidrologi

Kecamatan Bukit Batu ini terdapat dua sungai yaitu sungai Siak dan sungai Bukit Batu. Sungai Bukit Batu dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga intruksi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau atau asin dengan salinitas sedang sampai tinggi. Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut. Keberadaan lahan gambut merupakan kantong-kantong penyimpanan yang sangat besar.

4. Klimatologi

Kecamatan Bukit Batu mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26° Celcius - 32° Celcius. Musim hujan biasa terjadi di sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 – 4.078 mm / tahun. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Februari – Agustus.

4.1.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang terencana akan membentuk pola penggunaan yang optimal yang dapat mengurangi frekuensi debit, erosi tanah, terwujudnya kelestarian dan mengoptimalkan produktifitas lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan lahan yang tidak terencana akan membentuk pola penggunaan lahan yang tidak optimal akan berdampak pada peningkatan erosi, banjir dan kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, penurunan produktivitas lahan, kesenjangan pendapatan masyarakat dan kemiskinan, serta konflik penggunaan lahan.

Berdasarkan profil Kecamatan Bukit Batu, Penggunaan lahan di Kecamatan Bukit Batu didominasi oleh pertanian dan perkebunan serta permukiman dan sarana prasarana seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, peribadatan, jalan dan sebagainya. Dan juga Kecamatan Bukit Batu memiliki hutan giam Siak Kecil-Bukit Batu yang merupakan salah satu dari tujuh (7) cagar biosfer Indonesia pada tahun 2009 oleh UNESCO yang memiliki suaka margasatwa seluas 21.500 hektar dan terdapat 159 jenis burung, 10 jenis mamalia, 13 jenis ikan, delapan (8) jenis reptil serta 52 jenis tumbuhan langka dan dilindungi.

4.1.3. Kependudukan

1. Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Batu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, Jumlah penduduk Kecamatan Bukit Batu adalah sebesar 19.352 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan Bukit Batu adalah sebesar 19.976 jiwa dan tahun 2018, jumlah penduduk Kecamatan Bukit Batu adalah sebesar 20.943 jiwa. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk ini dapat terjadi akibat empat komponen yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas), dan migrasi masuk dan keluar. Tabel 4.5 mengenai jumlah penduduk Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2016 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu Tahun 2016-2018

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pangkalan Jambi	1.210	1.246	1.249
2.	Dompas	1.260	1.290	1.293
3.	Sejangat	2.036	2.034	2.004
4.	Pakning Asal	3.123	3.116	3.631
5.	Kelurahan Sungai Pakning	4.163	4.438	4.505
6.	Sungai Selari	2.191	2.293	2.214
7.	Batang Duku	1.840	1.881	1.872
8.	Buruk Bakul	1.227	1.274	1.295
9.	Bukit Batu	1.175	1.192	1.119
10.	Sukajadi	1.127	1.212	1.761
Jumlah		19.352	19.976	20.943

Sumber : *Profil Kecamatan Bukit Batu, 2018*

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometre persegi. Desa atau kelurahan yang padat penduduk di Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah Desa Batang Duku dan desa atau kelurahan yang sedikit penduduk di Kecamatan Bukit Batu adalah Desa Sukajadi pada tahun 2016-2017 dan tahun 2018 Desa Bukit Batu yang sedikit penduduk. Tabel 4.6 mengenai kepadatan penduduk Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2016 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Kepadatan Penduduk Kecamatan Bukit Batu Tahun 2016 - 2018

No	Nama Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pangkalan Jambi	10	1.210	1.246	1.249	121	125	125
2.	Dompas	42	1.260	1.290	1.293	30	31	31
3.	Sejangat	32	2.036	2.034	2.004	64	64	63
4.	Pakning Asal	32	3.123	3.116	3.631	98	97	113
5.	Kelurahan Sungai Pakning	34	4.163	4.438	4.505	122	131	133
6.	Sungai Selari	36	2.191	2.293	2.214	61	64	62
7.	Batang Duku	12	1.840	1.881	1.872	153	157	156
8.	Buruk Bakul	78	1.227	1.274	1.295	16	16	17
9.	Bukit Batu	106	1.175	1.192	1.119	11	11	11
10.	Sukajadi	138	1.127	1.212	1.761	8	9	13
Jumlah		488	19.352	19.976	20.943	684	704	722

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu, 2018

3. Struktur Penduduk

Struktur penduduk atau komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristik, contohnya adalah penduduk menurut jenis kelamin. Pada tahun 2016, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Bukit Batu adalah sebesar 9.135 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 9.151 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Bukit Batu adalah sebesar 9.482 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 9.427 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Bukit Batu adalah sebesar 10.655 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 10.289 jiwa. Tabel 4.7 mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kelurahan Sungai Pakning pada tahun 2016 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Bukit Batu Tahun 2016 - 2018

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pangkalan Jambi	622	586	646	596	651	599
2.	Dompas	650	610	663	627	672	621
3.	Sejangat	1.028	1.008	1.021	1.031	1.010	994
4.	Pakning Asal	1.545	1.578	1.541	1.575	2.032	1.599
5.	Kelurahan Sungai Pakning	1.999	2.164	2.176	2.262	2.202	2.303
6.	Sungai Selari	567	560	610	602	1.115	1.099
7.	Batang Duku	915	925	939	942	935	937
8.	Buruk Bakul	632	595	655	619	670	625
9.	Bukit Batu	610	565	621	571	570	549
10.	Sukajadi	567	560	610	602	798	963
Jumlah		9.135	9.151	9.482	9.427	10.655	10.289

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu, 2018

4.1.4. Sosial Budaya

Masyarakat yang ada di Kecamatan Bukit Batu ini memiliki berbagai macam mata pencaharian yaitu di sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industry, perdagangan, pegawai negeri sipil, TNI, polisi dan sebagainya. Berdasarkan Profil Kecamatan Bukit Batu tahun 2018, Sebagian besar penduduk di Kecamatan Bukit Batu bekerja sebagai petani baik usaha tani tanaman semusim maupun perkebunan.

Masyarakat di Kecamatan Bukit Batu ini juga memiliki berbagai suku yaitu suku Melayu, Minangkabau, Batak, Jawa, Bugis, serta suku Cina. Tetapi yang lebih dominan suku di Kecamatan Bukit Batu ini adalah suku Melayu karena suku Melayu merupakan suku asli dari masyarakat Kecamatan Bukit Batu ini.

4.1.5. Sarana Prasarana

A. Sarana

1. Sarana Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penduduk yang berpendidikan dan berkualitas tinggi merupakan sumber daya yang paling utama dalam membangun daerah. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa dan negara banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Secara umum, perkembangan pendidikan ini dibagi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut :

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar yang ada di Kecamatan Bukit Batu adalah PAUD berjumlah sekolah, Taman Kanak-kanak berjumlah delapan (8) sekolah, Sekolah Dasar berjumlah 20 sekolah dan Madrasah Ibtidaiyah berjumlah dua (2) sekolah. Tabel 4.8 dan 4.9 mengenai jumlah sekolah, murid, guru dan rasio murid-guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar dan Gambar 4.1 mengenai foto sarana pendidikan dasar di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Murid (orang)	Jumlah Guru (orang)	Rasio Murid-Guru
1.	Pangkalan Jambi	0	0	0	0
2.	Dompas	1	15	3	5
3.	Sejangat	1	155	10	15
4.	Sungai Pakning	3	292	31	9
5.	Sungai Selari	1	30	3	10
6.	Buruk Bakul	0	0	0	0
7.	Bukit Batu	0	0	0	0
8.	Sukajadi	1	90	5	18
9.	Pakning Asal	1	30	3	10
10.	Batang Duku	0	0	0	0
Jumlah		8	612	55	11

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.9. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Murid (orang)	Jumlah Guru (orang)	Rasio Murid-Guru
1.	Pangkalan Jambi	1	108	14	8
2.	Dompas	1	61	15	4
3.	Sejangat	4	588	48	12
4.	Sungai Pakning	5	816	80	10
5.	Sungai Selari	1	107	13	8
6.	Buruk Bakul	2	120	28	4
7.	Bukit Batu	2	142	28	5
8.	Sukajadi	1	313	22	14
9.	Pakning Asal	1	131	11	12
10.	Batang Duku	2	274	26	11
Jumlah		20	2.660	285	9

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 4.1. Foto Sarana Pendidikan Dasar Di Kecamatan Bukit Batu

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang ada di Kecamatan Bukit Batu adalah Sekolah Menengah Pertama berjumlah enam (6) sekolah, Madrasah Tsanawiyah berjumlah satu (1) sekolah, Sekolah Menengah Atas berjumlah satu (1) sekolah, Madrasah Aliyah berjumlah satu (1) dan Sekolah Menengah Kejuruan berjumlah dua (2) sekolah . Tabel 4.10 dan 4.11 mengenai jumlah sekolah, murid, guru dan rasio murid-guru SMP, SMA, dan SMK dan Gambar 4.2 mengenai foto sarana pendidikan menengah di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Murid (orang)	Jumlah Guru (orang)	Rasio Murid-Guru
1.	Pangkalan Jambi	0	0	0	0
2.	Dompas	1	110	26	4
3.	Sejangat	0	0	0	0
4.	Sungai Pakning	2	573	62	9
5.	Sungai Selari	0	0	0	0
6.	Buruk Bakul	1	99	21	5
7.	Bukit Batu	1	163	18	9
8.	Sukajadi	0	0	0	0
9.	Pakning Asal	1	8	8	1
10.	Batang Duku	0	0	0	0
Jumlah		6	953	135	7

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.11. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Murid (orang)	Jumlah Guru (orang)	Rasio Murid-Guru
1.	Pangkalan Jambi	0	0	0	0
2.	Dompas	0	0	0	0
3.	Sejangat	1	623	43	14
4.	Sungai Pakning	0	0	0	0
5.	Sungai Selari	0	0	0	0
6.	Buruk Bakul	0	0	0	0
7.	Bukit Batu	0	0	0	0
8.	Sukajadi	0	0	0	0
9.	Pakning Asal	0	0	0	0
10.	Batang Duku	0	0	0	0
Jumlah		1	623	43	14

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.12. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Murid (orang)	Jumlah Guru (orang)	Rasio Murid-Guru
1.	Pangkalan Jambi	1	216	31	7
2.	Dompas	0	0	0	0
3.	Sejangat	0	0	0	0
4.	Sungai Pakning	0	0	0	0
5.	Sungai Selari	0	0	0	0
6.	Buruk Bakul	0	0	0	0
7.	Bukit Batu	0	0	0	0
8.	Sukajadi	0	0	0	0
9.	Pakning Asal	0	0	0	0
10.	Batang Duku	1	98	10	10
Jumlah		2	314	41	8

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018



Sumber : Hasil Survei,2019

Gambar 4.2. Foto Sarana Pendidikan Menengah Di Kecamatan Bukit Batu

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi yang ada di Kecamatan Bukit Batu adalah satu (1) universitas / akademi terbuka yang terletak di Kelurahan Sungai Pakning.

2. Sarana Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sarana kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Kecamatan Bukit Batu terdapat satu (1) Puskesmas, empat (4) Puskesmas Pembantu, tujuh (7) Pos Kesehatan Desa, satu (1) Poliklinik, dua belas (12) Praktek dokter, empat (4) Praktek Bidan, dua puluh enam (26) Posyandu dan lima (5) Apotik. Untuk saat ini tingkat pelayanan kesehatan semakin baik tetapi masih dirasakan kekurangannya dan penyebaran tenaga medis yang belum merata juga. Tabel 4.13, 4.14, 4.15 dan 4.16 mengenai jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Bukit Batu dan Gambar 4.3 mengenai foto sarana kesehatan di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13. Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Polindes Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Pustu	Jumlah Poskesdes	Jumlah Polindes
1.	Pangkalan Jambi	0	0	1	0
2.	Dompas	0	0	1	0
3.	Sejangat	0	1	0	0
4.	Sungai Pakning	1	0	1	0
5.	Sungai Selari	0	0	0	0
6.	Buruk Bakul	0	1	1	0
7.	Bukit Batu	0	0	1	0
8.	Sukajadi	0	1	1	0
9.	Pakning Asal	0	0	0	0
10.	Batang Duku	0	1	1	0
Jumlah		1	4	7	0

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.14. Jumlah Poliklinik, Praktek Dokter, Praktek Bidan, dan Posyandu Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Poliklinik	Jumlah Praktek Dokter	Jumlah Praktek Bidan	Jumlah Posyandu
1.	Pangkalan Jambi	0	0	1	2
2.	Dompas	0	0	0	1
3.	Sejangat	0	1	0	1
4.	Sungai Pakning	1	6	1	6
5.	Sungai Selari	0	3	1	2
6.	Buruk Bakul	0	0	0	3
7.	Bukit Batu	0	1	0	2
8.	Sukajadi	0	0	0	2
9.	Pakning Asal	0	1	1	3
10.	Batang Duku	0	0	0	4
Jumlah		1	12	4	26

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.15 Jumlah Apotik dan Toko Obat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Apotik	Jumlah Toko Obat
1.	Pangkalan Jambi	0	0
2.	Dompas	0	0
3.	Sejangat	0	0
4.	Sungai Pakning	4	1
5.	Sungai Selari	1	0
6.	Buruk Bakul	0	0
7.	Bukit Batu	0	0
8.	Sukajadi	0	0
9.	Pakning Asal	0	0
10.	Batang Duku	0	0
Jumlah		5	1

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018

Tabel 4.16. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Bidan	Apoteker
1.	Pangkalan Jambi	0	0	0	1	0
2.	Dompas	0	0	0	1	0
3.	Sejangat	0	0	0	1	0
4.	Sungai Pakning	4	1	0	8	1
5.	Sungai Selari	1	0	0	2	0
6.	Buruk Bakul	0	0	0	1	0
7.	Bukit Batu	0	0	0	1	0
8.	Sukajadi	0	0	0	1	0
9.	Pakning Asal	0	0	0	2	0
10.	Batang Duku	0	0	0	2	0
Jumlah		5	1	0	20	1

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu,2018



Sumber : Hasil Survei,2019

Gambar 4.3. Foto Sarana Kesehatan Di Kecamatan Bukit Batu

3. Sarana Peribadatan

Banyaknya tempat ibadah yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat adalah sebagai wadah dalam mengarahkan kehidupan kerukunan umat beragama untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Kehidupan dan kerukunan umat beragama ini semakin baik apabila tersedia fasilitas yang memadai, selain itu adanya dukungan prinsip kesadaran hidup berdampingan atas dasar saling menghormati eksistensi masing-masing umat beragama akan menciptakan harmonisasi peran masif bagi kepentingan semua golongan.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bukit Batu ini menganut agama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid maupun mushalla / langgar di Kecamatan Bukit Batu. Kecamatan Bukit Batu terdapat dua puluh tujuh (27) Masjid, dua puluh dua (22) Mushalla / langgar, dua (2) Gereja dan tiga (3) Vihara. Tabel 4.17 mengenai jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Bukit Batu dan Gambar 4.4 mengenai foto sarana peribadatan di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17. Jumlah Sarana Peribadatan / Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Masjid	Musholla / Langgar	Gereja Kristen/Katholik	Vihara/Klenteng
1.	Pangkalan Jambi	3	2	0	0
2.	Dompas	1	3	0	0
3.	Sejangat	2	6	0	0
4.	Sungai Pakning	4	4	1	0
5.	Sungai Selari	1	3	0	1
6.	Buruk Bakul	3	0	0	0
7.	Bukit Batu	3	2	1	0
8.	Sukajadi	3	0	0	1
9.	Pakning Asal	3	1	0	0
10.	Batang Duku	4	1	0	1
Jumlah		27	22	2	3

Sumber : Profil Kecamatan Bukit Batu, 2018



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 4.4. Foto Sarana Peribadatan Di Kecamatan Bukit Batu

B. Prasarana

1. Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas didarat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Jalan-jalan yang berada di Kecamatan Bukit Batu ini dikelola oleh pemerintah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa. Dan

jenis jalan yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu adalah jalan aspal dan jalan tanah. Tabel 4.18 mengenai nama jalan di Kecamatan Bukit Batu dan Gambar 4.5 mengenai foto prasarana jalan di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18. Nama Jalan di Kecamatan Bukit Batu Tahun 2018

No	Nama Jalan	Panjang	Keterangan
1.	Jalan Provinsi	70 km	
2.	Jalan Kabupaten	163.770 km	
3.	Jalan Desa	39.126 km	

Sumber : *Profil Kecamatan Bukit Batu, 2018*



Sumber : *Hasil Survei, 2019*

Gambar 4.5. Foto Prasarana Jalan Di Kecamatan Bukit Batu

2. Air Bersih

Untuk penggunaan air bersih di Kecamatan Bukit Batu penduduknya dominan masih menggunakan air bawah tanah tetapi ada juga yang menggunakan sumur bor, dan PDAM. Sedangkan sumber air minum utama yang digunakan bagi rumah tangga yang berada di Kecamatan Bukit Batu adalah menggunakan air leding, air hujan dan air kemasan. Dan sumber air untuk masak, cuci dan kakus yang digunakan bagi rumah tangga adalah sumur galian, sumur bor dan PDAM. Gambar 4.6 Foto prasarana air bersih di Kecamatan Bukit Batu adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei,2019

Gambar 4.6. Foto Prasarana Air Bersih Di Kecamatan Bukit Batu

4.2. Kelurahan Sungai Pakning

4.2.1. Kondisi Fisik Dasar

1. Letak Geografis

Kelurahan Sungai Pakning adalah salah satu kelurahan dari sepuluh desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Batu dan juga merupakan sebagai ibukota Kecamatan Bukit Batu. Kelurahan Sungai Pakning memiliki luas wilayah sebesar 34 km² dan memiliki enam (6) RW dan 21 RT. Secara administrasi, Kelurahan Sungai Pakning ini berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Desa Sungai Selari
Sebelah Selatan	:	Desa Pakning Asal
Sebelah Barat	:	Kecamatan Mandau
Sebelah Timur	:	Pulau Tanjung Padang

2. Topografi

Kelurahan Sungai Pakning memiliki topografi relatif datar, dengan ketinggian rata-rata dua (2) sampai enam koma satu (6,1) meter di atas permukaan laut. Kelurahan Sungai Pakning ini sebagian besar memiliki jenis tanah *organosol* adalah jenis tanah yang lembab dan sangat banyak mengandung bahan organik.

3. Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kelurahan Sungai Pakning berdasarkan keberadaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Air Tanah, kebutuhan air bersih dan air minum di daerah ini sebagian besar diperoleh dari sumur permukaan dengan kedalaman tiga (3) sampai tujuh (7) meter yang kondisinya baik dan terkadang tidak baik.
- b. PDAM, masyarakat Kelurahan Sungai Pakning sebagian besar memakai air bersih yang berasal dari PDAM yang digunakan sebagai salah satu sumber air bersih oleh masyarakat untuk MCK.

4. Klimatologi

Kelurahan Sungai Pakning ini mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26° Celcius - 32° Celcius. Musim hujan biasa terjadi di Kelurahan Sungai Pakning sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 – 4.078 mm / tahun. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Februari – Agustus.

4.2.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang terencana akan membentuk pola penggunaan yang optimal yang dapat mengurangi frekuensi debit, erosi tanah, terwujudnya kelestarian dan mengoptimalkan produktifitas lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan lahan yang tidak terencana akan membentuk pola penggunaan lahan yang tidak optimal akan berdampak pada peningkatan erosi, banjir dan kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, penurunan produktivitas lahan, kesenjangan pendapatan masyarakat dan kemiskinan, serta konflik

penggunaan lahan. Berdasarkan profil Kelurahan Sungai Pakning, Penggunaan lahan di Kelurahan Sungai Pakning didominasi permukiman dan sarana prasarana seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, peribadatan, industri, jalan dan sebagainya serta pertanian, perkebunan dan industri yaitu kilang minyak pertamina.

4.2.3. Kependudukan

1. Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebesar 4.163 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebesar 4.438 jiwa. Jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Pakning ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk ini dapat terjadi akibat empat komponen yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas), dan migrasi masuk dan keluar. Tabel 4.19 dan 4.20 mengenai Jumlah penduduk dan jumlah Kartu Keluarga Kelurahan Sungai Pakning pada tahun 2016 – 2018 dan Jumlah KK menurut RT di Kelurahan Sungai Pakning tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19. Jumlah Penduduk dan Jumlah KK Kelurahan Sungai Pakning Tahun 2016 -2018

	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah Penduduk	4.163 Jiwa	4.438	4.505
Jumlah Kartu Keluarga	1.254 KK	1.314 KK	1.290 KK

Sumber : Profil Kelurahan Sungai Pakning, 2018

Tabel 4.20. Jumlah KK Menurut Rukun Tetangga DiKelurahan Sungai Pakning Tahun 2018

No	RT / RW	Jumlah Kartu Keluarga (KK)
1.	RW I	
	RT I / RW I	95
	RT II / RW I	70
	RT III / RW I	50
2.	RW II	
	RT I / RW II	60
	RT II / RW II	55
	RT III / RW II	62
3.	RW III	
	RT I / RW III	40
	RT II / RW III	78
	RT III / RW III	90
4.	RW IV	
	RT I / RW IV	40
	RT II / RW IV	35
	RT III / RW IV	40
	RT IV / RW IV	40
	RT V / RW IV	40
5.	RW V	
	RT I / RW V	95
	RT II / RW V	100
	RT III / RW V	105
6.	RW VI	
	RT I / RW VI	50
	RT II / RW VI	50
	RT III / RW VI	45
	RT IV / RW VI	50

Sumber : *Profil Kelurahan Sungai Pakning, 2018*

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kelurahan Sungai Pakning setiap tahunnya meningkat dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya juga. Tabel 4.21 Kepadatan Penduduk Kelurahan Sungai Pakning pada tahun 2016 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21. Kepadatan Penduduk Kelurahan Sungai Pakning Tahun 2016 - 2018

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2016	4.163	34	122
2017	4.438	34	131
2018	4.505	34	133

Sumber : Profil Kelurahan Sungai Pakning, 2018

3. Struktur Penduduk

Struktur penduduk atau komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristik, contohnya adalah penduduk menurut jenis kelamin dan penduduk menurut umur.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017, jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang lebih banyak di Kelurahan Sungai Pakning adalah jumlah penduduk perempuan. Dan jumlah penduduk menurut umur yang lebih banyak di Kelurahan Sungai Pakning adalah pada umur 15 – 56 tahun. Tabel 4.22 dan 4.23 Yang mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan menurut kelompok umur Kelurahan Sungai Pakning pada tahun 2016 – 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Sungai Pakning Tahun 2016-2017

Jenis Kelamin	Tahun 2016	Tahun 2017
Laki-Laki	1.999 Jiwa	2.176 Jiwa
Perempuan	2.164 Jiwa	2.262 Jiwa

Sumber : Profil Kelurahan Sungai Pakning, 2018

Tabel 4.23. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelurahan Sungai Pakning Tahun 2016-2017

No	Golongan Umur	Tahun 2016 (Jiwa)	Tahun 2017 (Jiwa)
1.	0 – 12 Bulan	97	129
2.	1 – 5 Tahun	305	453
3.	5 – 7 Tahun	186	307
4.	7 – 15 Tahun	576	462
5.	15 – 56 Tahun	2.486	2.551
6.	≥ 56 Tahun	513	536
Jumlah		4.163	4.438

Sumber : Profil Kelurahan Sungai Pakning, 2018

4.2.4. Sosial Budaya

Penduduk yang ada di Kelurahan Sungai Pakning ini memiliki berbagai macam mata pencaharian yaitu di sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industry, perdagangan, pegawai negeri sipil, TNI, polisi dan sebagainya. Berdasarkan profil Kelurahan Sungai Pakning, sebagian besar penduduk Kelurahan Sungai Pakning bekerja sebagai pedagang, buruh, dan PNS.

Penduduk di Kelurahan Sungai Pakning ini memiliki berbagai macam suku yaitu suku Melayu, Jawa, Cina, Batak, Bugis, Minangkabau, dan lainnya. Berdasarkan profil Kelurahan Sungai Pakning, sebagian besar suku penduduk Kelurahan Sungai Pakning ini adalah suku Melayu dan juga masih terdapat suku asli. Tabel 4.24 dan 4.25 mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian dan menurut suku/etnis Kelurahan Sungai Pakning pada tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Sungai Pakning Tahun 2016-2017

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Petani	122	123
2.	Pedagang	172	172
3.	Peternak	76	64
4.	Pengrajin	19	18
5.	PNS	298	298
6.	Honorir	97	97
7.	TNI/ABRI/POLRI	23	40
8.	Dokter / Bidan	12	13
9.	Karyawan Swasta	139	139
10.	Nelayan	15	35
11.	Buruh	218	223
12.	Pensiunan	66	70
13.	Jasa Pengangkutan (ojek, becak, dll)	8	8
14.	Lainnya (Karyawan BUMN)	90	125

Sumber : Profil Kelurahan Sungai Pakning, 2018

Tabel 4.25. Jumlah Penduduk Menurut Suku/Etnis Kelurahan Sungai Pakning Tahun 2016-2017

No	Suku / Etnis	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Melayu	2.424	2.660
2.	Jawa	510	517
3.	Cina	513	515
4.	Batak	100	200
5.	Bugis	89	89
6.	Minangkabau	302	325
7.	Suku Asli	7	7
8.	Lainnya	120	125

Sumber : Profil Kelurahan Sungai Pakning, 2018

4.2.5. Sarana Prasarana

A. Sarana

1. Sarana Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penduduk yang berpendidikan dan berkualitas tinggi merupakan sumber daya yang paling utama dalam membangun daerah. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa dan negara banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Secara umum, perkembangan pendidikan ini dibagi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut :

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar yang ada di Kelurahan Sungai Pakning adalah PAUD berjumlah lima (5) sekolah, taman kanak-kanak berjumlah empat (4) sekolah, sekolah dasar berjumlah empat (4) sekolah, madrasah ibtidaiyah berjumlah satu (1) sekolah dan sekolah dasar swasta berjumlah satu (1) sekolah. Gambar 4.7 mengenai foto sarana pendidikan dasar di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 4.7. Foto Sarana Pendidikan Dasar Di Kelurahan Sungai Pakning

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang ada di Kelurahan Sungai Pakning adalah sekolah menengah pertama berjumlah satu (1) sekolah, dan sekolah menengah pertama swasta berjumlah satu (1) sekolah. Kelurahan Sungai Pakning ini tidak memiliki sekolah menengah atas dan sederajatnya. Gambar 4.8 mengenai foto sarana pendidikan menengah di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 4.8. Foto Sarana Pendidikan Menengah Di Kelurahan Sungai Pakning

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi yang ada di Kelurahan Sungai Pakning adalah satu (1) universitas / akademi terbuka.

2. Sarana Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sarana kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan

murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Kelurahan Sungai Pakning terdapat satu (1) rumah sakit swasta, satu (1) puskesmas, enam (6) praktek dokter, enam (6) posyandu dan lima (5) apotik. Untuk saat ini tingkat pelayanan kesehatan semakin baik tetapi masih dirasakan kekurangannya dan penyebaran tenaga medis yang belum merata juga. Gambar 4.9 mengenai foto sarana kesehatan di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 4.9. Foto Sarana Kesehatan Di Kelurahan Sungai Pakning

3. Sarana Peribadatan

Banyaknya tempat ibadah yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat adalah sebagai wadah dalam mengarahkan kehidupan kerukunan umat beragama untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Kehidupan dan kerukunan umat beragama ini semakin baik apabila tersedia fasilitas yang memadai, selain itu adanya dukungan prinsip kesadaran hidup berdampingan

atas dasar saling menghormati eksistensi masing-masing umat beragama akan menciptakan harmonisasi peran masif bagi kepentingan semua golongan.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Sungai Pakning ini menganut agama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid maupun mushalla / langgar di Kelurahan Sungai Pakning. Di Kelurahan Sungai Pakning terdapat empat (4) unit masjid, tiga (3) unit mushalla / langgar, dua (2) unit gereja dan satu (1) unit vihara. Gambar 4.10 mengenai foto sarana peribadatan di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 4.10. Foto Sarana Peribadatan Di Kelurahan Sungai Pakning

B. Prasarana

1. Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas didarat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat

menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Jalan-jalan yang berada di Kelurahan Sungai Pakning ini dikelola oleh pemerintah baik pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kecamatan atau pemerintah Desa. Kondisi jalan di Kelurahan Sungai Pakning ini sudah tergolong baik tetapi masih terdapat kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat serta juga masih ada jalan tanah di permukiman penduduk. Gambar 4.11 mengenai foto prasarana jalan di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei,2019

Gambar 4.11. Foto Prasarana Jalan Di Kelurahan Sungai Pakning

2. Air Bersih

Untuk penggunaan air bersih di Kelurahan Sungai Pakning penduduknya dominan masih menggunakan air bawah tanah (sumur galian) tetapi ada juga yang menggunakan sumur bor, dan PDAM. Sedangkan sumber air minum utama yang digunakan bagi rumah tangga yang berada di Kelurahan Sungai Pakning adalah menggunakan air hujan dan air kemasan serta ada juga yang menggunakan air sumur galian atau sumur bor. Dan sumber air untuk masak, cuci dan kakus yang digunakan bagi rumah tangga adalah sumur galian, sumur bor dan PDAM. Dimana penduduk yang menggunakan air PDAM itu penduduk yang berpendapatan tinggi.

Gambar 4.12 mengenai foto prasarana air bersih di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 4.12. Foto Prasarana Air Bersih Di Kelurahan Sungai Pakning

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tingkat Kekumuhan Pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning

5.1.1. Kondisi Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning

A. Kondisi Bangunan

Kondisi perumahan dan permukiman di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning ini sangat rapat dengan bangunan yang permanen dan semi permanen. Selain itu juga terdapat perumahan non permanen yang kurang memenuhi persyaratan permukiman layak huni. Adapun persyaratan perumahan layak huni yaitu keteraturan letak bangunan penilaian dari segi pondasi bangunan, dinding, atap, dan kepadatan bangunan dengan luas ≥ 200 unit/hektar untuk kota kecil. Selain itu suatu bangunan harus memenuhi persyaratan teknis bangunan yang ditinjau dari kesesuaian lokasi, keamanan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan. Semakin banyak rumah dalam suatu lingkungan permukiman yang tidak memenuhi persyaratan huni dapat menyebabkan tingkat keselamatan, kesehatan, dan keamanan penghuni perumahan / permukiman kurang terjamin. Tabel 5.1 mengenai kriteria rumah penduduk di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning dan Gambar 5.1 dan 5.2 mengenai kondisi rumah yang tidak layak huni dan kondisi rumah rapat dikawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning:

Tabel 5.1. Kriteria Rumah Penduduk di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Kriteria Rumah	Jumlah Rumah (unit)
1.	Permanen	210
2.	Semi Permanen	274
3.	Non Permanen	50
Total		534

Sumber : Hasil Survei, 2019



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.1. Kondisi Rumah Penduduk yang Tidak Layak Huni



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.2. Kondisi Rumah Penduduk Rapat

B. Jalan Lingkungan

Jalan berfungsi sebagai prasarana penghubung antar wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu jalan juga berfungsi sebagai jalur interaksi antar suatu kawasan dengan kawasan lain. Kualitas jalan di suatu wilayah dari segi kualitas permukaannya yang dikategorikan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat serta berstruktur beton, aspal dan paving.

Jaringan jalan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh ini sudah tergolong baik. Kontruksi jalan berupa aspal dengan lebar sebesar lima (5) hingga enam (6) meter yang menghubungkan antar wilayah. Untuk daerah permukiman padat penduduk kondisi jalan umumnya berkontruksi aspal dengan

lebar sebesar satu (1) hingga dua (2) meter dengan kondisi sebagian jalan baik tetapi ada juga yang rusak ringan dan masih terdapat jalan tanah. Tabel 5.2 dan 5.3 mengenai nama, panjang dan kondisi jalan lingkungan dan nama, panjang jalan lingkungan tanah dan Gambar 5.3 mengenai kondisi jalan dikawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Nama, Panjang dan Kondisi Jalan Lingkungan di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (meter)	Kondisi
1.	Jalan Maheran	492	Rusak Ringan
2.	Jalan Taqwa	208	Baik
3.	Jalan Al-Huda	147	Baik
4.	Jalan Panglima Kenaik	389	Baik
5.	Jalan Ali Akbar	241	Rusak Ringan
6.	Jalan Ibrahim Said	230	Rusak Ringan
7.	Jalan SMP	271	Rusak Ringan
8.	Jalan Bina	183	Baik
9.	Jalan Laksamana Saleh	281	Baik
10.	Jalan Datuk Jamal	213	Baik
11.	Jalan Bioskop	224	Rusak Ringan
12.	Jalan Madrasah	181	Baik
13.	Jalan Al-Amin	256	Baik
14.	Jalan Hidayah	191	Rusak Ringan
Total		3.507	

Sumber : Hasil Survei, 2019

Tabel 5.3. Nama dan Panjang Jalan Lingkungan Tanah di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (meter)
1.	Jalan Al-Huda	104
2.	Jalan Rogayah	167
3.	Jalan Buntu	65
4.	Jalan tiar	50
5.	Jalan Madrasah	70
Total		456

Sumber : Hasil Survei, 2019



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.3. Kondisi Jalan di Permukiman Penduduk

C. Penyediaan Air Minum

Di dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tidak dapat terpisah dari keberadaan air bersih yang sesuai dengan standar baku kualitas air bersih atau syarat kesehatan seperti tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, tidak mengandung bakteri-bakteri dan sebagainya. Selain itu, masyarakat harus memenuhi standar kuantitas yaitu sebanyak 60 liter/orang/hari.

Sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning ini menggunakan sumur galian, menampung air hujan dan sumur bor. Dimana sebagian sumur bor yang terdapat di kawasan permukiman kumuh tersebut merupakan bantuan dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang digunakan secara bersama. Tetapi sebagian masyarakat juga

menggunakan air yang berasal dari PDAM. Masyarakat menggunakan air tersebut untuk mandi, cuci, dan kakus. Sedangkan air minum, masyarakat menggunakan air hujan dan membeli air kemasan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan menengah keatas. Tetapi ada juga masyarakat menggunakan air sumur bor dan sumur galian untuk dimasak lalu dijadikan sebagai air minum. Dimana kualitas air tersebut terkadang tidak layak (tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan No.492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum) untuk di minum dan tidak sehat untuk tubuh. Tabel 5.4 dan 5.5 mengenai jumlah rumah dan KK yang menggunakan sumber air bersih dan air minum dan Gambar 5.4 mengenai sumber air bersih dan air minum penduduk :

Tabel 5.4. Jumlah Rumah Menggunakan Sumber Air Bersih di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Sumber Air Bersih	Jumlah Rumah (unit)
1.	Sumur Galian	256
2.	Sumur Bor	193
3.	PDAM	85
Total		534

Sumber : Hasil Survei, 2019

Tabel 5.5. Jumlah KK Menggunakan Sumber Air Minum di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Sumber Air Bersih	Jumlah KK
1.	Sumur Galian	156
2.	Sumur Bor	154
3.	PDAM	0
4.	Air Hujan	290
Total		600

Sumber : UPTD Kesehatan Bukit Batu, 2019



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.4. Sumber Air Bersih dan Air Minum Penduduk

D. Drainase Lingkungan

Saluran drainase dikategorikan ke dalam kondisi lancar, tidak lancar, tergenang, dan tidak ada saluran. Secara kriteria permukiman drainase tergolong dari segi kemampuan dalam mengalirkan limpasan air dengan parameter luas area genangan lebih dari 30 cm, lebih dari 2 Jam, lebih dari 2 kali per tahun serta kualitas konstruksi drainase yang aman dan sehat. Pada umumnya saluran drainase tersier yang terdapat pada lingkungan permukiman Kelurahan Sungai Pakning terbangun sejajar dengan pola jalan dan permukiman. Hampir semua sistem jaringan drainase tersebut diperkeras mengikuti pola jalan dengan lebar antara 50-80 cm dengan kedalaman bervariasi kurang lebih satu (1) meter. Sebagian besar saluran drainase merupakan saluran konstruksi terbuka.

Kondisi drainase di permukiman Kelurahan Sungai Pakning ini tergolong buruk karena beberapa kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning drainasenya dalam kondisi rusak, tersumbat oleh sampah, serta mengalami penangkalan akibat lumpur dan sampah yang menyebabkan saluran tersumbat serta saluran drainase yang terputus. Dan juga di beberapa permukiman lainnya belum memiliki saluran drainase sehingga jalan lingkungan dan daerah sekitarnya sangat rawan terhadap banjir pada saat terjadinya hujan. Tabel 5.6 mengenai panjang

drainase dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning dan Gambar 5.5 mengenai kondisi drainase dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning:

Tabel 5.6. Drainase di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Nama Jalan	Panjang Drainase (meter)
1.	Jalan Maheran	43
2.	Jalan Taqwa	0
3.	Jalan Al-Huda	35
4.	Jalan Panglima Kenaik	0
5.	Jalan Ali Akbar	83
6.	Jalan Ibrahim Said	0
7.	Jalan SMP	148
8.	Jalan Bina	183
9.	Jalan Laksamana Saleh	281
10.	Jalan Datuk Jamal	213
11.	Jalan Bioskop	57
12.	Jalan Madrasah	0
13.	Jalan Al-Amin	66
14.	Jalan Hidayah	0

Sumber : Hasil Survei, 2019



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.5. Kondisi Drainase Lingkungan

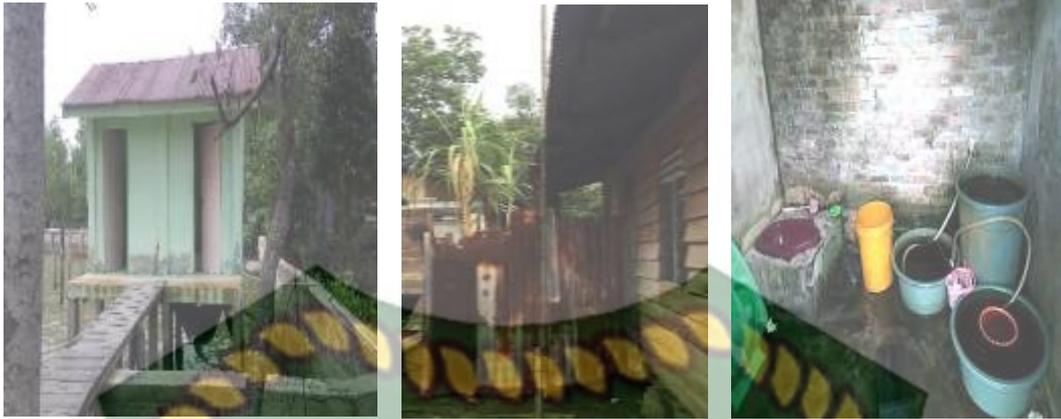
E. Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning ini menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat yaitu sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat yang dikelola oleh rumah tangga itu sendiri. Dimana menggunakan kloset leher angsa, kamar mandi dan MCK umum dengan unit pengolahan septi tank dan juga cubluk. Ada beberapa permukiman yang memiliki sanitasi yang buruk dengan letak dan kondisi yang menyebabkan kualitas lingkungan yang buruk. Beberapa permasalahan limbah rumah tangga di permukiman ini adalah masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan, kurang peduli dengan lingkungan dan perawatan jamban keluarga yang dapat menyebabkan pencemaran dilingkungan sekitar. Tabel 5.7 mengenai jumlah MCK di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning dan Gambar 5.6 mengenai kondisi MCK di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning:

Tabel 5.7. Jumlah MCK Menurut Unit Pengolahan di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Unit Pengolahan	Jumlah (unit)
1.	Menggunakan septi tank	495
2.	Tidak menggunakan septi tank	39
Total		534

Sumber : Profil Kelurahan, 2018



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.6. Kondisi MCK di Permukiman Penduduk

F. Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan yang baik dan benar adalah sesuai syarat teknis pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) tetapi di kawasan permukiman Kelurahan Sungai Pakning ini masyarakat masih menggunakan sistem pengelolaan persampahan dengan pembuangan setempat yaitu dengan cara dibakar, ditumpuk di lahan terbuka sekitar permukiman, dibuang ke drainase lingkungan dan bahkan dibuang ke laut. Dan ada juga menggunakan sistem penyediaan tempat pembuangan sampah yang diangkut oleh truk Badan Lingkungan Hidup Kecamatan Bukit Batu setiap harinya. Masyarakat yang masih menggunakan sistem pengelolaan persampahan dengan pembuangan setempat tersebut menandakan masih kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Gambar 5.7 mengenai sistem pengelolaan persampahan penduduk di Kelurahan Sungai Pakning :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.7. Sistem Pengelolaan Persampahan Penduduk

G. Proteksi Kebakaran

Proteksi kebakaran pada permukiman penduduk haruslah menjadi perhatian serius dari semua penduduk dikarenakan rumah-rumah penduduk rata-rata memiliki jarak yang berdekatan dengan rumah lain dan juga bermaterial dari kayu yang sudah sangat lama. Musibah kebakaran yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba yang diakibatkan faktor kelalaian seperti kompor meledup, pembakaran sampah, lilin yang menyala ketika listrik padam pada malam hari, bahkan akibat konsleting listrik. Sarana dan prasarana untuk proteksi kebakaran di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning ini tidak memadai karena rumah-rumah penduduk tidak memiliki sarana proteksi seperti alat pemadam api ringan dan tidak ada ruas jalan lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis proteksi kebakaran yaitu lebar jalan minimum tiga koma lima (3,5) meter sedangkan jalan lingkungan di permukiman kumuh dengan rata-rata lebar jalan satu (1)-dua (2) meter.

Berdasarkan Profil Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Bukit Batu, di lingkungan permukiman kumuh ini telah terjadi kebakaran rumah sebesar dua (2)

unit rumah pada tahun 2015, dan dua (2) unit rumah pada tahun 2018 yang diakibatkan oleh konsleting listrik. Untuk sarana dan prasarana di Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Bukit Batu ini kurang memadai dimana terdapat satu (1) unit mobil kebakaran yang berkapasitas air 5000 liter dan mobil *pick up*, pasokan air yang digunakan air PDAM. Gambar 5.8 mengenai rumah penduduk yang rapat dan bermaterial kayu di Kelurahan Sungai Pakning :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.8. Rumah Penduduk Material Kayu dan Rapat

H. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dalam satuan hektar (Ha) pada batas wilayah administrasi tertentu. Semakin padat penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan semakin banyak membutuhkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada pada wilayah tersebut. Di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning ini sangat padat penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 71,32 jiwa/ha.

I. Legalitas Tanah

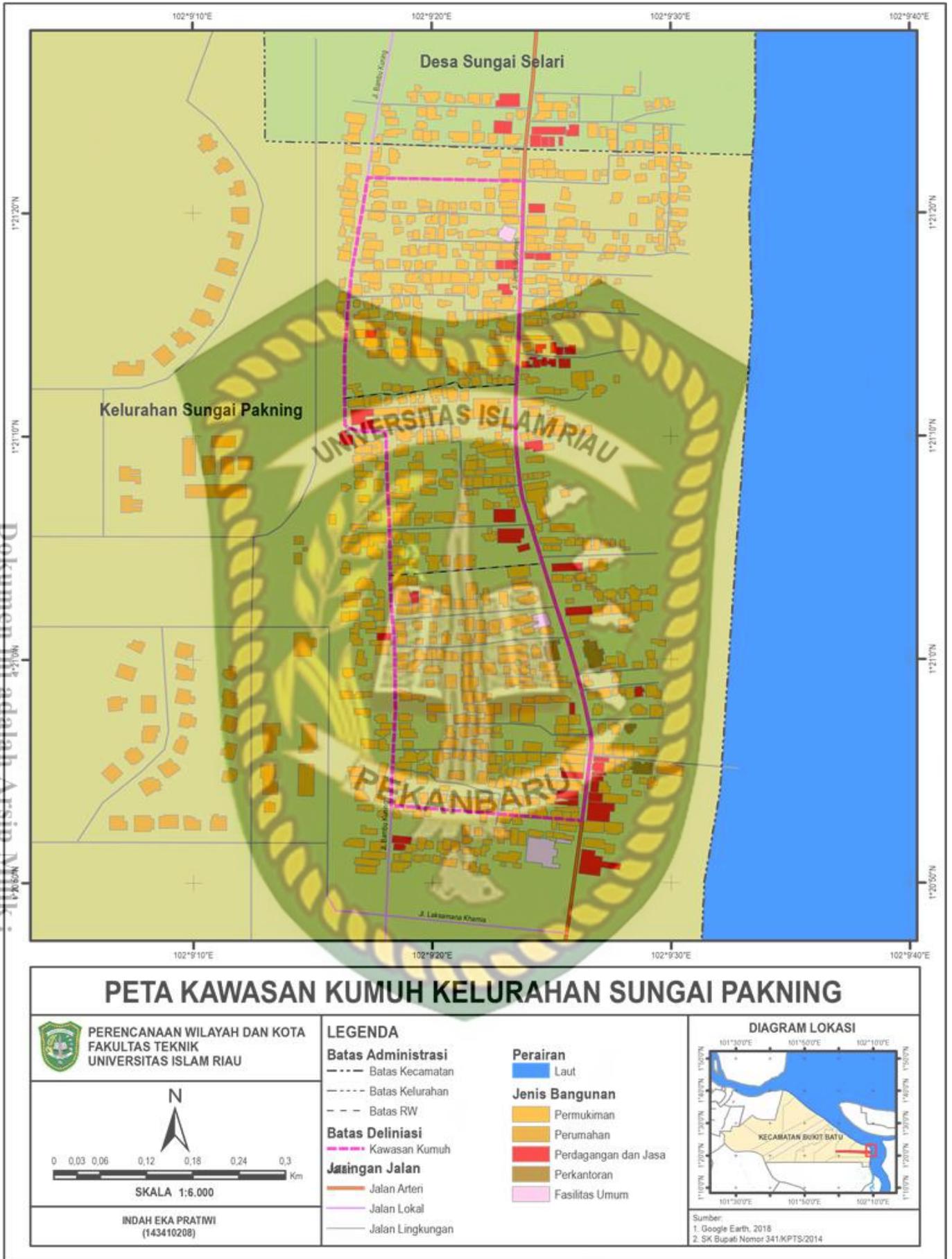
Sebagian besar legalitas tanah di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning ini adalah legal. Dan juga sebagian besar status kepemilikannya adalah hak milik dan warisan.

5.1.2. Analisis Tingkat Kekumuhan Pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/2014, Kecamatan Bukit Batu terdapat permukiman kumuh yaitu di Kelurahan Sungai Pakning, berikut ini adalah data umum permukiman kumuh di Kecamatan Bukit Batu:

1. Kawasan : Sungai Pakning
2. Kelurahan : Sungai Pakning
3. Kecamatan : Bukit Batu
4. Kabupaten / Kota : Bengkalis
5. Provinsi : Riau
6. Luas Kawasan Permukiman Kumuh : 27,09 Hektar
7. Jumlah Penduduk : 1.932 Jiwa
8. Jumlah KK : 600 KK (RW 01 – RW 03)
9. Jumlah Bangunan : 534 Unit

Untuk analisis tingkat kekumuhan di permukiman Kelurahan Sungai Pakning ini menggunakan metode analisis kuantitatif dari hasil survei yang kemudian dinilai dengan menggunakan analisis skoring (pembobotan) sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 /PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Gambar 5.9 menjelaskan peta kawasan kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014
Gambar 5.9. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Adapun analisis tingkat kekumuhan di permukiman Kelurahan Sungai Pakning terdapat sembilan aspek atau kriteria kumuh adalah sebagai berikut :

1. Kondisi bangunan gedung

Untuk kriteria ketidakteraturan bangunan, jumlah bangunan atau rumah yang tidak memiliki keteraturan di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning sebesar 299 unit dari 534 unit dengan hasil analisis sebesar 55,99 persen (%) dan penilaiannya sebesar tiga (3) dimana jika nilai analisis sebesar 51 hingga 75 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah tiga (3). Sedangkan untuk kriteria kepadatan bangunan, jumlah keseluruhan bangunan sebesar 534 unit dan luas permukiman kumuh sebesar 27,09 hektar dengan hasil analisis sebesar 19,71 persen (%) dan penilaiannya sebesar nol (0) dimana jika nilai analisis sebesar 0 hingga 24 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah nol (0). Dan untuk kriteria ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, jumlah bangunan atau rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan (keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan) sebesar 50 unit dari 534 unit dengan hasil analisis sebesar 9,36 persen (%) dan penilaiannya sebesar nol (0) dimana jika nilai analisis sebesar 0 hingga 24 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah nol (0).

2. Kondisi jalan lingkungan

Untuk kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan, luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebesar 456 meter dari 3.507 meter jalan lingkungan keseluruhan yang ada di permukiman kumuh dengan hasil analisis sebesar 13,00 persen (%) dan penilaiannya sebesar nol (0) dimana jika nilai analisis sebesar 0 hingga 24 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah nol (0).

Dan untuk kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan, kualitas jalan lingkungan yang rusak di permukiman kumuh sebesar 1.649 meter dari 3.507 meter jalan lingkungan keseluruhan yang ada di permukiman kumuh dengan hasil analisis sebesar 47,02 persen (%) dan penilaiannya sebesar satu (1) dimana jika nilai analisis sebesar 25 hingga 50 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah satu (1).

3. Kondisi penyediaan air minum

Untuk kriteria ketersediaan akses aman air minum, jumlah kartu keluarga yang masih tidak terakses air minum aman di permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebesar 310 kartu keluarga dari 600 kartu keluarga dengan hasil analisis sebesar 51,67 persen (%) dan penilaiannya sebesar tiga (3) dimana jika nilai analisis sebesar 51 hingga 75 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah tiga (3).

Dan untuk kriteria tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, jumlah kartu keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/hari sebesar 50 kartu keluarga dari 600 kartu keluarga yang ada di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning dengan hasil analisis sebesar 8,33 persen (%) dan penilaiannya sebesar nol (0) dimana jika nilai analisis sebesar 0 hingga 24 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah nol (0).

4. Kondisi drainase lingkungan

Untuk kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air yaitu luas kawasan yang terkena genangan di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning sebesar 1,70 hektar dari 27,09 hektar luas kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning dengan hasil analisis sebesar 6,28 persen (%) dan penilaiannya sebesar nol (0) dimana jika nilai analisis sebesar 0 hingga 24 persen (%) hal ini berarti

penilaiannya adalah nol (0). Kriteria ketidaktersediaan drainase di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning sebesar 570 meter dengan hasil analisis 51,40 persen (%) dan penilaiannya sebesar tiga (3), dimana jika nilai analisis sebesar 51 hingga 75 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah tiga (3). Kriteria ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota sebesar 567 meter dengan hasil analisis 51,13 persen (%) dan penilaiannya sebesar tiga (3) dimana jika nilai analisis sebesar 51 hingga 75 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah tiga (3).

Kriteria tidak terpeliharanya drainase di permukiman kumuh sebesar 375 meter dari 1.109 meter saluran drainase keseluruhan dengan hasil analisis sebesar 32,19 persen (%) dan penilaiannya sebesar satu (1) dimana jika nilai analisis sebesar 25 hingga 50 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah satu (1). Dan kriteria kualitas konstruksi drainase rusak di permukiman kumuh sebesar 698 meter dari 1.109 meter saluran drainase keseluruhan dengan hasil analisis sebesar 62,94 persen (%) dan penilaiannya sebesar tiga (3) dimana jika nilai analisis sebesar 51 hingga 75 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah tiga (3).

5. Kondisi pengelolaan air limbah

Untuk kriteria sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning sebesar 53 kartu keluarga dari 600 kartu keluarga dengan hasil analisis sebesar 8,83 persen (%) dan penilaiannya sebesar nol (0) dimana jika nilai analisis sebesar 0 hingga 24 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah nol (0). Dan kriteria prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebesar 141 kartu keluarga dari 600 kartu keluarga dengan hasil analisis sebesar 23,50 persen (%) dan penilaiannya

sebesar satu (1) dimana jika nilai analisis sebesar 25 hingga 50 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah satu (1).

6. Kondisi pengelolaan persampahan

Untuk kriteria prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebesar 469 kartu keluarga dari 600 kartu keluarga dengan hasil analisis sebesar 78,17 persen (%) dan penilaiannya sebesar lima (5) dimana jika nilai analisis sebesar 75 hingga 100 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah lima (5). Dan kriteria sistem pengelolaan sampah di permukiman kumuh yang tidak sesuai dengan standar teknis sebesar 549 kartu keluarga dari 600 kartu keluarga dengan hasil analisis sebesar 91,50 persen (%) dan penilaiannya sebesar lima (5) dimana jika nilai analisis sebesar 75 hingga 100 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah lima (5). Serta kriteria sarana prasarana pengelolaan sampah yang tidak terpelihara di permukiman sebesar 94 kartu keluarga dari 600 kartu keluarga dengan hasil analisis sebesar 15,67 persen (%) dan penilaiannya sebesar nol (0) dimana jika nilai analisis sebesar 0 hingga 24 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah nol (0).

7. Kondisi proteksi kebakaran

Untuk kriteria ketidakterediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran yaitu 534 unit bangunan atau rumah tidak terlayani prasarana dan sarana proteksi kebakaran di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning dengan hasil analisis sebesar 100 persen (%) dan penilaiannya sebesar lima (5) dimana jika nilai analisis sebesar 51 hingga 100 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah lima (5).

8. Kependudukan

Untuk kriteria kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk yang terdapat di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebesar 1.932 jiwa penduduk dengan hasil analisis sebesar 71,32 persen (%) dan penilaiannya sebesar lima (5) dimana jika nilai analisis sebesar 51 hingga 100 persen (%) hal ini berarti penilaiannya adalah lima (5).

9. Legalitas tanah

Untuk kriteria kejelasan legalitas lahan atau tanah di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning yaitu legal dimana sebagian lahan atau tanah bersertifikasi dengan bukti dokumen kepemilikan tanah atau lahan dan penilaiannya sebesar tambah satu (+1) dikarenakan lahan atau tanah di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning legal jika lahan atau tanah ilegal penilaiannya sebesar kurang satu (-1).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.8 menjelaskan analisis tingkat kekumuhan permukiman Kelurahan Sungai Pakning sebagai berikut :

Tabel 5.8. Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Kelurahan Sungai Pakning

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Hasil Analisis (%)	Nilai
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	299,00	Unit	55,99%	3
	b. Kepadatan Bangunan	19,17	Ha	19,17 %	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	50,00	Unit	9,36%	0
Rata-Rata Kondisi Bangunan Gedung				28,36%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	456,00	Meter	13,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1649,00	Meter	47,02%	1
Rata-Rata Kondisi Jalan Lingkungan				30,01%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	310,00	KK	51,67%	3
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	50,00	KK	8,33%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				30,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1,70	Ha	6,28%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	570,00	Meter	51,40%	3
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Kota	567,00	Meter	51,13%	3
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	357,00	Meter	32,19%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	698,00	Meter	62,94%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				40,79%	

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Hasil Analisis (%)	Nilai
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	53,00	KK	8,83%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	141,00	KK	23,50%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah				16,17%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	469,00	KK	78,17%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	549,00	KK	91,50%	5
	c. Ketidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	94,00	KK	15,67%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				61,78%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	534,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	534,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
8. Kependudukan	a. Kepadatan Penduduk	1.932,00	Jiwa	71,32%	5
9. Legalitas Tanah	Kejelasan legalitas lahan atau tanah		Legal		+1
Total Nilai				43	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

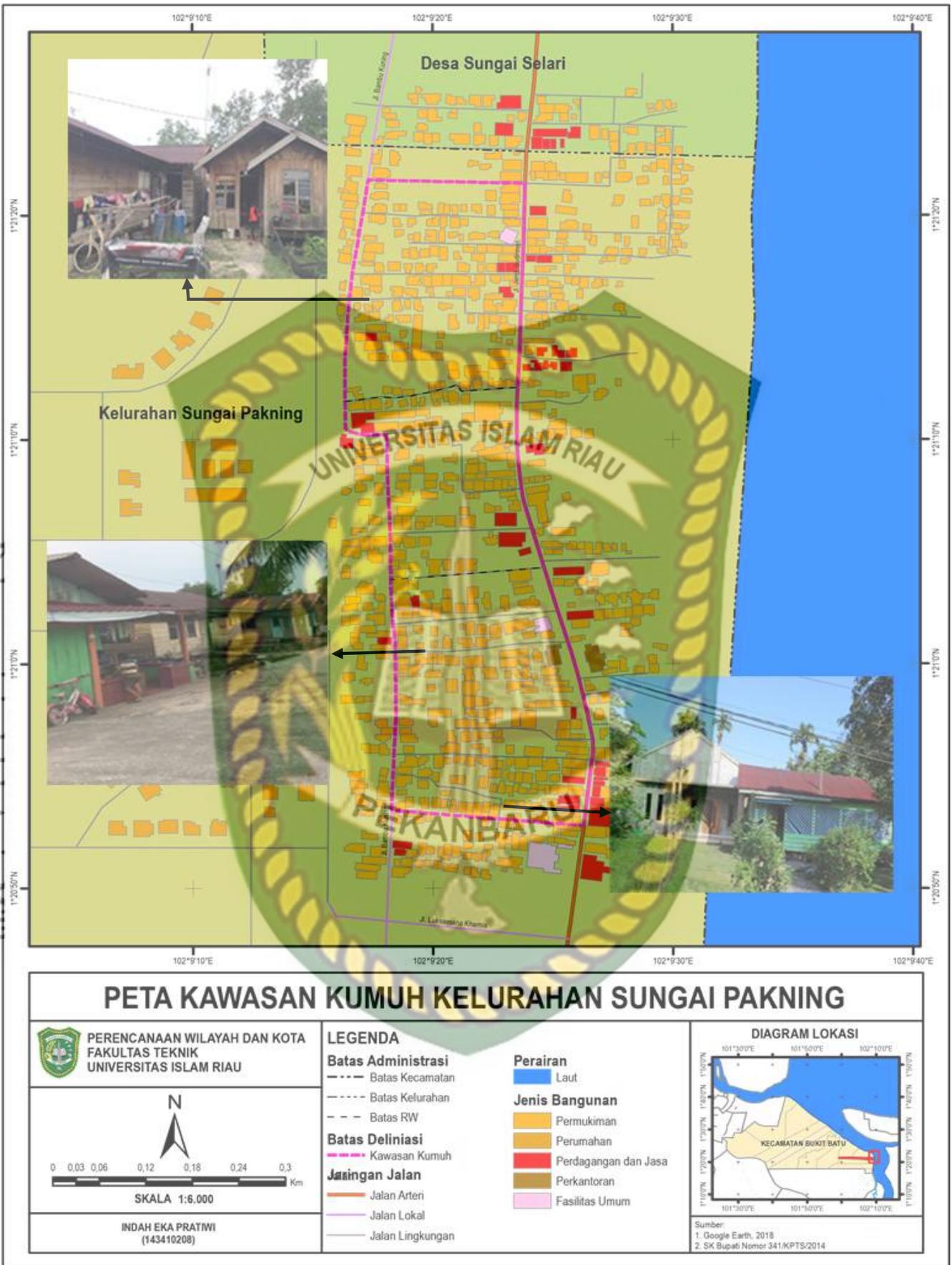
Keterangan : Nilai pembobotan (skoring) berdasarkan sebagai berikut :

- Nilai 0 : 0 – 24 persen (%)
- Nilai 1 : 25 – 50 persen (%)
- Nilai 3 : 51 – 75 persen (%)
- Nilai 5 : 76 – 100 persen (%)

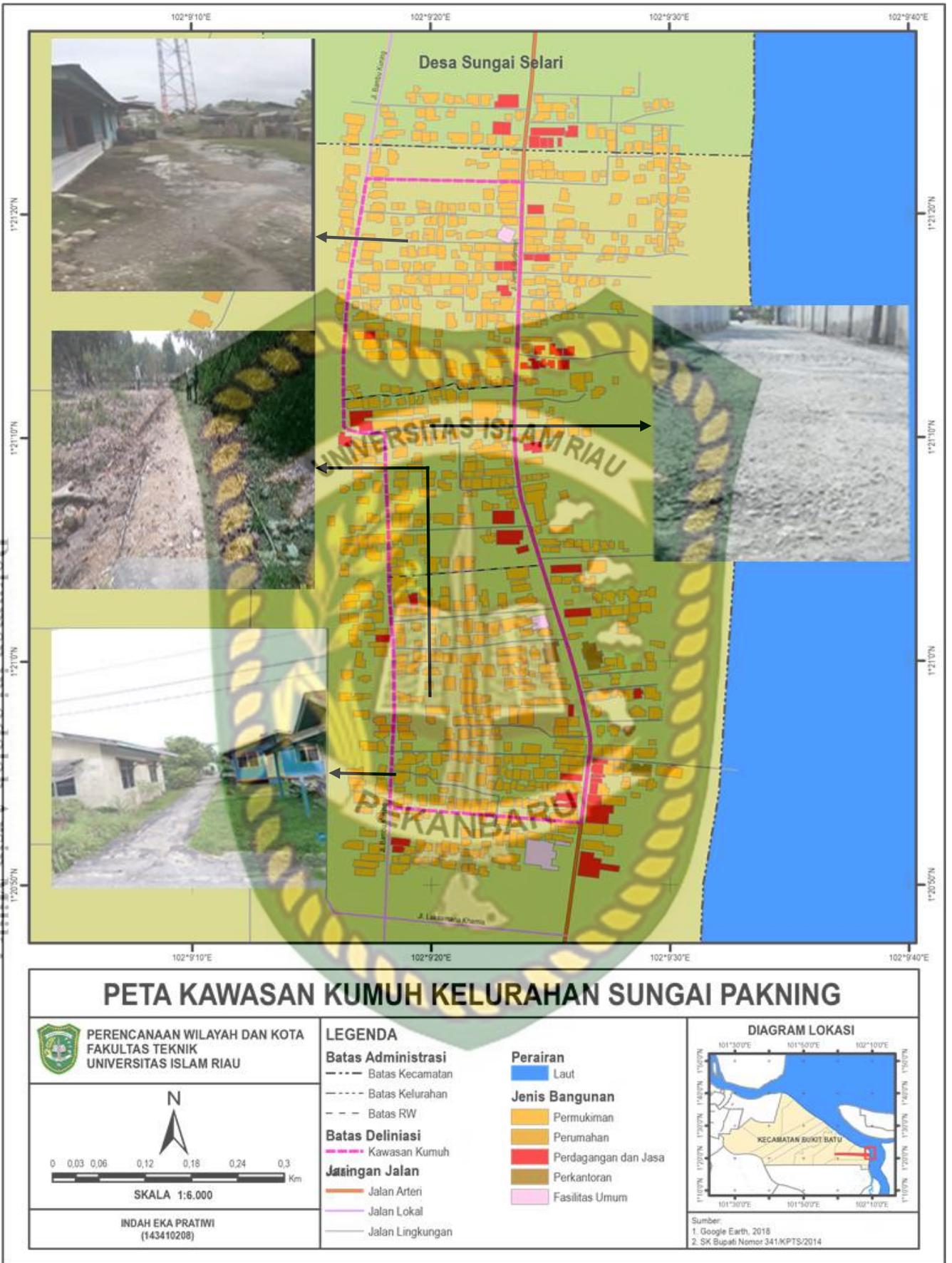
Kategori Tingkat Kekumuhan :

- Kumuh Ringan : 19 – 44
- Kumuh Sedang : 45 – 70
- Kumuh Berat : 71 – 95

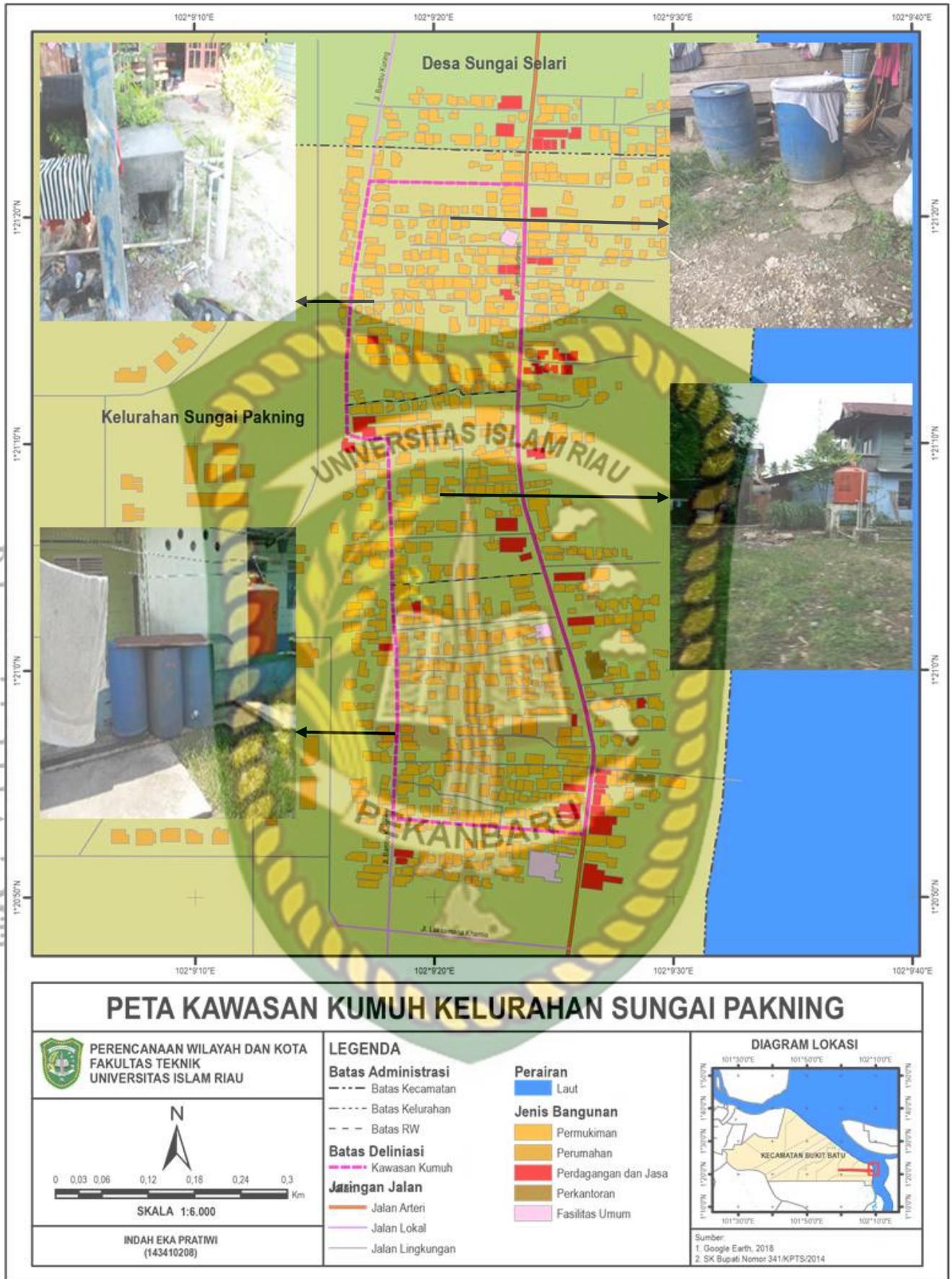
Berdasarkan Tabel 5.8. bahwa dari Sembilan aspek kriteria kumuh tersebut maka hasil analisis tingkat kekumuhan di permukiman Kelurahan Sungai Pakning adalah termasuk kedalam kategori **kumuh ringan** dengan total nilai 43, dimana tingkat kekumuhan terdapat tiga kategori yaitu kumuh ringan dengan nilai 19 sampai 44, kumuh sedang dengan nilai 45 sampai 70 dan kumuh berat dengan nilai 71 sampai 95. Oleh karena itu, termasuknya kedalam kategori kumuh sedang permukiman Kelurahan Sungai Pakning ini diperlukan penanganan, jika tidak ada penanganan maka permukiman tersebut lama kelamaan bisa menjadi kumuh berat. Permasalahan yang paling banyak terdapat pada proteksi kebakaran dengan rata-rata sebesar 100 persen (%), pengelolaan persampahan dengan rata-rata sebesar 61,78 persen (%), drainase lingkungan dengan rata-rata 40,79 persen (%) dan jalan lingkungan dengan rata-rata sebesar 30,01 persen (%). Adapun Gambar 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 menjelaskan peta kawasan kumuh permukiman Kelurahan Sungai Pakning berdasarkan tujuh aspek kriteria kawasan kumuh adalah sebagai berikut :



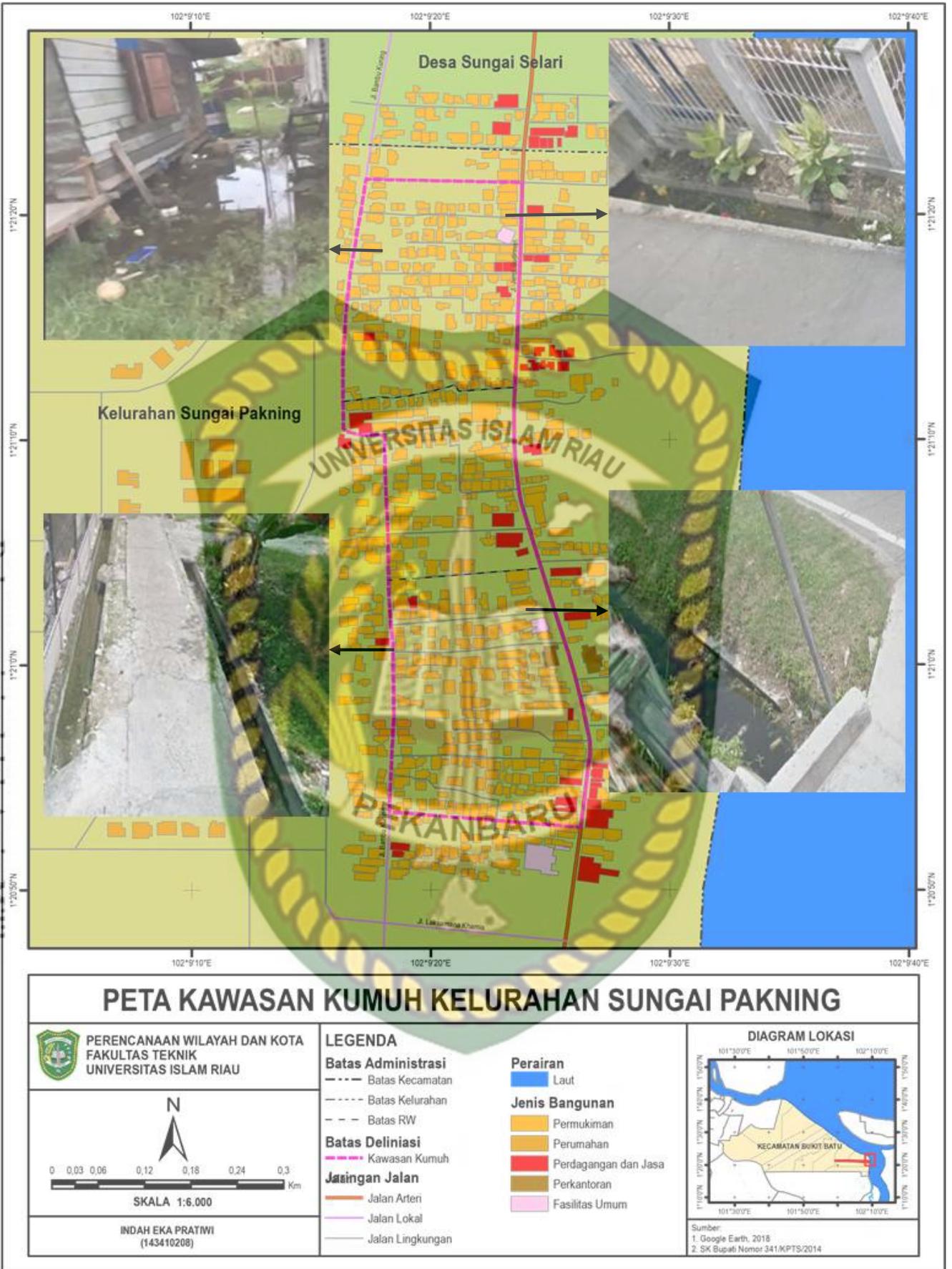
Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014
Gambar 5.10. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Bangunan



Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014
Gambar 5.11. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Jalan Lingkungan



Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014
Gambar 5.12. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Penyediaan Air Minum



Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014
Gambar 5.13. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Drainase Lingkungan

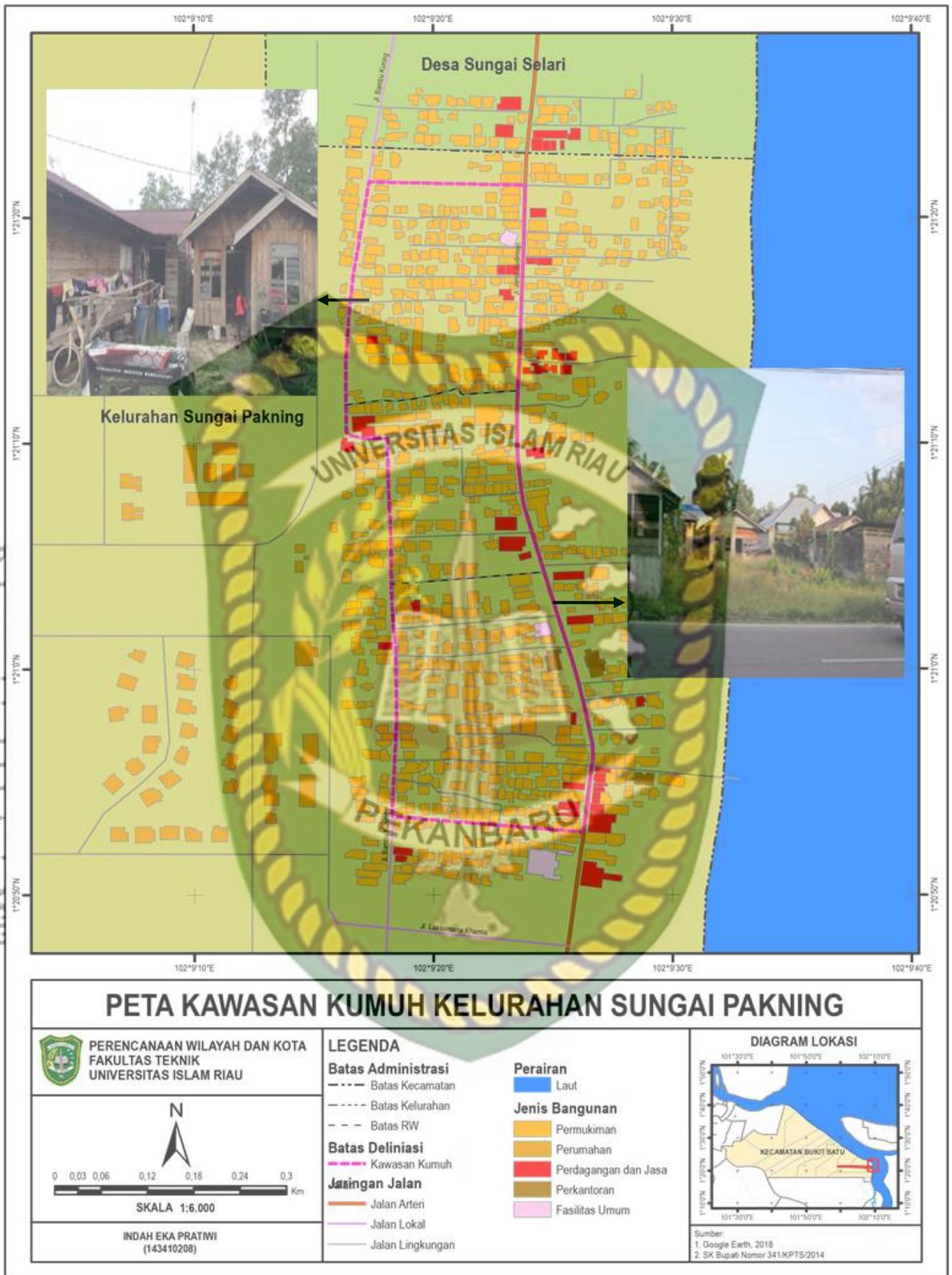


Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014

Gambar 5.14. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014
Gambar 5.15. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Pengelolaan Persampahan



Sumber : SK Bupati Nomor 341/KPTS/2014
Gambar 5.16. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Pakning Berdasarkan Kondisi Proteksi Kebakaran

5.2.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning

Faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning ini berdasarkan hasil koesioner dari 240 respoden yang tersebar di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor lahan dan faktor psikologis.

5.2.1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni.

Berdasarkan hasil kuesioner dari 240 respoden, mayoritas alasan mereka tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning itu karena dekat dengan tempat pekerjaan, penghasilan rendah dan sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dimana seseorang atau sebuah keluarga yang berpendapatan rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang memberikan kesempatan kerja. Tanpa kesempatan kerja, menopang kebutuhan sehari-hari sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidupnya. Status kepemilikan rumah dan lahan menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk maupun kualitas rumah merupakan prioritas terakhir. Oleh karena itu terpenting tersedianya rumah untuk berlindung dan beristirahat dalam upaya untuk

mempertahankan hidupnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 mengenai mata pencaharian penduduk dan penghasilan penduduk di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning dan Gambar 5.17 5.18, 5.19 yang menyajikan mengenai alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning :

Tabel 5.9. Mata Pencaharian Penduduk di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

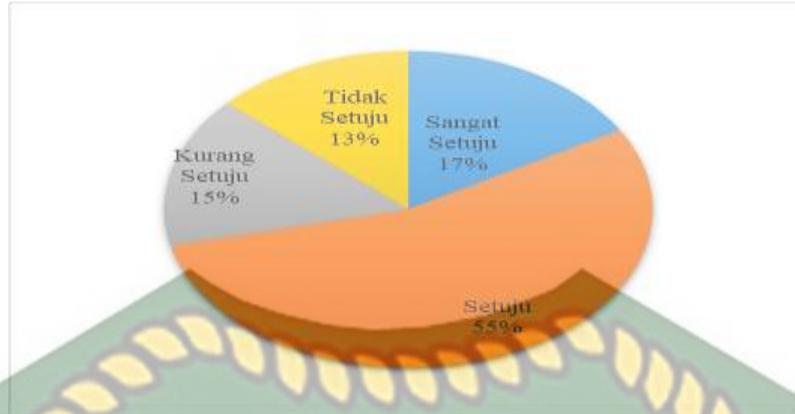
No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Nelayan	11
2.	Buruh	53
3.	Wiraswasta	42
4.	Karyawan Swasta	17
5.	PNS / TNI-POLRI	19
6.	Lainnya	98
Total		240

Sumber : Hasil Analisis,2019

Tabel 5.10. Penghasilan Penduduk di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Penghasilan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	≤ Rp. 500.000	28
2.	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	114
3.	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.500.000	82
4.	Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000	16
5.	≤ Rp. 500.000	28
6.	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	114
Total		240

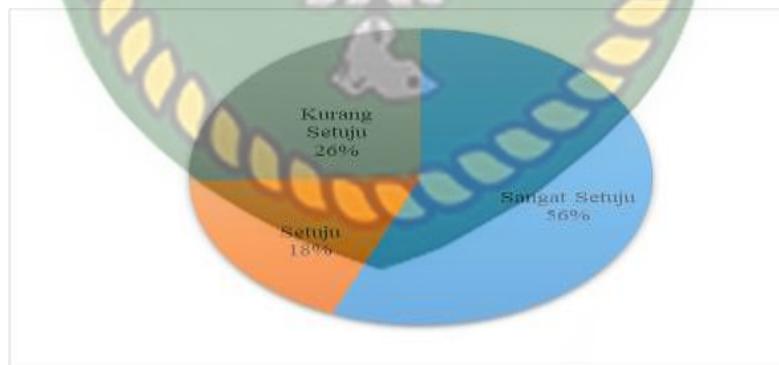
Sumber : Hasil Analisis,2019



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.17. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.17 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena dekat dengan tempat pekerjaan ini banyak mengatakan setuju sebesar 55 %. Sedangkan yang mengatakan sangat setuju sebesar 17 %, kurang setuju sebesar 15 % dan tidak setuju sebesar 13 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena dekat dengan tempat pekerjaan.

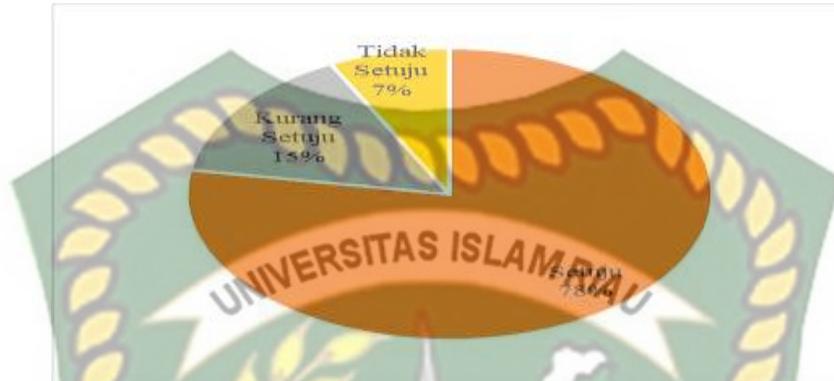


Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.18. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.18 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena penghasilan rendah ini banyak mengatakan sangat setuju sebesar 56 %. Sedangkan yang mengatakan

setuju sebesar 18 % dan kurang setuju sebesar 26 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena penghasilan rendah.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.19. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.19 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena sulit mendapatkan tempat tinggal lain, banyak mengatakan setuju sebesar 78 %. Sedangkan yang mengatakan kurang setuju sebesar 15 % dan tidak setuju sebesar 7 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena sulit mendapatkan tempat tinggal lain.

5.2.2. Faktor Sosial Budaya

Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan rendahnya tingkat pendapatan penduduk sehingga membatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil kuesioner dari 240 responden, banyak yang mengatakan tidak setuju bahwa alasan mereka tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning itu karena memiliki keahlian atau skill. dimana mereka tidak memiliki keahlian atau skill dan berpendidikan rendah yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja sektor formal. Oleh sebab itu mereka mencari pekerjaan dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan bergerak dalam sektor usaha informal seperti berdagang dekat rumahnya, buruh harian, dan sebagainya.

Dari segi budaya, banyak yang mengatakan setuju bahwa alasan mereka tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning itu karena memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sama seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 5.20 dan 5.21 yang menyajikan mengenai alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning :

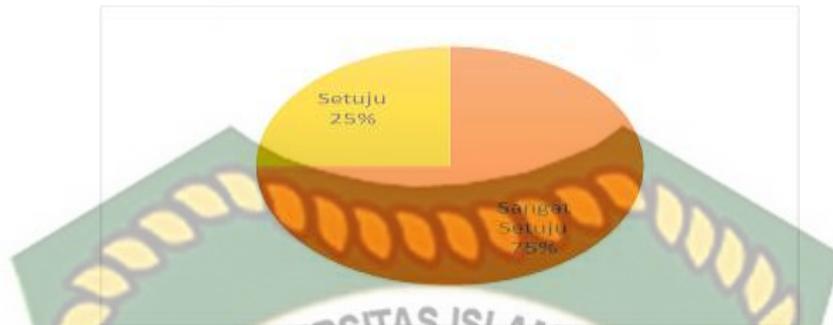


Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.20. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.20 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena memiliki keahlian / skill, banyak mengatakan tidak setuju sebesar 39 %. Sedangkan yang mengatakan kurang setuju sebesar 36 % dan setuju sebesar 25 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa

mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah bukan karena memiliki keahlian / skill.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

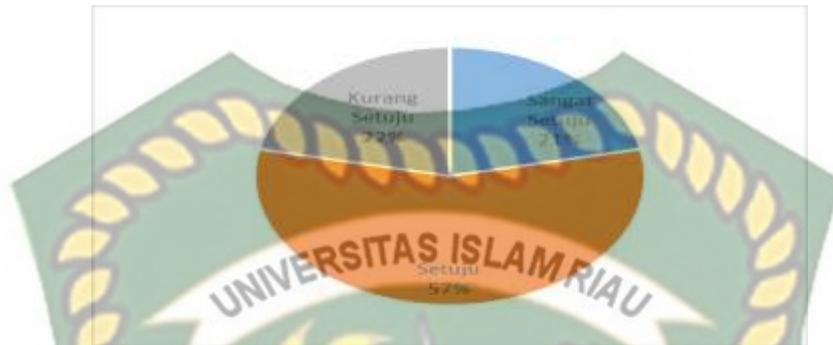
Gambar 5.21. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.21 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sama dengan masyarakat lainnya, banyak mengatakan sangat setuju sebesar 75 % dan setuju sebesar 25 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sama dengan masyarakat lainnya seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.

5.2.3. Faktor Lahan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, dengan keterbatasan lahan ini menyebabkan harga lahan melonjak tinggi sehingga perumahan semakin sulit didapat dan semakin mahal. Berdasarkan hasil kuesioner dari 240 responden, banyak yang mengatakan setuju bahwa alasan mereka tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning itu dikarenakan harga

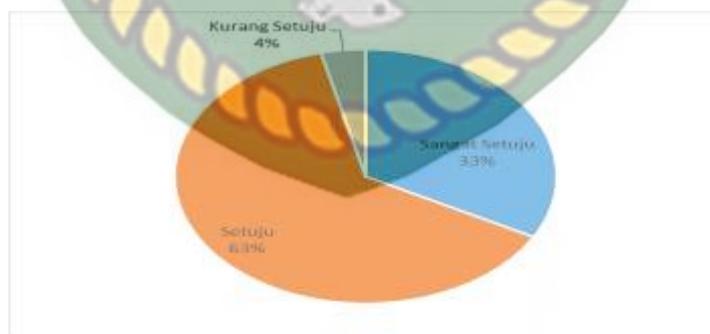
lahan mahal dan ketersediaan lahan yang terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 5.22 dan 5.23 yang menyajikan mengenai alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.22. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.22 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena harga lahan mahal, banyak mengatakan sangat setuju sebesar 21 % , setuju sebesar 57 % dan kurang setuju sebesar 22 % . Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena harga lahan mahal.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.23. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.23 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal dipermukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena ketersediaan lahan yang

terbatas, banyak mengatakan sangat setuju sebesar 33 %, setuju sebesar 63 %. Dan kurang setuju sebesar empat (4) %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal dipemukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena ketersediaan lahan yang terbatas.

5.2.4. Faktor Psikologis

Didalam permukiman tidak hanya sebagai perlindungan tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi. Proses ini adalah suatu pembelajaran seorang individu diperkenalkan kepada nilai serta adat yang ada didalam masyarakat. Dalam permukiman dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan kehidupan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan fisik saja tetapi juga kebutuhan psikis seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk aktualisasi diri dan juga kebutuhan kasih sayang sesama.

Berdasarkan hasil kuesioner dari 240 responden, banyak yang mengatakan sangat setuju bahwa alasan mereka tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning itu karena tetangganya ramah dan baik, sesame tetangga saling tolong menolong, lingkungan permukiman yang aman, dan suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang kental. Dimana penduduk tersebut memiliki tingkat sosialisasi atau interaksi sesama tetangga yang tinggi yang membuat mereka betah tinggal di lingkungan permukiman tersebut hingga bertahun-tahun. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 5.24, 5.25, 5.26, dan 5.27 yang menyajikan mengenai alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.24. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

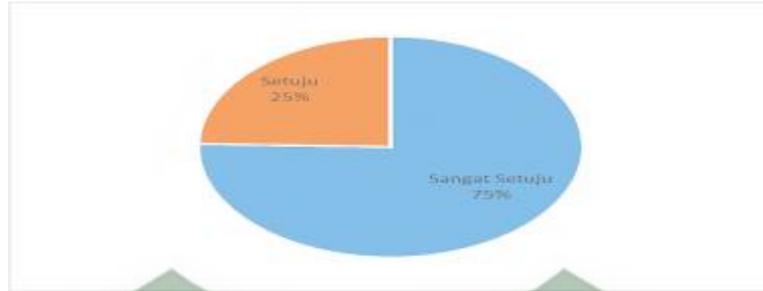
Dari Gambar 5.24 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena tetangganya ramah dan baik, banyak mengatakan sangat setuju sebesar 75 % dan setuju sebesar 25 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena tetangganya ramah dan baik.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.25. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.25 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena sesama tetangga tolong menolong, banyak mengatakan sangat setuju sebesar 75 % dan setuju sebesar 25%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena sesama tetangga tolong menolong.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.26. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.26 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena lingkungan permukiman yang aman, banyak mengatakan sangat setuju sebesar 75 % dan setuju sebesar 25%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena lingkungan permukiman yang aman.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.27. Grafik Alasan Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Dari Gambar 5.27 dapat dilihat bahwa alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning karena suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang kental, banyak mengatakan sangat setuju sebesar 75 % dan setuju sebesar 25 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas alasan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah karena suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang kental.

5.3. Arahana Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sungai Pakning

Untuk arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning menggunakan analisis triangulasi dengan metode wawancara beberapa sumber, observasi dan hasil analisis penelitian. Permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning sudah dilakukan penanganan oleh pemerintah sekitar 50 persen (%). Untuk kondisi bangunan, pemerintah telah memberikan beberapa bantuan rumah dalam program pembangunan rumah layak huni untuk rumah masyarakat yang tidak layak huni. Tetapi masih terdapat masyarakat yang menerima bantuan itu tidak menjaga dan merawat rumah tersebut dengan baik. Gambar 5.28 mengenai program pembangunan rumah layak huni di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.28. Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Untuk kondisi jalan lingkungan, pemerintah sudah melakukan penambahan jalan lingkungan baru yang sebelumnya jalan tersebut masih tanah dan sekarang sudah beraspal dan memperbaiki jalan yang rusak. Gambar 5.29 mengenai kondisi

jalan lingkungan baru di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.29. Kondisi Jalan Lingkungan Baru di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Untuk kondisi penyediaan air minum, pemerintah memberikan bantuan sumur bor yang digunakan bersama-sama dan drum plastik air minum di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning yang belum merata. Gambar 5.30 mengenai bantuan sumur bor di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.30. Bantuan Sumur Bor di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Untuk kondisi pengelolaan air limbah, pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai Stop Buang Air Besar sembarangan (BABs) dan bantuan MCK umum tetapi kondisinya sekarang udah rusak. Menurut UPTD Kesehatan Kecamatan Bukit Batu, pada tahun 2018, sudah 95 persen (%) Kelurahan Sungai Pakning sudah tidak buang air besar sembarangan (BABs). Gambar 5.31.

mengenai sosialisasi Stop Buang Air Besar sembarangan (BABs) adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.31. Sosialisasi Stop Buang Air Besar sembarangan (BABs)

Dan untuk kondisi pengelolaan persampahan, pemerintah telah menyediakan tong sampah yang tersebar tepi jalan di permukiman Kelurahan Sungai Pakning dan menyediakan mobil pengangkut sampah. Sudah tersedia tong sampah di tepi jalan masyarakat masih juga membuang sampah sembarang dan membuang sampah ke laut serta kebiasaan masyarakat yang selalu membakar sampah masih sering dilakukan di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning. Masyarakat masih juga kurang peduli dengan lingkungan dan kesehatan. Gambar 5.32. mengenai penyediaan tong sampah di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :



Sumber : Hasil Survei, 2019

Gambar 5.32. Penyediaan Tong Sampah di Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

Berikut Tabel 5.11 menjelaskan penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah di permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah :

Tabel 5.11. Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh yang Telah dilakukan Oleh Pemerintah di Kelurahan Sungai Pakning

No	Aspek	Penanganan
1.	Kondisi Bangunan	Pembangunan rumah layak huni untuk penduduk.
2.	Jalan Lingkungan	1. Semenisasi jalan lingkungan 2. Perbaikan jalan lingkungan
3.	Penyediaan Air Minum	1. Bantuan Sumur Bor 2. Bantuan penyediaan drum plastik
4.	Pengelolaan Air Limbah	1. Sosialisasi mengenai Stop Buang Air Besar sembarangan (BABs) 2. Bantuan MCK umum tetapi kondisi sudah rusak sekarang
5.	Pengelolaan Persampahan	1. Bantuan penyediaan tong sampah 2. Menyediakan mobil pengangkut sampah

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis triangulasi, dapat dilihat pada Tabel 5.12. menjelaskan arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12. Arahan Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pakning

No	Aspek	Permasalahan	Arahan Penanganan	Program
1.	Bangunan Gedung	Beberapa bangunan hunian tidak memiliki keteraturan bangunan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan dan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan teknis bangunan atau aturan bangunan. 2. Melakukan perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni. 3. Melindungi keberadaan bangunan-bangunan lama seperti deretan bangunan ruko yang bercorak arsitektur Cina-Melayu tradisional. 	Pembangunan rumah layak huni.
2.	Jalan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat permukiman yang jalan lingkungannya tanah. 2. Masih banyak jalan lingkungan dengan kondisi kualitas yang buruk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jalan lingkungan baru untuk meningkatkan kontinuitas jaringan jalan lingkungan. 2. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas jalan lingkungan yang buruk sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. 	Peningkatan dan penambahan jalan lingkungan.

No	Aspek	Permasalahan	Arahan Penanganan	Program
3.	Penyediaan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat masyarakat yang tidak dapat mengakses air minum yang layak sesuai dengan syarat kesehatan. Ada beberapa masyarakat belum terpenuhi kebutuhan air minum. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai air minum yang layak sesuai dengan syarat kesehatan. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Membangun air minum berbasis masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> PAMSIMAS (Program Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pengadaan drum air minum.
4.	Drainase Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat beberapa spot terjadi genangan ketika hujan. Drainase lingkungan yang terputus-putus, tersumbat, penuh dengan sampah dan berbau serta tidak terhubung dengan hirarkinya. Masih banyak drainase yang memiliki kondisi kualitas yang buruk atau rusak. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemeliharaan drainase dan tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran drainase. Meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase baik sistem terbuka dan tertutup. Membangun saluran drainase di kawasan permukiman yang belum terdapat drainase. 	Peningkatan dan penambahan drainase lingkungan.

No	Aspek	Permasalahan	Arahan Penanganan	Program
5.	Pengelolaan Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian rumah tangga memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 2. Sebagian rumah tangga memiliki sarana prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 3. Masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki sarana prasarana pengelolaan air limbah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan, sosialisasi dan penyuluhan tentang standar pengelolaan air limbah dan kesehatan sanitasi. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3. Peningkatan kualitas instalasi pembuangan air limbah rumah tangga (septic tank) yang ramah lingkungan. 4. Membangun septic tank atau resapan komunal di permukiman kumuh. 	SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
6.	Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat masih menggunakan sistem persampahan dengan membakar sampah, membuang sampah ke laut dan drainase, menumpuk di lahan kosong dan sebagainya. 2. Sebagian area memiliki sarana dan prasarana persampahan yang tidak terpelihara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem persampahan yang baik dan benar, dan juga pentingnya pemeliharaan sarana prasarana persampahan. 2. Melakukan pendekatan dan mengajak masyarakat membuat lubang biopori disekitar rumah. 3. Menyediakan sarana pewadahan sampah di lingkungan rumah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tong sampah organik, non organik dan plastik. 2. Pengadaan alat biopori. 3. Pembangunan TPS-3R.

No	Aspek	Permasalahan	Arahan Penanganan	Program
			4. Membangun TPS-3R di lingkungan permukiman kumuh.	
7.	Proteksi Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua rumah tangga di permukiman kumuh tidak memiliki sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR). 2. Sarana dan prasarana proteksi kebakaran di pos kebakaran di Kecamatan Bukit Batu masih belum memadai dan hanya terdapat satu mobil pemadam kebakaran. 3. Sebagian jalan lingkungan di permukiman kumuh tidak dapat di lalui oleh mobil pemadam kebakaran dan dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran. 4. Pelayanan pos kebakaran di Kecamatan Bukit Batu masih kurang baik dalam melakukan tugasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan hidran umum di setiap RT atau RW di permukiman kumuh. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran di permukiman kumuh. 3. Meningkatkan pelayanan pos kebakaran menjadi lebih baik dan cepat dalam melakukan tugasnya. 	Pengadaan hidran dan tabung alat pemadam api ringan (APAR)

Arahan penanganan lainnya adalah pemerintah dapat menyediakan ruang terbuka hijau atau taman dan jalur hijau di sepanjang Jalan Jendral Sudirman, dimana di Kelurahan Sungai Pakning ini tidak memiliki ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sarana bermain dan zona sosial bagi anak dan keluarga dan juga mengadakan lomba menghias atau menata lingkungan permukiman serta lomba kebersihan setiap rukun tetangga atau rukun warga untuk menjadikan penduduk yang mandiri, inovatif, kreatif dan menumbuhkan inisiatif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas permukiman menjadi lebih baik, bersih dan sehat serta penduduk lebih sadar dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun ilustrasi penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.33. Penataan Koridor Jalan Kawasan Permukiman (Menata Infrastruktur, Menyediakan Ruang bagi Pejalan Kaki (pedestrian) dan Jalur Hijau)



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.34. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman
(Peningkatan Kualitas Jalan dan Drainase)**



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.35. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman
(Penempatan Tong Sampah,Penerangan dan Jalur Hijau)**



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.36. Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman

Jadi dapat disimpulkan bahwa permukiman di Kelurahan Sungai Pakning termasuk dalam kategori **kumuh ringan** dengan total nilai 43 yang membutuhkan suatu penanganan, jika tidak ada penanganan maka kumuh sedang tersebut lama kelamaan akan menjadi kumuh berat. Untuk faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning disebabkan oleh (1) faktor ekonomi yaitu karena dekat dengan tempat pekerjaan, penghasilan rendah dan sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak ; (2) faktor sosial budaya yaitu karena tidak memiliki keahlian atau skill dan memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sama dengan lain (seperti perkawinan, kelahiran, kematian dan sebagainya) ; (3) faktor lahan yaitu karena harga lahan mahal dan ketersediaan lahan terbatas ; dan (4) faktor psikologis yaitu karena kenyamanan masyarakat tinggal di permukiman itu seperti tetangga ramah dan baik, sesama tetangga saling menolong, lingkungan permukiman aman dan suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang kental. Untuk arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning

merekomendasi beberapa perencanaan dengan melakukan peremajaan yaitu pembangunan rumah layak huni, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman seperti peningkatan kualitas jalan, drainase, jalur hijau, penerangan dan sebagainya, penataan ruang terbuka hijau dan mengadakan lomba menghias atau menata lingkungan permukiman dan lomba kebersihan serta pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permukiman kumuh dan pentingnya hidup sehat dan bersih serta menjaga lingkungan menjadi indah dan bersih.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tingkat kekumuhan permukiman Kelurahan Sungai Pakning bahwa dari sembilan aspek kriteria kumuh tersebut maka hasil analisis tingkat kekumuhan di permukiman Kelurahan Sungai Pakning adalah termasuk kedalam kategori **kumuh ringan** dengan total nilai 43. Oleh karena itu, termasuknya kedalam kategori kumuh sedang permukiman Kelurahan Sungai Pakning ini diperlukan penanganan, jika tidak ada penanganan maka permukiman tersebut lama kelamaan bisa menjadi kumuh berat.

Untuk faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Pakning disebabkan oleh (1) faktor ekonomi yaitu karena dekat dengan tempat pekerjaan, penghasilan rendah dan sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak ; (2) faktor sosial budaya yaitu karena tidak memiliki keahlian atau *skill* dan memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sama dengan lain (seperti perkawinan, kelahiran, kematian dan sebagainya) ; (3) faktor lahan yaitu karena harga lahan mahal dan ketersediaan lahan terbatas ; dan (4) faktor psikologis yaitu karena kenyamanan masyarakat tinggal di permukiman itu seperti tetangga ramah dan baik, sesama tetangga saling menolong, lingkungan permukiman aman dan suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang kental.

Untuk arahan penanganan permasalahan permukiman kumuh Kelurahan Sungai Pakning, penulis merekomendasi beberapa perencanaan dengan melakukan peremajaan yaitu pembangunan rumah layak huni, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman seperti peningkatan kualitas jalan, drainase, jalur hijau, penerangan dan sebagainya, penataan ruang terbuka hijau dan mengadakan lomba

menghias atau menata lingkungan permukiman dan lomba kebersihan serta pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permukiman kumuh dan pentingnya hidup sehat dan bersih serta menjaga lingkungan menjadi indah dan bersih.

6.2. Saran

- a. Perlu adanya dukungan dari masyarakat, perangkat kelurahan, pemerintah Kecamatan Bukit Batu dan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memelihara permukiman dari kekumuhan di Kelurahan Sungai Pakning.
- b. Perlu adanya kebijakan dan arahan pembangunan dalam mengenai tingkat kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Sungai Pakning, kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang , sosialisasi, serta penegakan hukum.
- c. Hasil analisis tingkat kekumuhan menghasilkan prioritas pengembangan permukiman dapat menjadi referensi bagi pemerintah kelurahan atau Kecamatan Bukit Batu dalam menentukan program dan kegiatan yang efektif sehingga hasil pembangunan perkotaan menjadi terarah dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Muta'ali, Luthfi, dkk. 2016, *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Muta'ali, Lutfi. 2015, *Teknik Analisis Regional*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.

Prayitno, Budi. 2016, *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Rindarjono, Mohammad Gamal. 2012, *Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Media Perkasa : Yogyakarta.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS :

Crysta, Agatha. 2017, *Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penanganannya (Studi Kasus : Kelurahan Keputih, Surabaya)*. Tesis. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya.

Dhea, Damisi, dkk. 2014, "Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus : Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)", Volume 6 Nomor 1, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/5282>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018.

Dinata, Apriyan. 2013, *Peranan Infrastruktur Di Dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan*, dalam <https://www.lingkungan-tropis.org/peranan-infrastruktur-apriyan-dinata>, diakses pada tanggal 08 April 2019.

Edsadova, Donata, dkk. 2016, "*Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai*", dalam <http://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFTSP&page=article&op=view&path%5B%5D=9809>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018.

Ernawati, Mia, dkk. 2014. "*Arahan Penataan Lingkungan Kawasan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tambak Wedi Kota Surabaya*", *Volume 03 Nomor 2*, dalam <http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/7282>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

Heryati. "*Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo*", dalam <https://repository.ung.ac.id/.../Identifikasi-dan-Penanganan-Kawasan-Kumuh-Kota-Gorontalo>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018.

IImy, Fatihul, dkk. 2017, "*Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)*", *Volume 6 Nomor 1*, dalam <http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/21510>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018.

Istikasari, May, dkk, 2014. "*Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi*, *Volume 02 Nomor 4*, dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/6316>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018.

Mingki , Kumurur dan Takumansang, 2015. "*Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung*, *Volume 7 Nomor 2 :429- 435*, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/9587>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

Nursyahbani, Raisya, dkk. 2015. "*Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)*", *Volume 02 Nomor 4*, dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/8463>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018.

Syam, Muhajjir. 2017, *Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganannya pada Permukiman di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*. Tesis. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar.

Wiarni, Mononimbar dan Supardjo. 2018, *Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kotamobagu Timur, Volume 5 Nomor 1*, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/19095>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

PERATURAN PEMERINTAH DAN DOKUMEN :

Kecamatan Bukit Batu. 2017, *Profil Kecamatan Bukit Batu*. Sungai Selari : Kecamatan Bukit Batu.

Kecamatan Bukit Batu. 2018, *Profil Kecamatan Bukit Batu*. Sungai Selari : Kecamatan Bukit Batu.

Kelurahan Sungai Pakning. 2017, *Profil Kelurahan Sungai Pakning*, Sungai Pakning : Kelurahan Sungai Pakning.

Kelurahan Sungai Pakning. 2018, *Profil Kelurahan Sungai Pakning*, Sungai Pakning : Kelurahan Sungai Pakning.

UPTD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2018, *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bukit Batu, Sungai Selari : Kecamatan Bukit Batu.*

Pos Kebakaran. 2018, *Profil Pos Kebakaran Kecamatan Bukit Batu, Sungai Pakning : Kecamatan Bukit Batu.*

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014. Bengkalis.

ARTIKEL :

Hartatyfatshaf. 2013. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, dalam https://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html, diakses pada tanggal 09 Agustus 2018.

Masrun, Laode. 2009. *Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh Di Pusat Kota dan Kawasan Pesisir Pantai* . dalam <http://odexyundo.blogspot.com/2009/08/faktor-penyebab-tumbuhnya-permukiman.html>, diakses pada 22 Agustus 2018.

Rahardjo, Mudjia. 2010. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, dalam <https://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2018.